

**DOKUMEN RENCANA STRATEGIS**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**  
**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**TAHUN 2015-2019**

## **KATA PENGANTAR**

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2015 tanggal 10 April 2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) Tahun 2015 – 2019 mewajibkan setiap Eselon I di lingkungan KESDM untuk menyusun Renstra unit eselon I yang mengacu pada Renstra KESDM tahun 2015 2019.

Sekretariat Jenderal KESDM adalah salah satu unit Eselon I di lingkungan KESDM yang merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Kementerian.

Renstra Sekretariat Jenderal KESDM tahun 2015 - 2019 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Jenderal KESDM. Informasi tentang keluaran/output maupun sumberdaya yang tercantum dalam dokumen rencana ini bersifat indikatif, yang akan berubah mengikuti perkembangan situasi dan kondisi.

Penyusunan Renstra Sekretariat Jenderal dilaksanakan dengan melibatkan seluruh Biro dan Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal, sehingga diharapkan Renstra Sekretariat Jenderal menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas serta dapat diimplementasikan dalam kegiatan unit di lingkungan Sekretariat Jenderal KESDM.

Sekretaris Jenderal,

M. Teguh Pamudji

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>1</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>5</b>
I.1. KONDISI UMUM.....	6
I.2. POTENSI .....	51
I.3. PERMASALAHAN.....	57
<b>II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....</b>	<b>63</b>
II.1 VISI.....	63
II.2 MISI .....	63
II.3 TUJUAN STRATEGIS.....	63
II.4 SASARAN STRATEGIS .....	64
<b>III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI .....</b>	<b>69</b>
III.1 KEBIJAKAN.....	69
III.2 STRATEGI .....	69
<b>IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....</b>	<b>83</b>
IV.1.TARGET KINERJA.....	83
IV.2.KERANGKA PENDANAAN .....	91
1. INVESTASI DAN PENDANAAN .....	91
2. PROGRAM DAN KEGIATAN POKOK SEKRETARIAT JENDERAL.....	94
3. KERANGKA PENDANAAN ESELON II SETJEN KESDM 2015-2019 ...	96

**LAMPIRAN-1:** MATRIKS KERANGKA KELEMBAGAAN SETJEN  
KESDM TAHUN 2015-2019

**LAMPIRAN-2:** MATRIKS KERANGKA REGULASI KESDM TAHUN  
2015-2019

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Komposisi Pegawai Setjen KESDM .....	9
Gambar 1.2. Target & Realisasi PNBP Sektor ESDM 2010 s/d 2014 .....	17
Gambar 1.3. Capaian Rasio Pemberitaan Sektor ESDM Tahun 2014 .....	41
Gambar 1.4. Diagram pelayanan data dan informasi sektor ESDM secara On-line .....	47
Gambar 1.5. Kontribusi PNBP terhadap APBN TA. 2010 – 2014.....	53
Gambar 1.6. Kontribusi PNBP terhadap PNBP TA. 2010 – 2014.....	53
Gambar 1.7. Struktur Organisasi Biro Keuangan .....	55
Gambar 3.1. Rencana Aksi Biro Keuangan 2015-2019 .....	74
Gambar 4.1. Indikasi Kerangka Pendanaan Sektor ESDM .....	92

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Komposisi Pegawai KESDM per Unit Eselon I .....	8
Tabel 1.2. Komposisi Pegawai Sekretariat Jenderal KESDM per Unit Eselon II .....	8
Tabel 1.3. Nomenklatur Program dan Kegiatan KESDM Tahun 2015-2019 ..	10
Tabel 1.4. Rencana Pendanaan KESDM Per Program Tahun 2015-2019 (Miliar Rp.).....	15
Tabel 1.5. Capaian PNBPN Sektor ESDM Tahun 2010 s/d 2014 .....	17
Tabel 1.6. Pagu & Realisasi Anggaran KESDM 2010-2015 .....	17
Tabel 1.7. Capaian Opini atas Laporan Keuangan .....	18
Tabel 1.8. Posisi Neraca BMN Kementerian ESDM ( <i>Unaudited</i> ) .....	19
Tabel 1.9. Neraca LKBUN KKKS Tahun 2015 ( <i>Unaudited</i> ) dan 2014 ( <i>Audited</i> ) .....	20
Tabel 1.10. Neraca Aset PKP2B Tahun 2015 ( <i>Unaudited</i> ) dan 2014 ( <i>Audited</i> )	21
Tabel 1.11. Capaian Kinerja Biro Perencanaan dan Kerja Sama 2011-2014.	32
Tabel 1.12. Daftar Peraturan Perundang-Undangan yang telah disusun pada tahun 2010-2014 .....	38
Tabel 1.13. Capaian Kinerja Biro Hukum Tahun 2014-2015.....	39
Tabel 1.14. Tingkat pendidikan PNS di lingkungan Biro Kepegawaian dan Organisasi.....	52
Tabel 1.15. Jumlah Sumber Daya Manusia Biro Keuangan .....	54
Tabel 1.16. Tingkat Pendidikan Sumber Daya Manusia Biro Keuangan .....	54
Tabel 2.1. Sasaran Strategis Biro Hukum 2015 – 2019.....	65
Tabel 3.1. Isu Strategis Biro Kepegawaian dan Organisasi .....	70
Tabel 4.1. Investasi Sektor ESDM Tahun 2015-2019 .....	93
Tabel 4.2. Indikasi APBN KESDM Tahun 2015-2019 .....	94
Tabel 4.3. Rencana Belanja Prioritas Setjen KESDM 2015-2019 .....	95

## I. PENDAHULUAN

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang energi dan sumber daya mineral dalam pemerintahan, mempunyai peran yang sangat strategis dalam proses pembangunan nasional. Hal tersebut mengingat Kementerian ESDM memiliki mandat yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yaitu, “cabang-cabang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara dan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah ditetapkan melalui Permen ESDM Nomor 13 tahun 2015 yang mencakup: visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi serta indikator kinerja strategis, program, dan kegiatan. Visi Kementerian ESDM dituangkan di dalam visi Pembangunan Nasional 2015-2019 yaitu **“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Upaya untuk mewujudkan Visi ini adalah melalui **7 Misi Pembangunan**, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk mendukung garis besar program kerja yang termuat di dalam Renstra Kementerian ESDM 2015-2019, maka perlu ditetapkan rencana strategis unit-unit yang berada di bawah Kementerian ESDM salah satunya rencana strategis Sekretariat Jenderal Kementerian.

*Catatan: Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal berpedoman kepada Rencana Strategis Kementerian ESDM 2015-2019.*

Renstra Sekretariat Jenderal 2015-2019 ini, juga disusun dengan memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan. Selain yang terkait langsung dengan pengelolaan keuangan negara, agenda prioritas dalam RPJMN 2015-2019 terutama Nawacita nomor dua yaitu membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, diperhatikan pula Perpres No. 81 Tahun 2010 *Grand design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi No. 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019.

### **I.1. KONDISI UMUM**

Sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) merupakan sektor yang memiliki peran penting dalam pembangunan nasional, terutama dalam mendukung perekonomian nasional melalui sisi fiskal, moneter maupun sektor riil. Sekurang-kurangnya terdapat 8 (delapan) peran penting sektor ESDM yang selama ini diakui, antara lain sebagai sumber penerimaan negara, penggerak pembangunan daerah, juga berperan dalam neraca perdagangan, investasi, subsidi, penyediaan energi dan bahan baku domestik, kinerja perusahaan di sektor ESDM yang mempengaruhi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan penciptaan efek berantai dari kegiatan sektor ESDM serta yang tidak kalah penting adalah penciptaan lapangan kerja.

Dalam rangka melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan mengamankan peran sektor energi dan sumber daya mineral tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) melaksanakan penyusunan kebijakan dan pengaturan (regulasi) komoditi mineral, batubara, panas bumi, minyak bumi, gas bumi, energi baru/terbarukan, dan listrik yang dilaksanakan oleh direktorat jenderal di lingkungan KESDM dan pelayanan geologi, kelitbangan, kediklatan di bidang ESDM serta operasionalisasi bidang migas oleh Badan Pengatur Usaha Hulu Migas dan Badan Pengatur Usaha Hilir Migas dan pelayanan kegiatan Dewan Energi Nasional (DEN) oleh Sekretariat Jenderal DEN.

Pelaksanaan keseluruhan kegiatan KESDM memerlukan dukungan ketersediaan Personil, Pendanaan, Peralatan, dan Dokumen (P3D) yang memadai secara kuantitatif dan kualitatif.

Sekretariat Jenderal KESDM yang merupakan unsur pembantu pimpinan, sesuai Peraturan Menteri Nomor 18 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian ESDM.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Sekretariat Jenderal KESDM mempunyai fungsi :

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Jenderal KESDM membawahi 5 biro dan 3 Pusat yaitu:

1. Biro Perencanaan dan Kerjasama
2. Biro Kepegawaian dan Organisasi
3. Biro Keuangan
4. Biro Hukum
5. Biro Umum
6. Pusat Komunikasi Publik
7. Pusat Data dan Informasi ESDM
8. Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara

Semua Biro dan Pusat yang berada di lingkungan Sekretariat Jenderal menjalankan tugas pelayanan di bidang personil, pendanaan, peralatan dan dokumen kepada seluruh unit di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Adapun kondisi umum dari bidang personil, pembiayaan, peralatan dan dokumen di KESDM adalah sebagai berikut:

#### **A. PERSONIL**

Sumber Daya Manusia merupakan komponen penting dalam pelaksanaan tugas-tugas KESDM. Tugas dan fungsi KESDM yang diamanahkan oleh negara akan dapat terlaksana dengan baik apabila sumber daya manusia yang menjalankan tugas dan fungsi tersebut memiliki kompetensi dan jumlah yang memadai. Gambaran kondisi sumber daya manusia di KESDM dapat dilihat pada uraian di bawah ini.

##### **a. Jumlah Pegawai Kementerian ESDM dan Sekretariat Jenderal KESDM per 31 Desember 2014**

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memiliki 5620 pegawai dengan penyebaran sebagai berikut :



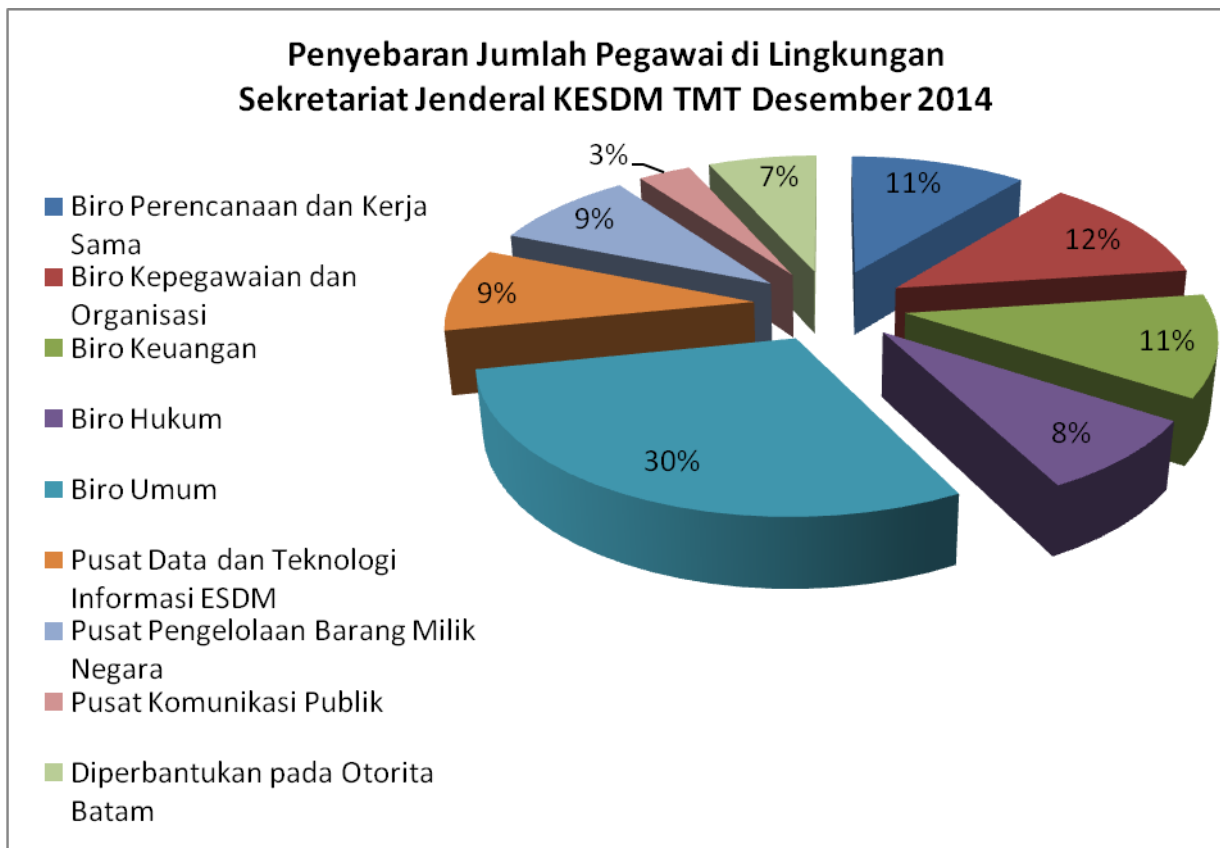
**Tabel 1.1. Komposisi Pegawai KESDM per Unit Eselon I**

<b>Unit Eselon I</b>	<b>Jumlah</b>
1. Sekretariat Jenderal	550
2. Direktorat Jenderal Migas	534
3. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	309
4. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara	430
5. Direktorat Jenderal EBTKE	253
5. Inspektorat Jenderal	196
6. Badan Geologi	1.213
7. Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM	1.166
8. Badan Pendidikan dan Pelatihan ESDM	897
9. Setjen DEN	72
10. BPH Migas	-
<b>Total</b>	<b>5620</b>

Menurut tabel tersebut di atas, Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memiliki 550 pegawai dengan penyebaran sebagai berikut :

**Tabel 1.2. Komposisi Pegawai Sekretariat Jenderal KESDM per Unit Eselon II**

<b>Unit Eselon I</b>	<b>Jumlah</b>
1. Biro Perencanaan dan Kerja Sama	60
2. Biro Kepegawaian dan Organisasi	66
3. Biro Keuangan	62
4. Biro Hukum	45
5. Biro Umum	162
6. Pusat Data dan Informasi ESDM	51
7. Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara	49
8. Pusat Komunikasi Publik	18
9. PNS Setjen KESDM diperbantukan pada Otorita Batam	37
<b>Total</b>	<b>550</b>



**Gambar 1.1. Komposisi Pegawai Setjen KESDM**

#### **b. Pengembangan Organisasi dan Kelembagaan**

Unit Organisasi yang terbentuk selama periode 2010-2014 di Setjen KESDM yaitu Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara pada tahun 2012 dan Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM yang terbentuk pada tahun 2014.

### **B. PENDANAAN**

Untuk menjamin kelangsungan tugas dan fungsi KESDM, maka diperlukan dukungan pendanaan bagi pelaksanaan tugas seluruh unit di lingkungan KESDM dan tugas-tugas pemerintahan dalam menjalankan fungsi penyediaan infrastruktur di sektor ESDM.

Secara umum pendanaan untuk menjalankan tugas dan fungsi KESDM berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan sumber pendanaan maka kegiatan KESDM dibiayai dari dana rupiah murni, penerimaan negara bukan Pajak (PNBP) serta dari pinjaman/hibah luar negeri (PHLN).

Seperti organisasi pada umumnya, seluruh program dan kegiatannya akan dilaksanakan berdasarkan visi, misi, tujuan/sasaran yang ingin dicapai. Dalam Renstra KESDM yang merupakan perencanaan jangka menengah selama 5 (lima) tahun, telah dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai. Untuk mencapai target yang diinginkan telah disusun

perencanaan program dan kegiatan di KESDM. Secara umum aspek pendanaan KESDM untuk tahun 2015-2019 adalah, sebagai berikut:

- a. Telah dilaksanakan restrukturisasi program dan kegiatan untuk meningkatkan akuntabilitas dari tiap unit di lingkungan KESDM. Setiap unit utama (unit setingkat eselon I) di lingkungan KESDM memiliki satu program (kecuali Sekretariat Jenderal memiliki dua program) dengan nama spesifik sesuai lingkup kerjanya, setiap unit eselon II memiliki satu kegiatan yang spesifik sesuai dengan tugas dan fungsinya. Terdapat 12 program dan 59 kegiatan pada 10 unit eselon I dan Badan Pengatur Usaha Hilir Migas (BPH Migas) sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 1.3. Nomenklatur Program dan Kegiatan KESDM Tahun 2015-2019**

No.	Unit Eselon I/Unit Eselon II	Program/Kegiatan
<b>1.A</b>	<b>Sekretariat Jenderal</b>	<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya</b>
	1. Biro Hukum	Pembinaan Administrasi Hukum dan Kehumasan KESDM
	2. Biro Kepegawaian dan Organisasi	Pengelolaan SDM Aparatur dan Pengembangan Organisasi KESDM
	3. Biro Keuangan	Pengelolaan Administrasi Keuangan Kementerian ESDM
	4. Biro Perencanaan dan Kerjasama	Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan dan Kerja Sama KESDM
	5. Biro Umum	Pengelolaan Administrasi Perlengkapan, Kearsipan dan Rumah Tangga KESDM
	6. Pusat Komunikasi Publik	Penyebarluasan informasi dan publikasi, hubungan lembaga dan media, dokumentasi dan analisis berita bidang energi dan sumber daya mineral (Permen ESDM No. 22/2013)
	7. Pusat Data dan Informasi ESDM	Pengelolaan Data dan Informasi Kementerian ESDM
	8. Pusat Pengelolaan BMN	Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian ESDM
<b>1.B</b>	<b>Sekretariat Jenderal</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian ESDM</b>
	1. Biro Umum	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur KESDM
<b>2.</b>	<b>Inspektorat Jenderal</b>	<b>Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ESDM</b>
	1. Inspektorat I	Penyelenggaraan Pemeriksaan dan

No.	Unit Eselon I/Unit Eselon II	Program/Kegiatan
		Pengawasan Lingkup Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi dan Satuan Kerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan DEN
	2. Inspektorat II	Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Lingkup Sekretariat Jenderal, Ditjen Mineral, Batubara dan Panas Bumi
	3. Inspektorat III	Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Itjen, Badan Geologi dan Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
	4. Inspektorat IV	Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Lingkup Ditjen Minyak dan Gas Bumi, Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral, BPH Migas
	5. Inspektorat V	Penyelenggaraan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri ESDM, pengawasan lainnya, dan kegiatan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan penyusunan laporan hasil pengawasan (Permen ESDM No. 30 Tahun 2014)
	6. Sekretariat Inspektorat Jendral	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Itjen Kementerian ESDM
<b>3.</b>	<b>Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM</b>	<b>Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM</b>
	1. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kelautan	Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan
	2. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan
	3. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batu Bara	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara
	4. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi
	5. Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral

No.	Unit Eselon I/Unit Eselon II	Program/Kegiatan
<b>4.</b>	<b>Badan Pendidikan dan Pelatihan ESDM</b>	<b>Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur ESDM</b>
	1. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pendidikan dan Pelatihan ESDM	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pendidikan dan Pelatihan ESDM
	2. Perguruan Tinggi Kedinasan Akamigas	Pendidikan Tinggi Energi dan Mineral
	3. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Geologi	Pendidikan dan Pelatihan Geologi
	4. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan	Pendidikan dan Pelatihan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan
	5. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi	Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi
	6. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah	Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah
	7. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Mineral dan Batubara	Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Mineral, Batubara dan Panas Bumi
<b>5.</b>	<b>Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi</b>	<b>Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi</b>
	1. Direktorat Pembinaan Program Migas	Penyiapan Kebijakan dan Peningkatan Kerja Sama Bilateral/Multilateral, Peningkatan Investasi Usaha Migas, dan Pemberdayaan Kapasitas Nasional
	2. Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
	3. Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
	4. Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi	Pembinaan Lindungan Lingkungan, Keselamatan Operasi dan Usaha Penunjang Migas
	5. Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Dukungan Manajemen dan Teknis Ditjen Migas
<b>6.</b>	<b>Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan</b>	<b>Program Pengelolaan Ketenagalistrikan</b>
	1. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan	Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengembangan

No.	Unit Eselon I/Unit Eselon II	Program/Kegiatan
		Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
	2. Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan	Penyusunan Kebijakan dan Program Serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan
	3. Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	Pembinaan Keselamatan dan Lindungan Lingkungan Ketenagalistrikan Serta Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
	4. Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Ketenagalistrikan
<b>7.</b>	<b>Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara</b>
	1. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral	Pembinaan dan Pengusahaan Mineral
	2. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara	Pembinaan dan Pengusahaan Batubara
	3. Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara	Penyusunan Kebijakan dan Program Serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Mineral dan Batubara
	4. Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara	Pembinaan Keteknikan Lindungan Lingkungan dan Usaha Penunjang Mineral dan Batubara
	5. Sekretariat Direktorat Jendral Mineral dan Batubara	Dukungan Manajemen dan Teknis Ditjen Mineral dan Batubara
<b>8.</b>	<b>Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi</b>	<b>Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi</b>
	1. Direktorat Bioenergi	Pembinaan, Pengawaasan dan Pengusahaan Bioenergi
	2. Direktorat Aneka Energi Baru Terbarukan	Pembinaan, Pengawaasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan
	3. Direktorat Konservasi Energi	Pembinaan, Pengawaasan dan Pelaksanaan Konservasi Energi
	4. Direktorat Panas Bumi	Pembinaan, Pengawaasan dan Pengusahaan Panas Bumi
	5. Sekretariat Direktorat Jendral Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	Dukungan Manajemen dan Teknis Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
<b>9.</b>	<b>Badan Geologi</b>	<b>Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi</b>
	1. Balai Penelitian dan	Riset dan Pengembangan Teknologi

No.	Unit Eselon I/Unit Eselon II	Program/Kegiatan
	Pengembangan Kegunungapian	Kebencanaan Geologi
	2. Museum Geologi	Dokumentasi Koleksi dan Pelayanan Museum Geologi
	3. Pusat Lingkungan Geologi	Penelitian dan Pelayanan Geologi Lingkungan dan Air Tanah
	4. Pusat Sumber Daya Geologi	Penyelidikan dan Pelayanan Sumber Daya Geologi
	5. Pusat Survei Geologi	Survei dan Pelayanan Geologi
	6. Pusat Vulkanologi dan Bencana Geologi	Mitigasi dan Pelayanan Kebencanaan Geologi
	7. Sekretariat Badan Geologi	Manajemen, Dukungan Teknis, dan Pelayanan Sekretariat Badan Geologi
<b>10.</b>	<b>BPH Migas</b>	<b>Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa</b>
	1. Direktorat BBM BPH Migas	Pengaturan, Penetapan dan Pelaksanaan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM
	2. Direktorat Gas Bumi BPH Migas	Pengaturan, Penetapan dan Pengawasan Pada Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
	3. Sekretariat BPH Migas	Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis BPH Migas
<b>11.</b>	<b>Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional</b>	<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dewan Energi Nasional</b>
	1. Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan	Fasilitasi Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Energi Nasional dan Penetapan Rencana Umum Energi Nasional, Serta Penyelenggaraan Persidangan
	2. Biro Fasilitasi Penanggulangan Krisis dan Pengawasan Energi	Fasilitasi Dalam Rangka Penetapan Langkah-Langkah Penanggulangan Krisis dan Darurat Energi, Serta Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Energi Lintas Sektor
	3. Biro Umum	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Bidang Personil, Pendanaan, Peralatan dan Dokumen (P3D)

- b. Pagu indikatif selama 5 tahun sesuai perkiraan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Renstra KESDM sebesar Rp 71,5 triliun. Pagu tersebut akan dimanfaatkan untuk

membiayai program dan kegiatan baik untuk kegiatan operasional pemerintahan maupun untuk pembangunan infrastruktur energi. Adapun perkiraan alokasi anggaran selama 5 (lima) tahun per unit kerja dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.4. Rencana Pendanaan KESDM Per Program Tahun 2015-2019 (Miliar Rp.)**

No.	Program	2015	2016	2017	2018	2019	Total
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KESDM	525,0	466,3	470,6	489,4	508,6	2.459,8
	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur KESDM	40,9	36,6	38,4	40,3	42,3	198,4
2.	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	4.249,57	2.088,29	2.823,76	2.509,03	3.498,29	15.168,95
3.	Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi	4.249,57	2.088,29	2.823,76	2.509,03	3.498,29	15.168,95
4.	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	4.481,3	5.321,8	5.191,6	5.280,3	5.583,8	25.858,7
5.	Program Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara	324,9	265,6	275,4	292,3	311,1	1.469,2
	Pengelolaan Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi	2.059,9	1.047,7	1.249,3	1.497,4	1.766,1	7.620,4
6.	Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi	1.074,4	1.123,2	1.154,2	1.205,4	1.253,4	5.810,6
7.	Penelitian dan Pengembangan ESDM	893,5	1.018,7	1.157,97	1.152,7	1.043,1	5.266,0
8.	Pendidikan dan Pelatihan ESDM	796,4	903,6	908,9	958,5	1.023,2	4.590,6
9.	Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	371,8	428,6	273,6	283,9	298,8	1.656,7
10.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dewan Energi Nasional	101,9	132,2	143,2	158,0	174,1	709,3
Total Baseline		10.023,5	12.977,9	13.837,4	14.029,3	15.677,8	66.545,8
APBN-P 2015		<b>5.003</b>					
<b>Total dengan APBN-P 2015</b>		<b>15.026,9</b>	<b>12.977,9</b>	<b>13.837,4</b>	<b>14.029,3</b>	<b>15.677,8</b>	<b>71.549,2</b>



- c. **Dalam aspek pengelolaan keuangan**, berikut gambaran kondisi saat ini :

Tugas utama Biro Keuangan sesuai Permen No. 18/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM adalah melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan. Oleh karena itu, Biro keuangan telah berupaya melaksanakan koordinasi dan memberikan pelayanan bidang keuangan secara optimal kepada seluruh unit terkait di lingkungan KESDM. Kinerja Biro Keuangan dimulai dari ranah pelaksanaan anggaran baik rencana penetapan besaran penerimaan sektor ESDM sampai terlaksananya belanja negara yang diukur dari penyerapan anggaran.

Dari sisi rencana penetapan besaran penerimaan sektor ESDM, Biro Keuangan memiliki tugas dan fungsi melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian ESDM. Tugas Biro Keuangan tersebut mencakup pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap target, realisasi PNBP, dan usulan penyaluran usulan DBH SDA di lingkungan KESDM, dan kepatuhan dalam administrasi pengelolaan PNBP dari para pengelola PNBP di lingkungan KESDM dan wajib bayar.

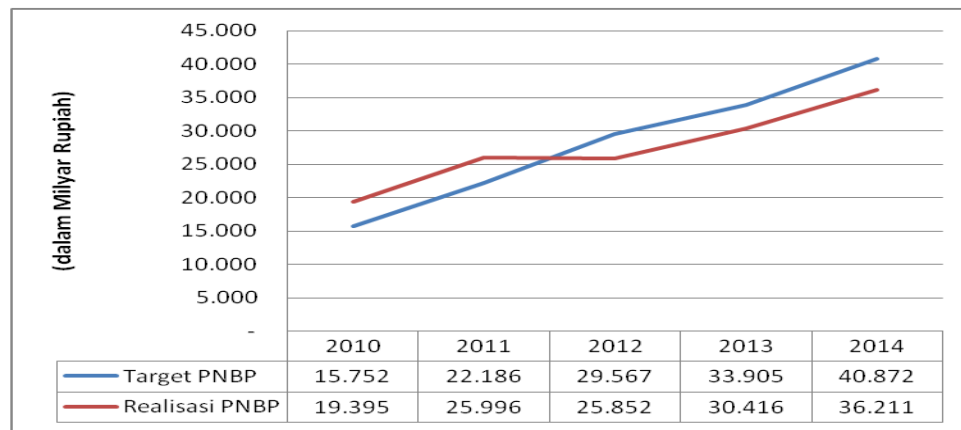
#### **Capaian 2010-2014**

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan PNBP di lingkungan Kementerian ESDM, Tahun 2010 s.d 2014, trend realisasi PNBP di lingkungan Kementerian ESDM mengalami peningkatan meskipun pada tahun 2012 realisasi PNBP mengalami penurunan dibandingkan realisasi PNBP pada tahun 2011. Faktor yang menyebabkan peningkatan realisasi PNBP antara lain karena membaiknya harga komoditas mineral dan batubara terutama yang terjadi di tahun 2010 dan 2011 serta meningkatnya volume penjualan BBM dan gas bumi sehingga memberikan kontribusi terhadap peningkatan PNBP SDA mineral dan batubara serta iuran badan usaha dari sub sektor hilir migas. Sedangkan di tahun 2012 sampai tahun 2014, penurunan capaian realisasi PNBP disebabkan adanya kebijakan larangan ekspor komoditi mineral bentuk mentah (*raw material*) disertai belum selesainya proses pembahasan RPP tentang Jenis dan Tarif PNBP pada KESDM dimana hal ini membuat capaian realisasi PNBP di tahun 2013 dan 2014 tidak tercapai.

**Tabel 1.5. Capaian PNBPN Sektor ESDM Tahun 2010 s/d 2014**

*(dalam Milyar Rupiah)*

	2010	2011	2012	2013	2014
Target PNBPN	15.752	22.186	29.567	33.905	40.872
Realisasi PNBPN	19.395	25.996	25.852	30.416	36.211
% Pencapaian	123,1%	117,2%	87,4%	89,7%	88,6%



**Gambar 1.2. Target & Realisasi PNBPN Sektor ESDM 2010 s/d 2014**

Selanjutnya dari sisi pelaksanaan anggaran belanja, Kementerian ESDM dari 2010 sampai akhir tahun 2015 mengalami beberapa kali perubahan pagu anggaran, baik penurunan maupun kenaikan pagu anggaran seperti pada tabel 1.8 di bawah, tentu hal tersebut juga berpengaruh terhadap capaian realisasi anggaran Sekretariat Jenderal selaku unit Eselon I periode 2010 – 2015, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1.6. Pagu & Realisasi Anggaran KESDM 2010-2015**

*Dalam Juta Rupiah*

Tahun / Jenis Belanja	2013			2014			2015		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
51 Belanja Pegawai	362,18	230,75	63,71%	613,74	266,94	43,49%	85,94	59,39	69,11%
52 Belanja Barang	606,50	386,51	63,73%	546,01	224,85	41,18%	419,36	303,61	72,40%
53 Belanja Modal	245,25	39,21	15,99%	153,27	22,45	14,65%	62,83	40,83	64,98%
<b>Grand Total</b>	<b>1.213,93</b>	<b>656,47</b>	<b>54,08%</b>	<b>1.313,02</b>	<b>514,24</b>	<b>39,16%</b>	<b>568,13</b>	<b>403,83</b>	<b>71,08%</b>

Tahun / Jenis Belanja	2010			2011			2012		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
51 Belanja Pegawai	269,23	240,13	89,19%	260,71	231,82	88,92%	262,92	240,01	91,29%
52 Belanja Barang	649,05	548,39	84,49%	649,85	417,45	64,24%	531,55	471,51	88,70%
53 Belanja Modal	39,3	34,14	86,87%	266,75	174,65	65,47%	52,08	42,83	82,24%
<b>Grand Total</b>	<b>957,577</b>	<b>822,66</b>	<b>85,91%</b>	<b>1177,31</b>	<b>823,92</b>	<b>69,98%</b>	<b>846,55</b>	<b>754,35</b>	<b>89,11%</b>

Pembinaan Biro Keuangan berlanjut pada pola pelaporan keuangan level Kementerian untuk disajikan dan ditinjau oleh BPK-RI, adalah opini yang akan dinilai atas laporan keuangan Kementerian ESDM tahun 2011 dan tahun 2013. BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan opini tersebut, BPK RI menilai laporan keuangan Kementerian ESDM tahun 2011, 2012 dan tahun 2013 telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pada tahun 2014, Kementerian ESDM mengalami penurunan dalam pencapaian opini dari BPK-RI mengingat pada tahun tersebut terdapat beberapa kegiatan maladministrasi baik dari sisi pelaksanaan maupun dari sisi pencatatan dan pelaporan sehingga opini yang dicapai hanya mendapatkan WDP.

Opini WTP yang diraih Kementerian ESDM merupakan prestasi tertinggi dan harus dipertahankan bahkan ditingkatkan kualitasnya. "Opini WTP" bukanlah tujuan akhir atas pencapaian prestasi Kementerian ESDM, tetapi prestasi selanjutnya adalah peningkatan mutu dan kepercayaan para *stakeholder* dalam pemenuhan harapannya. Keberhasilan tersebut diharapkan dapat memicu seluruh pegawai di Kementerian ESDM untuk dapat memberikan yang terbaik, tidak hanya pada unit kerja tetapi bagi Kementerian secara utuh. Di dalam penyusunan laporan keuangan, Kementerian ESDM telah bekerja sama dengan instansi-instansi yang bertanggung jawab atas terwujudnya akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas, antara lain: BPKP, BPN, Kementerian Keuangan serta mengoptimalkan peran Inspektorat Jenderal KESDM selaku *quality assurance*.

**Tabel 1.7. Capaian Opini atas Laporan Keuangan**

Tahun	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Opini BPK atas LK</b>	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WDP	Dalam proses penetapan

## C. PERALATAN

### 1. Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara (PPBMN)

Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah diantaranya berasal dari : barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Secara teknis, dalam proses pengelolaan BMN di Kementerian ESDM, PPBMN memiliki peran dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengguna barang baik BMN yang diperoleh atas beban APBN dalam melaksanakan tugas pokok fungsi Kementerian ESDM maupun bidang ESDM yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak seperti Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) Migas dan Perjanjian Karya Pengusaha Batubara (PKP2B) maupun Panas Bumi.

Dalam penatausahaan BMN dan pelaksanaan pelaporan BMN yang dilakukan secara berjenjang, PPBMN melaksanakan tugas menghimpun laporan BMN dari seluruh Kuasa Pengguna Barang (KPB) yang berasal dari Satuan Kerja (satker) di Kementerian ESDM.

Pada tahun anggaran 2015, nilai BMN Kementerian ESDM yang dikelola berjumlah Rp18.014.204.846.794,- (*unaudited*) yang berasal dari seluruh satker dan unit utama di lingkungan Kementerian ESDM. Nilai tersebut berasal dari aset lancar diantaranya persediaan (termasuk didalamnya adalah barang persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat) dan aset tetap diantaranya adalah tanah, peralatan dan mesin sebagaimana Tabel 1.10. Selain itu, pada neraca BMN Kementerian ESDM juga terdapat aset Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) sejumlah Rp51.498.215,006.049,- dimana aset-aset dimaksud dioperasikan oleh PT. PLN (Persero), yang nantinya akan ditetapkan sebagai penyertaan modal negara pada PT. PLN (Persero).

**Tabel 1.8. Posisi Neraca BMN Kementerian ESDM (*Unaudited*)**

No	Akun Neraca/Kelompok Barang	Nilai (Rp)
1.	Persediaan	2.364.949.089.283
2.	Tanah	3.734.565.613.795
3.	Peralatan dan Mesin	4.687.910.669.656
4.	Gedung dan Bangunan	2.003.565.153.791
5.	Jalan dan Jembatan	60.915.438.671

No	Akun Neraca/Kelompok Barang	Nilai (Rp)
6.	Irigasi	82.545.313.538
7.	Jaringan	2.916.182.276.234
8.	Aset Tetap dalam Renovasi	32.074.040.103
9.	Aset Tetap Lainnya	389.632.855.388
10.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	4.279.118.932.776
11.	<i>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap</i>	(3.649.206.497.320)
12.	Aset Tak Berwujud	194.598.418.916
13.	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	1.581.339.264.198
14.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	(663.985.721.335)
<b>Total</b>		<b>18.014.204.846.794</b>

Sumber : LBMN Kementerian ESDM Semester II TA. 2015

PPBMN juga melakukan penatausahaan BMN yang berasal dari KKKS Migas sebesar Rp.266.888.264.770.848,-. Jumlah tersebut berasal dari Aset Tanah dan Non Tanah sebagaimana tersaji dalam Tabel 1.11, dan BMN yang berasal dari PKP2B generasi I dengan nilai pada Tahun 2015 sebesar Rp.23.158.108.796.973,70 (*unaudited*) seperti tersaji dalam Tabel 1.12.

**Tabel 1.9. Neraca LKBUN KKKS Tahun 2015 (*Unaudited*) dan 2014 (*Audited*)**

No.	Jenis Aset	Periode 31 Desember 2015 ( <i>Unaudited</i> )	Periode 31 Desember 2014 ( <i>Audited</i> )
		-Rp-	
1	Aset Tanah	17.638.133.907.169	15.273.400.409.353
2	Aset Non Tanah	353.101.945.012.748	270.815.693.075.494
	- Harta Benda Modal (HBM)	325.431.153.134.654	245.309.669.485.962
	- Harta Benda Inventaris (HBI)	34.280.485.664	30.053.848.399
	- Material Persediaan	27.636.511.392.430	25.475.969.741.133
	Jumlah (1+2)	370.740.078.919.917	286.089.093.484.847
	<i>Akumulasi Penyusutan</i>	(103.851.814.149.068)	(80.699.329.575.389)
	<b>Jumlah</b>	<b>266.888.264.770.848</b>	<b>205.389.763.909.458</b>

Sumber : LKBUN KKKS Tahun 2015

**Tabel 1.10. Neraca Aset PKP2B Tahun 2015 (*Unaudited*) dan 2014 (*Audited*)**

<b>Uraian</b>	<b>Periode 31 Desember 2015 (<i>Unaudited</i>)</b>	<b>Periode 31 Desember 2014 (<i>Audited</i>)</b>
ASET		
Aset Lainnya		
Aset PKP2B	37.897.336.371.604,00	30.733.062.020.898,00
Akumulasi Penyusutan Aset	(14.739.227.934.630,30)	(5.340.798.949.420,00)
Jumlah Aset	23.158.108.796.973,70	25.392.263.071.478,00
EKUITAS		
Ekuitas Dana Investasi		
Diinventasikan pada aset lainnya	23.158.108.796.973,70	25.392.263.071.478,00
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>23.158.108.796.973,70</b>	<b>25.392.263.071.478,00</b>

Sumber : Laporan BMN PKP2B Tahun 2015

**Capaian 2012-2014**

Beberapa capaian kinerja di lingkungan PPBMN selama kurun waktu tahun 2012-2014, diantaranya adalah :

a. Persentase Realisasi Anggaran

Pada tahun anggaran 2012 realisasi anggaran Pusat Pengelolaan BMN sebesar 89,55% sedangkan pada tahun anggaran 2013 realisasi tercatat sebesar 76,21% dan tahun anggaran 2014 realisasi sebesar 17,16% (hal ini dikarenakan adanya penghematan dan efisiensi perjalanan dinas dalam rangka meeting/penyelenggaraan kegiatan di hotel sehingga kegiatan yang terkait tidak terealisasi).

b. Jumlah Dokumen Laporan BMN

Dokumen laporan BMN Kementerian ESDM telah diselesaikan sebanyak 100%. Dokumen laporan tersebut terdiri dari Laporan Barang Milik Negara Semester I, Semester II, Laporan Tahunan dan Laporan *Audited* Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014 masing-masing 6 laporan per tahun yang terdiri dari Laporan BMN Kementerian dan Laporan Keuangan Transaksi Khusus. Laporan BMN tersebut merupakan salah satu bagian Laporan Keuangan Kementerian ESDM yang menentukan opini. Selain dokumen laporan BMN yang berasal dari APBN, juga telah disusun Laporan Keuangan yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) dan Perjanjian Karya Pengusaha Batubara (PKP2B) atau yang disebut Laporan Keuangan Transaksi Khusus.

c. Capaian Kinerja PSP dari tahun 2012-2014

Pada tahun 2012, PPBMN dapat menyelesaikan penetapan status penggunaan BMN senilai Rp.359.876.120.212,- yang tertuang dalam 11 Surat Keputusan. Sedangkan di Tahun 2013, total nilai BMN yang ditetapkan status penggunaannya sebesar Rp.1.010.446.317.097,- dengan jumlah surat keputusan sebanyak 15. Selanjutnya, pada tahun 2014, BMN senilai Rp. 1.936.508.155.632,- selesai ditetapkan status penggunaannya berdasarkan 22 surat keputusan. Sehingga capaian penetapan status penggunaan BMN dari Tahun 2012 s.d 2014 sebesar Rp. 3.306.830.592.941,- yang tertuang dalam 48 Surat Keputusan. Belum selesainya beberapa usulan penetapan status penggunaan BMN pada tahun-tahun tersebut disebabkan antara lain karena proses penetapan status penggunaan melibatkan beberapa pihak seperti satuan kerja di lingkungan Kementerian ESDM, Direktorat PKNSI, Kanwil DJKN dan KPKNL Kementerian Keuangan.

d. Persentase usulan penghapusan BMN yang diproses sampai terbitnya SK Menteri ESDM

Pada tahun 2012, Pusat Pengelolaan BMN menerima surat usulan penghapusan BMN yang berasal dari KKKS sebanyak 47 usulan. Dari usulan tersebut, sebanyak 32 usulan telah diproses sampai dengan diterbitkannya SK Menteri ESDM tentang penghapusan BMN, sehingga persentase penyelesaian SK Penghapusan BMN sebesar 68%. Persentase sebanyak 68% adalah lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 90%, hal ini dapat terjadi karena rantai birokrasi proses penghapusan BMN yang panjang dan melibatkan beberapa pihak, antara lain BPMigas, Biro Hukum KESDM dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Direktorat PNKNL, Direktorat Penilaian, dan KPKNL), sehingga SK penghapusan BMN tidak dapat diterbitkan pada tahun yang bersangkutan.

Sedangkan pada tahun 2013, Pusat Pengelolaan BMN menerima surat usulan penghapusan BMN yang berasal dari KKKS sebanyak 51 usulan dan untuk PKP2B sebanyak 23 usulan, semua usulan tersebut telah ditindaklanjuti dengan penerbitan SK Menteri ESDM, sedangkan untuk unit dan satuan kerja sebanyak 110 usulan, sebanyak 22 usulan yang telah ditindaklanjuti dengan penerbitan SK Menteri ESDM tentang penghapusan BMN. Persentase realisasi yang dicapai sebanyak 73,3% atau lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 95%, hal ini terjadi karena proses penghapusan pada satker di lingkungan ESDM hanya dapat dilakukan sebanyak 20%. Sebagian besar usulan penghapusan BMN pada unit dan satker adalah usulan penghapusan sumur bor dalam. Rendahnya capaian SK Penghapusan BMN yang diterbitkan

disebabkan beberapa kendala antara lain, hambatan dalam kelengkapan dokumen berupa surat permohonan hibah dan kesediaan menerima hibah dari pemerintah daerah, serta pemeriksaan administrasi dan fisik BMN, sehingga menyebabkan persetujuan hibah tidak dapat diperoleh pada tahun bersangkutan dan sebagai konsekuensinya, penerbitan SK penghapusan BMN tidak dapat dilaksanakan pada tahun berjalan.

Selanjutnya pada tahun 2014, realisasi penyelesaian SK Penghapusan BMN sebesar 9,53% dari target yang ditetapkan, yaitu sebesar 95%. Hal tersebut terjadi karena pada tahun 2014 diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D sebagai pengganti PP Nomor 6 Tahun 2006 dan perubahannya PP Nomor 38 Tahun 2008, sehingga menyebabkan perubahan pada alur proses penghapusan BMN. Dalam proses penghapusan BMN setelah terbitnya PP Nomor 27 tahun 2014, maka penyusunan SK Penghapusan BMN menjadi proses yang paling akhir setelah dilaksanakannya pemindahtanganan dan/atau pemusnahan BMN, yang dituangkan dalam risalah lelang/berita acara serah terima/berita acara pemusnahan BMN. Sedangkan berdasarkan PP Nomor 6 tahun 2006, SK Penghapusan BMN dapat diterbitkan setelah adanya persetujuan Menteri Keuangan tentang pemindahtanganan dan/atau pemusnahan BMN. Diluar dari capaian tersebut, beberapa tahapan yang telah dilakukan diantaranya 10,47% telah menjadi Draft SK, 32,88% diantaranya proses menunggu persetujuan Menteri Keuangan dan 47,62% menunggu kelengkapan/revisi data.

- e. Penetapan jumlah perusahaan yang menjadi obyek vital nasional

Lokasi Obvitnas yang telah ditetapkan pada tahun 2012 sampai dengan 2014 adalah 326 lokasi.

- f. Jumlah dokumen Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang (DKPB)

Pada Tahun 2014, dari sejumlah 27 Satuan Kerja di lingkungan Kementerian ESDM, hanya terdapat 10 Satuan Kerja yang telah menyampaikan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang (DKPB).

- g. Persentase bidang tanah yang berhasil dilakukan sertifikasi a.n Pemerintah RI cq. Kementerian ESDM

Pusat Pengelolaan BMN telah melakukan inventarisasi tanah kepada seluruh unit utama dan satker di lingkungan ESDM yang sudah memiliki sertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian ESDM. Dari jumlah 307 bidang



tanah yang ada, 264 bidang tanah sudah bersertifikat dan 43 belum bersertifikat.

- h. Persentase kasus tanah dan bangunan bermasalah yang berhasil diselesaikan

Pada tahun 2013 Pusat Pengelolaan BMN berhasil menyelesaikan dua kasus tanah dan bangunan, yaitu kasus tanah di Lamongan (Tanah verponding No. 1606 KIB No.74 di Desa Plaosan Kec. Babat, Kab. Lamongan) dan kasus tanah di Pusdiklat Migas Cepu (Lahan Pusdiklat Migas Cepu HP 58).

- i. Persentase data BMN berupa bangunan

Pada Tahun 2014, data Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Lingkungan Kementerian ESDM terdapat sebanyak 138 dokumen IMB yang telah dilaporkan, dan yang telah dihimpun di PPBMN sebanyak 97 dokumen IMB dari 15 Unit Utama dan Satuan Kerja. Sisanya masih dalam proses penyelesaian IMB.

## **2. Biro Umum**

Keberadaan sarana dan prasarana kerja merupakan hal yang vital dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan pemerintah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, antara lain; ruangan kantor, perlengkapan kerja, dan kendaraan dinas. Sedangkan prasarana kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, seperti gedung kantor, rumah jabatan dan rumah instansi.

Biro Umum sebagai penanggung jawab bidang perlengkapan dan kerumahtanggaan yang berkaitan erat dengan sarana prasarana dan kerja, menjalankan fungsi dari proses pengadaan sampai dengan pemeliharaan sarana fisik. Berikut adalah kondisi sarana dan prasarana Sekretariat Jenderal.

### **a. Tanah Bangunan**

Sekretariat Jenderal KESDM memiliki tanah seluas 68.547m<sup>2</sup> yang terdiri :

- 8 unit Rumah Negara Golongan I dengan total luas tanah 3.454m<sup>2</sup>, bangunan 1.744 m<sup>2</sup>.
- 5 unit Rumah Negara Golongan II dengan total luas tanah 4.053m<sup>2</sup>, bangunan 1.646 m<sup>2</sup>.
- 11 unit Tanah Bangunan Mess/Wisma dengan total luas tanah 10.163m<sup>2</sup>, bangunan 2.342,32 m<sup>2</sup>.

- 4 unit Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dengan total luas 51.542 m<sup>2</sup>, dimanfaatkan untuk Kantor Pusat KESDM, Setjen KESDM, Ditjen Minerba, serta Gedung Pusat Arsip KESDM.
- 5 unit Bangunan Gedung Kantor Permanen.
- 3 unit Bangunan Gudang Tertutup Permanen.
- 1 unit Bangunan Gedung Instalansi Lainnya.
- 2 unit Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen.
- 3 unit Bangunan Gedung Pertemuan Permanen.
- 4 unit Gedung Pos Jaga Permanen.
- 2 unit Gedung Garasi/Pool Permanen.
- 1 unit Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen.
- 3 unit Bangunan Gedung Musium Lainnya.
- 8 Unit Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen.
- 5 Unit Negara Golongan II Tipe A Permanen.
- 11 Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen.
- 3 Pagar Permanen.

**b. Jaringan Instalasi & Irigasi**

Jaringan instalasi yang tersedia adalah:

- Instalasi air tanah dalam kapasitas kecil;
- Instalasi air bersih/air baku lainnya;
- Instalasi PLTS Kapasitas sedang;
- Instalasi pusat pengatur listrik kapasitas besar;
- Instalasi komunikasi elektronik (KOMLEK);
- Instalasi building automation system (BAS);
- Jaringan air minum lainnya;
- Jaringan transmisi tegangan diatas 300KV A;
- Jaringan transmisi lainnya;
- Jaringan distribusi Tegangan Dibawah 1 KV A;
- Jaringan Distribusi lainnya;
- Jaringan listrik lainnya;
- Jaringan telepon Di atas tanah kapasitas kecil;
- Jaringan telepon lainnya;
- Sumur dengan pompa;
- Sumur artesis;
- Bangunan menara/bak penampung/reservoir air minum.

**c. Peralatan dan Mesin**

Sarana kerja yang telah tersedia antara lain meja kerja, kursi kerja, PC Unit, Notebook, printer, mesin ketik, mesin hitung, lemari file tersedia pula peralatan penunjang kantor (meja kursi rapat, camera, OHP, LCD *projector*, layar, *handycam*, *scanner* dan peralatan penunjang lainnya), peralatan keamanan (CCTV, tabung pemadam kebakaran), *server*, genset, peralatan audio-studio (TV, Video *cassette*, *wireless*, *sound system*, *amplifier*, *megaphone* , pendingin ruangan (AC, *exhaus fan*,

kipas angin, dan *air cleaner*), peralatan komunikasi (telepon, mesin fax, *teleconference*, radio SSB, dan PABX), peralatan listrik (UPS dan Genset), peralatan rumah tangga lainnya, peralatan poliklinik umum dan poliklinik gigi.

**d. Kendaraan Dinas**

Kendaraan dinas yang tersedia pada Sekretariat Jenderal adalah sebagai berikut:

- Kendaraan dinas roda dua sejumlah 72 unit;
- Kendaraan roda empat sejumlah 157 unit (49 unit sedan, 20 unit jeep, 9 unit Micro Bus (Penumpang 15 s/d 29 orang), 73 unit Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah) dan 2 unit *Pick Up*, mikrobus 11 unit, 1 unit *ambulance*).

Hampir 20 persen kendaraan dinas roda-4 yang tersedia selain dimanfaatkan oleh Setjen KESDM juga dipinjampakaikan kepada unit utama di lingkungan KESDM maupun sektor KESDM yang menunjang tugas dan fungsi Kementerian ESDM.

**Capaian Kinerja Biro Umum 2011-2014**

Sebagai bagian integral dari organisasi Sekretariat Jenderal, Biro Umum memiliki peranan penting dalam mendukung visi dan misi serta mewujudkan tujuan Sekretariat Jenderal. yang salah satunya

Mewujudkan tertib administrasi kerumah tanggaan, keprotokolan pimpinan KESDM dan Sekjen serta tertib administrasi perlengkapan, persuratan dinas dan kearsipan KESDM.

- a. Capaian Kinerja terkait sasaran **Terwujudnya kelancaran pelaksanaan persuratan dinas dan penyelamatan arsip KESDM yang bernilai guna vital dan permanen**

**• Tahun 2011**

No.	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah arsip vital dan permanen KESDM yang berhasil diselamatkan	Berkas	6.250	7.846	125,36%
2.	Jumlah NSPK bidang persuratan dinas dan kearsipan yang berhasil disusun	NSPK	3	3	100%

• **Tahun 2012**

No.	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah arsip vital dan permanen KESDM yang berhasil diselamatkan	Berkas	7.563	7.890	104,32 %
2.	Jumlah rancangan NSPK bidang persuratan dinas dan kearsipan yang berhasil disusun	Rancangan NSPK	2	2	100%

• **Tahun 2013**

No.	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah arsip vital dan permanen KESDM yang berhasil diselamatkan	Berkas	8.319	19.016	228%
2.	Jumlah rancangan NSPK bidang persuratan dinas dan kearsipan yang berhasil disusun	Rancangan NSPK	1	4	400%
3.	Indeks kepuasan stakeholders terhadap layanan korespondensi Setjen KESDM	Indeks Kepuasan	72.5	75,2	103,72%

• **Tahun 2014**

No.	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah arsip vital dan permanen KESDM yang berhasil diselamatkan	Berkas	9115	11.040	120.66 %
2.	Jumlah rancangan NSPK bidang persuratan dinas dan kearsipan yang berhasil disusun	Rancangan NSPK	1	0	0%
3.	Indeks kepuasan stakeholders terhadap layanan korespondensi Setjen KESDM	Indeks Kepuasan	73	73,1	100,1%

**b. Capaian Kinerja terkait sasaran Terciptanya kelancaran administrasi dan pelayanan perlengkapan**

• **Tahun 2011**

No.	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase BMKN Setjen KESDM yang berhasil dicatat dalam BIB	%	85	90	105.88%
2.	Pengadaan Barang/Jasa (>100jt) dengan e-procurement	%	80	73.68	92.10%

• **Tahun 2012**

No.	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase BMKN Setjen KESDM yang berhasil dicatat dalam BIB	%	90	100	111%
2.	Pengadaan Barang/Jasa (>200jt) dengan e-procurement	%	85	100	117%
3.	Jumlah pembayaran gaji, lembur, honorarium dan vakasi	%	100	100	100%

• **Tahun 2013**

No.	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase BMKN Setjen KESDM yang berhasil dicatat dalam BIB	%	95	100	105%
2.	Pengadaan Barang/Jasa (>200jt) dengan e-procurement	%	80	80	100%
3.	Jumlah rancangan NSPK bidang perlengkapan	Rancangan NSPK	2	2	100%

• **Tahun 2014**

No.	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase BMKN Setjen KESDM yang berhasil dicatat dalam BIB	%	99	100	101
2.	Pengadaan Barang/Jasa (>200jt) dengan e-procurement	%	86	50	58%

No.	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
3.	Jumlah rancangan NSPK bidang perlengkapan	Rancangan NSPK	3	2	67%

**c. Capaian Kinerja terkait sasaran Terciptanya kelancaran administrasi dan pelayanan kerumahtanggaan**

• **Tahun 2011**

No.	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat Penghematan Energi dan air Gedung perkantoran di lingkungan KESDM	%	11	-2,57	-23,36%

• **Tahun 2012**

No.	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat penghematan energi gedung perkantoran di lingkungan Setjen KESDM (% Penghematan Konsumsi kWh/Orang)	%	2	-33.781	-16.89%
2.	Tingkat penghematan air gedung perkantoran di lingkungan Setjen KESDM (% Penghematan Konsumsi Air/Orang)	%	2	14.35	717.5%
3.	Tingkat Kepuasan Pegawai Setjen KESDM terhadap Pelayanan Kerumahtanggaan	Indeks Kepuasan	70	74.71	106.73%

• **Tahun 2013**

No.	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat Penghematan Energi Gedung perkantoran di lingkungan KESDM (% Penghematan Konsumsi kWh/Orang)	%	2	0,094	4.7%
2.	Tingkat Penghematan air Gedung perkantoran di lingkungan KESDM (% Penghematan Konsumsi kWh/Orang)	%	2	3,52	176%
3.	Indeks Kepuasan Pegawai Setjen KESDM terhadap Pelayanan Kerumahtanggaan	Indeks Kepuasan	72.5	72,84	100,4%

• **Tahun 2014**

No.	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat penghematan energi gedung perkantoran di lingkungan Setjen KESDM (% Penghematan Konsumsi kWh/Orang)	%	2	1,09	54,5%
2.	Tingkat penghematan air gedung perkantoran di lingkungan Setjen KESDM (% Penghematan Konsumsi Air/Orang)	%	2	4,33	216%
3.	Tingkat Kepuasan Pegawai Setjen KESDM terhadap Pelayanan Kerumahtangaan	Indeks	75	73,59	98%

**d. Capaian kinerja terkait sasaran Terlaksananya administrasi penjadwalan pimpinan dan pelayanan keprotokolan**

• **Tahun 2011**

No.	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase kegiatan pimpinan yang sesuai SOP keprotokolan	%	82.5	85	103,3%
2.	Persentase rapat yang terselenggara sesuai jadwal	%	80	79	98,7%

• **Tahun 2012**

No.	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase kegiatan pimpinan yang sesuai SOP keprotokolan	%	85	85,65	100,8%
2.	Persentase rapat yang terselenggara sesuai jadwal	%	85	83,73	98,5%

• **Tahun 2013**

No.	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase kegiatan pimpinan yang sesuai SOP keprotokolan	%	82.5	85	103,3%
2.	Persentase rapat yang terselenggara sesuai jadwal	%	80	79	98,7%

• **Tahun 2014**

No.	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase kegiatan pimpinan yang sesuai SOP keprotokolan	%	100	90	90%
2.	Persentase rapat yang terselenggara sesuai jadwal	%	100	90	90%

e. Capaian Kinerja terkait sasaran **Tersedia dan terpeliharanya sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai dengan kebutuhan**

• **Tahun 2011**

No.	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase sarana dan prasarana kerja yang sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja	%	83	85	102,4

• **Tahun 2012**

No.	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase sarana dan prasarana kerja yang sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja	%	87	92	105

• **Tahun 2013**

No.	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase sarana dan prasarana kerja yang sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja	%	91	94	104%

• **Tahun 2014**

No.	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capain
1.	Persentase sarana dan prasarana kerja yang sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja	%	95	50	53%



## D. DOKUMEN

Sekretariat Jenderal merupakan unit yang bertugas melakukan pengelolaan dokumen sekaligus melaksanakan koordinasi dan pembinaan terhadap unit kerja di lingkungan KESDM. Beberapa dokumen penting yang dikelola oleh Sekretariat Jenderal, antara lain:

- a. Rencana Kerja baik rencana kerja jangka panjang, menengah, tahunan

Sekretariat Jenderal melaksanakan fungsi pembinaan, koordinasi, integrasi serta sinkronisasi rencana kerja. Saat ini telah tersedia dokumen perencanaan jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2006 – 2025), dokumen perencanaan jangka menengah (Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2015 – 2019) dan dokumen perencanaan tahunan (Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral). Perencanaan tersebut disusun dengan melakukan langkah-langkah koordinasi dengan unit di lingkungan KESDM, melakukan integrasi perencanaan antar unit sehingga terdapat perencanaan yang saling mendukung di lingkungan internal KESDM, serta melaksanakan sinkronisasi dengan perencanaan nasional dan perencanaan pemerintah daerah.

Berikut adalah capaian kinerja Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian ESDM pada tahun 2011-2014 seperti pada Tabel 1.13 berikut:

**Tabel 1.11. Capaian Kinerja Biro Perencanaan dan Kerja Sama 2011-2014**

### • Tahun 2011

No	Sasaran		Presentasi Pencapaian	Anggaran (Rp.)
	Uraian	Indikator		
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan	100%	7.841.916.340
	Strategis	Jumlah dokumen pendukung perencanaan umum	100%	
2	Tersedianya Dokumen Bahan Sidang dan Rapat koordinasi Pimpinan	Jumlah dokumen bahan rapat pimpinan KESDM	100%	
3	Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi yang akuntabel	Jumlah dokumen LAKIP	100%	14.003.044.450
		Persentase Pencapaian kinerja KESDM sesuai target	94,8%	

No	Sasaran		Presentasi Pencapaian	Anggaran (Rp.)
	Uraian	Indikator		
		Jumlah dokumen evaluasi program dan kegiatan	100%	
4	Tersedianya dokumen rencana anggaran yang berbasis kinerja	Jumlah dokumen perencanaan program dan penganggaran	100%	23.805.201.359
		Jumlah dokumen koordinasi perencanaan program dan anggaran	100%	
		Persentase anggaran KESDM yang menunjang prioritas nasional sebesar 52%	100%	
5	Tersedianya dokumen standar biaya keluaran dan KPJM yang akuntabel	Jumlah dokumen standar biaya keluaran dan KPJM yang akuntabel Jumlah dokumen	100%	
6	Tersedianya inventarisasi dan potensi kerja sama untuk mendukung tujuan sektor ESDM	Jumlah dokumen pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral dan dalam negeri	100%	6.828.251.596
7	Tersedianya monitoring dan evaluasi terhadap implementasi hasil-hasil kerja sama.	Jumlah dokumen kesepakatan kerja sama yang dilaksanakan untuk mendukung prioritas rencana strategis	100%	

• Tahun 2012

No	Sasaran		Presentasi Pencapaian	Anggaran (Rp.)	
	Uraian	Indikator			
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen perencanaan	100%	43.803.181.694	
		Jumlah dokumen pendukung perencanaan umum	100%		
2	Tersedianya Dokumen Bahan Sidang dan Rapat koordinasi Pimpinan	Jumlah dokumen bahan rapat pimpinan KESDM	100%		
3	Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi yang akuntabel	Jumlah dokumen LAKIP	100%		10.879.176.418
		Persentase Pencapaian kinerja KESDM sesuai target	94,8%		
		Jumlah dokumen evaluasi program dan kegiatan	100%		
4	Tersedianya dokumen rencana anggaran yang berbasis kinerja	Jumlah dokumen perencanaan program dan penganggaran	100%	9.298.337.250	
		Jumlah dokumen koordinasi perencanaan program dan anggaran	100%		
		Persentase anggaran KESDM yang menunjang prioritas nasional sebesar 65%	100%		
5	Tersedianya inventarisasi dan potensi kerja sama untuk mendukung tujuan sektor ESDM	Jumlah dokumen pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral dan dalam negeri	100%	15.148.260.400	
6	Tersedianya monitoring dan evaluasi terhadap implementasi	Jumlah dokumen kesepakatan kerja sama yang dilaksanakan untuk mendukung prioritas	100%		

No	Sasaran		Presentasi Pencapaian	Anggaran (Rp.)
	Uraian	Indikator		
	hasil-hasil kerja sama.	rencana strategis		

• Tahun 2013

No	Sasaran		Presentasi Pencapaian	Anggaran (Rp.)
	Uraian	Indikator		
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen perencanaan	100%	8.318.274.190
		Jumlah dokumen pendukung perencanaan umum	100%	
2	Tersedianya Dokumen Bahan Sidang dan Rapat koordinasi Pimpinan	Jumlah dokumen bahan rapat pimpinan KESDM	100%	
3	Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi yang akuntabel	Jumlah dokumen LAKIP	100%	
		Persentase Pencapaian kinerja KESDM sesuai target	97,81%	
		Jumlah dokumen evaluasi program dan kegiatan	100%	
4	Tersedianya dokumen rencana anggaran yang berbasis kinerja	Jumlah dokumen perencanaan program dan penganggaran	100%	25.843.864.290
		Jumlah dokumen koordinasi perencanaan program dan anggaran	100%	
		Persentase anggaran KESDM yang menunjang prioritas nasional sebesar 65%	100%	
5	Tersedianya inventarisasi dan potensi kerja sama untuk mendukung tujuan sektor	Jumlah dokumen pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral dan dalam negeri	100%	10.616.401.795

No	Sasaran		Presentasi Pencapaian	Anggaran (Rp.)
	Uraian	Indikator		
	ESDM			
6	Tersedianya monitoring dan evaluasi terhadap implementasi hasil-hasil kerja sama.	Jumlah dokumen kesepakatan kerja sama yang dilaksanakan untuk mendukung prioritas rencana strategis	100%	

• Tahun 2014

No	Sasaran		Presentasi Pencapaian
	Uraian	Indikator	
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan Strategis yang berkualitas	Jumlah dokumen perencanaan strategis	100%
2	Tersedianya Bahan untuk Pimpinan dan Penugasan Khusus Lainnya yang tepat waktu dan berkualitas	Jumlah dokumen bahan rapat pimpinan KESDM	100%
		Jumlah dokumen penugasan khusus	100%
		Jumlah dokumen kebijakan umum	100%
		Jumlah sistem monitoring indikator kegiatan strategis	0%
3	Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi yang akuntabel	Hasil (nilai) evaluasi LAKIP KESDM tahun 2013	100%
		Jumlah dokumen Laporan Tahunan	100%
		Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi program dan kegiatan	100%
		Hasil (nilai) evaluasi LAKIP KESDM tahun 2013	100%
4	Tersedianya dokumen rencana anggaran yang berbasis kinerja	Persentase dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Jumlah dokumen perencanaan program dan penganggaran	100%
		Jumlah dokumen pendukung perencanaan program dan anggaran	100%
		Persentase anggaran KESDM yang menunjang prioritas nasional	101,5%

No	Sasaran		Presentasi Pencapaian
	Uraian	Indikator	
5	Tersedianya inventarisasi dan potensi kerja sama untuk mendukung tujuan sektor ESDM	Jumlah dokumen pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral dan dalam negeri	50%
6	Tersedianya monitoring dan evaluasi terhadap implementasi hasil-hasil kerja sama.	Persentase perjanjian kerja sama yang diimplementasikan	260%
		Jumlah dokumen kesepakatan kerja sama yang dilaksanakan untuk mendukung prioritas rencana strategis	260%

**b. Hukum (Regulasi, Peraturan Perundangan dan Pelayanan Bidang Hukum)**

Secara umum pengukuran capaian kinerja Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) tahun 2010-2014 dapat terlihat dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Namun demikian untuk beberapa indikator kinerja sasaran dan kegiatan juga dilakukan perbandingan dengan realisasi capaian kinerja dengan standar yang lazim.

Pada dasarnya proses monitoring, pengukuran dan evaluasi kinerja dilakukan langsung oleh masing-masing bagian yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan. Selanjutnya informasi kinerja dari bagian-bagian tersebut disampaikan kepada Kepala Biro Hukum untuk dievaluasi lebih lanjut untuk kemudian diberikan rekomendasi perbaikan bagi setiap informasi kinerja tersebut. Melalui proses ini diharapkan adanya upaya-upaya perbaikan kinerja sehingga capaian kinerja dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan.

Beberapa capaian kinerja Biro Hukum selama pada waktu antara Tahun 2010-2014 antara lain sebagai berikut:

- 1) Biro Hukum telah melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan dari Undang-Undang sampai dengan Keputusan Menteri yang bersifat strategis selama periode Tahun 2010-2014, sebagai berikut:

**Tabel 1.12. Daftar Peraturan Perundang-Undangan yang telah disusun pada tahun 2010-2014**

<b>Bentuk Peraturan Per-UU-an</b>	<b>Tahun 2010</b>	<b>Tahun 2011</b>	<b>Tahun 2012</b>	<b>Tahun 2013</b>	<b>Tahun 2014</b>
Undang-Undang	-	-	-	-	1
Peraturan Pemerintah	6	-	6	-	4
Peraturan/Keputusan Presiden	3	4	4	5	7
Peraturan Menteri	19	20	31	38	40
Keputusan Menteri yang bersifat strategis	17	8	14	18	55

- 2) Biro Hukum telah melakukan penyusunan program legislasi dan regulasi sektor ESDM untuk jangka menengah Tahun 2010-2014 dan prioritas dalam tahun berjalan. Kerangka legislasi dan regulasi sektor ESDM tersebut menggambarkan perkembangan perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan sektor ESDM dalam jangka menengah dari Tahun 2010-2014 maupun yang menjadi prioritas dalam tahun berjalan.
- 3) Biro Hukum telah melakukan identifikasi peraturan perundang-undangan yang diterbitkan, pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak sinkron atau tidak harmonis dengan instansi lain, pemetaan peraturan perundang-undangan yang harus dibentuk sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
- 4) Biro Hukum telah melakukan penyebarluasan peraturan perundang-undangan sektor ESDM (regulasi) melalui website *jdih.esdm.go.id* sehingga pencarian informasi hukum berupa peraturan perundang-undangan sektor ESDM dapat dilakukan secara cepat, tepat dan akurat.
- 5) Biro Hukum telah melaksanakan pengembangan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan di lingkungan KESDM.
- 6) Kementerian ESDM melalui mengikutsertakan personal pada pelatihan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan sektor energi dan sumber daya mineral.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan baik dari sisi teknis maupun substansi terkait energi dan sumber daya mineral bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian ESDM khususnya bagi perancang peraturan perundang-undangan.

- 7) Biro Hukum telah memberikan pertimbangan hukum sebanyak 267 buah.
- 8) Putusan Lembaga Peradilan (Mahkamah Konstitusi, Lembaga Peradilan Perdata, Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara) realisasinya di tahun anggaran 2014, terdiri dari :
- Mahkamah Konstitusi sebanyak 5 kasus
  - Pengadilan Tata Usaha Negara sebanyak 2 kasus
  - Pengadilan Negeri sebanyak 8 kasus
  - Mahkamah Agung sebanyak 5 kasus
  - Pengadilan Tinggi Negara sebanyak 2 kasus
  - Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebanyak 2 kasus

Sebagian besar kegiatan yang telah ditargetkan dapat dicapai pada tahun 2014 – 2015 selengkapnya tertuang pada Tabel 1.15 berikut ini:

**Tabel 1.13. Capaian Kinerja Biro Hukum Tahun 2014-2015**

No	Uraian Kegiatan/Output	Tahun Anggaran		REALISASI (%)	
		2014	2015	2014	2015
	Pembinaan Administrasi Hukum	Satuan	Satuan	Satuan	Satuan
1	Buku Program Legislasi dan Regulasi Sektor ESDM	1 Buku	1 Buku	100	100
2	Rancangan Peraturan Perundang-Undangan sektor ESDM	25 Peraturan	25 Peraturan	100	100
3	Pembinaan Penyusun Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Sektor ESDM	1 Laporan	1 Laporan	100	100
4	Laporan Pertimbangan hukum atas	1 Laporan	1 Laporan	100	100



No	Uraian Kegiatan/Output	Tahun Anggaran		REALISASI (%)	
	Peraturan yang tidak sinkron dan harmonis				
5	Laporan Penyelesaian Permasalahan Hukum Bidang Perdata, tata usaha negara	3 Laporan	3 Laporan	100	100
6	Laporan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	1 Laporan	1 Laporan	100	100
7	Laporan Pertimbangan Hukum terhadap Permasalahan Hukum sektor ESDM	2 Laporan	2 Laporan	100	100
8	Laporan Evaluasi Hukum		7 Laporan	100	100

### c. **Kehumasan/Komunikasi Publik**

Matrik rasio pemberitaan positif, netral dan negatif di sektor ESDM selama tahun 2013 secara keseluruhan melebihi target. Hal ini dapat dicapai berkat peran aktif Pimpinan Kementerian ESDM dalam menjalin komunikasi dengan media massa dan menjelaskan rencana program serta kebijakan sektor ESDM yang berorientasi pemenuhan kebutuhan energi domestik. Di sisi lain, peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan yang diikuti kebijakan pendukungnya juga merupakan bentuk keseriusan pemerintah yang menjadi isu “seksi” dan meningkatkan tone positif ditengah kekhawatiran semakin menipis dan terbatasnya energi tidak terbarukan di Indonesia.

Selain itu, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan stakeholders juga senantiasa mendukung rencana program dan kebijakan Pemerintah dalam mengusung kepentingan nasional dalam hal pemenuhan kebutuhan domestik.

Namun, semua itu tidak serta merta menyebabkan tidak adanya opini negatif di sektor ESDM. Beberapa hal yang disoroti diantaranya, Negara Indonesia memiliki seluruh sumber energi yang dibutuhkan untuk menggerakkan semua sektor kehidupan. Namun pemerintah dianggap belum mengelola secara bijak dan penuh tanggung jawab, dan juga tidak memenuhi aspek keadilan bagi masyarakat. Krisis energi yang selama ini disampaikan sesungguhnya bukan karena persediaan energi yang tidak cukup.

Ataupun cadangan persediaan energi yang tinggal sedikit. Melainkan karena pengelolaan energi nasional yang kurang baik dan terpadu.

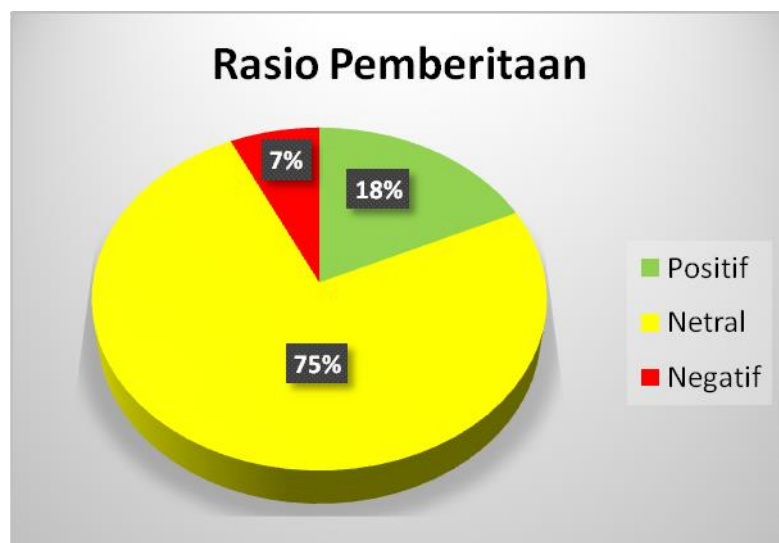
Prosentase pemberitaan sektor ESDM pada tahun 2013 adalah berita Positif sebesar 16 (enam belas) persen, Netral 83 (delapan puluh tiga) persen, dan berita Negatif sebesar 1 (satu) persen.

#### **Capaian 2014**

Keberadaan Puskombluk sebagai unit yang menangani urusan kehumasan atau komunikasi publik sektor ESD baru terbentuk pada tahun 2014 tepatnya sesuai dengan Permen ESDM nomor 22 Tahun 2013. Sehingga capaian dihitung mulai tahun 2014.

#### **1) Rasio Berita negatif, netral dan positif yang termuat di media**

Berita Sektor ESDM sepanjang tahun 2014 berjumlah 23.394 (dua puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh empat) artikel, dengan rincian pemberitaan positif sebanyak 4.281 (empat ribu dua ratus delapan puluh satu) artikel atau 18%, pemberitaan netral berjumlah 17.579 (tujuh belas ribu lima ratus tujuh puluh sembilan) artikel atau 75%, dan berita negatif sebanyak 1.534 (seribu lima ratus tiga puluh empat) artikel atau 7%.



**Gambar 1.3. Capaian Rasio Pemberitaan Sektor ESDM Tahun 2014**

Berita positif dan negatif untuk tahun 2014 ini meningkat dari tahun sebelumnya, peningkatan ini secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **Berita Positif 2014:**

- Ketenagalistrikan: Uji coba transmisi listrik oleh PT PLN dari kilang LNG Tangguh dan aturan untuk mempermudah izin swasta di bidang ketenagalistrikan dapat mendorong peluang bisnis di sektor ketenagalistrikan. Perusahaan Listrik Negara (PLN) siap mengoperasikan kembali

pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) Tambak Lorok di Semarang, Jawa Tengah. Hal ini setelah ada tambahan pasokan gas ke PLTG.

- Migas: Pemerintah memutuskan untuk mengubah aturan pemberian bahan bakar minyak bersubsidi untuk nelayan dengan kapal ukuran 30-60 *gross tonnage* (GT). ExxonMobil Indonesia optimis produksi minyak Blok Cepu terealisasi pada November 2014. Hal itu sesuai dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan produksi siap jual (*lifting*). Pemerintah menawarkan insentif kepada investor yang ingin mengembangkan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG). Insentif ini untuk melanjutkan dan mengoptimalkan program konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG). Insentif yang diberikan adalah dalam bentuk penyediaan lahan dan alokasi gas. PT Pertamina Hulu Energi (PHE) secara resmi mulai mengambil alih pengelolaan blok tersebut. Produksi dari Blok Siak saat ini mencapai kisaran 1.800 BOPD. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengkaji kembali skema *trustee borrowing Scheme* (TBS) yang dipakai BP Indonesia untuk pendanaan proyek kilang liquefied natural gas (LNG) Tangguh Train III. Kajian ini dilakukan setelah ada masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa skema ini bisa melanggar UU Migas dan merugikan negara. Menteri Koordinator Perekonomian, Chairul Tanjung, mengunjungi perusahaan penghasil gas alam cair Indonesia, PT Arun NGL, yang berlokasi di Lhokseumawe, Aceh. Kedatangan CT, sapaan Chairul Tanjung, untuk membahas masa depan perusahaan LNG tersebut yang akan berakhir pengoperasiannya pada Oktober 2014. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan meresmikan dua proyek minyak dan gas bumi dengan nilai investasi sekitar Rp13,6 triliun. Peresmian dilakukan bersamaan dengan proyek lainnya yang masuk dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di Balikpapan, Kaltim. Kedua proyek tersebut adalah proyek pengembangan Lapangan Gas Ruby, Blok Sebuku yang dikelola Mubadala Petroleum dan Sisi Nubi 2B, Blok Mahakam dengan operator Total E&P Indonesia.
- Minerba: Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, larangan ekspor mineral mentah (ore) yang tertuang dalam UU No.4/2009 tentang Mineral Tambang dan Batu bara (Minerba) diprediksi tak akan mengganggu neraca perdagangan Indonesia, selama ada peningkatan volume ekspor komoditas lain. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah membuat peta jalan (*roadmap*)

pelaksanaan hilirisasi di sektor pertambangan mineral batubara (minerba) sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) No.1/2014 agar dapat terciptanya nilai tambah sektor tambang hingga 2017. Sebanyak 14 pelabuhan induk ekspor batu bara di Sumatera dan Kalimantan akan segera dibangun. Pembangunan oleh Pemerintah tersebut untuk mengawasi distribusi penjualan batu bara ke luar negeri. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan akan memberikan teguran lebih keras pada PT Freeport Indonesia menyusul longsornya areal pertambangan bawah tanah di Grasberg Block Cave

- EBTKE: Bank Pembangunan Asia (ADB) berinvestasi hingga 350 juta dolar AS untuk paket dukungan pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Geothermal Sarulla 320 megawatt di Sumatera Utara. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan merevisi peraturan tentang harga pembelian tenaga listrik pembangkit listrik tenaga minihidro (PLTMH) agar dapat menarik investor. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tertarik mengembangkan tanaman itu sebagai bahan bakar nabati (BBN). Selain bukan tanaman pangan, usia kemiri sunan 50-100 tahun, rendemen biodiesel tinggi dan sudah disertifikasi. Selain itu, peresmian pembangkit listrik berbasis energi terbarukan juga memberikan kontribusi berita positif.
- Umum: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meluncurkan Gerakan Sadar Energi untuk Kelangsungan Hidup Bangsa.

#### **Berita Negatif 2014:**

- Ketenagalistrikan: Maraknya pemadaman listrik di berbagai wilayah masih terus terjadi menjadi berita negatif sektor ketenagalistrikan. Tertundanya pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang, di Jawa Tengah, diperkirakan merugikan negara hingga mencapai Rp 9 triliun per tahun. Padahal PLTU Batang direncanakan akan beroperasi pada akhir tahun 2016 yang akan memasok cadangan listrik Jawa dan Bali sebesar 30%. Hal itu diungkapkan oleh Pengamat Pembangunan Nasional Syahril Loetan.
- Migas: Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan orang miskin Indonesia di 2013 semakin bertambah. Penyebab utamanya adalah dengan adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada bulan Juni 2014 lalu. Menurut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, salah satu praktik korupsi yang marak terjadi di sektor migas adalah praktik suap yang dilakukan

para pengusaha pertambangan untuk memperoleh izin menambang di suatu daerah. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi, mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini sangat ditopang oleh perkembangan sektor minyak dan gas. Selama kebijakan sektor ini belum tepat, maka kondisi perekonomian tidak akan tumbuh dengan cepat. Indonesia tidak perlu menambah macam-macam usulan yang banyak tidak dilaksanakan. Dia menilai, selama ini akar masalah justru ada pada sektor migas tersebut.

- Minerba: Proses renegotiasi antara pemerintah dengan pemegang konsesi kontrak karya (KK) serta perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) hingga kini masih mandek. Padahal semestinya, proses renegotiasi harus dirampungkan sejak 2010 dengan pelaksanaan efektif pada 12 Januari 2014.
- Selanjutnya Berita Negatif yang paling banyak diangkat di Sektor ESDM adalah KPK Resmi Tetapkan Menteri Jero Wacik Sebagai Tersangka Pemerasan. KPK akhirnya secara resmi menetapkan Menteri ESDM Jero Wacik sebagai tersangka. Jero ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan. "Sudah dikeluarkan Sprindik per tanggal 2 September 2014, peningkatan status ke penyidikan atas nama tersangka JW dari kementerian ESDM," kata Wakil Ketua KPK, Zulkarnain di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (3/9/2014). Penetapan tersangka ini diputuskan setelah pimpinan KPK beberapa kali menggelar ekspose. Memang kasus dugaan pemerasan yang dilakukan Jero sudah sekitar tiga bulan diselidiki KPK.
- Selain itu, bergulirnya pemberitaan di KPK baik sebelum maupun setelah penetapan, serta pemeriksaan terhadap pihak-pihak lain terkait Sektor ESDM juga banyak memberikan kontribusi berita negatif.

## **2) Jumlah pengaduan lapor yang ditangani**

Jumlah pengaduan laporan yang masuk pada tahun 2014 mencapai 56 pengaduan dan kesemuanya telah ditindak lanjuti oleh Pusat Komunikasi Publik KESDM kepada masing-masing subsektor sesuai isu subsektor dari pengaduan tersebut. Laporan yang masuk meliputi isu subsektor Migas 9 laporan, Migas dan BPH 14 laporan, migas dan listrik 1 laporan, listrik 5 laporan, Minerba 21 laporan, minerba dan geologi 1 laporan, EBTKE 2 laporan, Badan Geologi 1 laporan, Pusat Komunikasi Publik KESDM 1 laporan dan Kepegawaian 1 laporan.

Pengaduan yang telah diselesaikan sebanyak 23 laporan pengaduan yaitu sektor migas 3 laporan selesai, 1 laporan masih proses dari 9 laporan pengaduan, Migas dan BPH telah diselesaikan 2 laporan dari 14 laporan, migas dan kelistrikan telah diselesaikan 1 laporan dari 1 laporan yang masuk, Listrik 4 laporan telah diselesaikan dari 5 laporan pengaduan yang masuk, minerba 9 laporan telah diselesaikan dari 21 laporan pengaduan yang masuk, Minerba dan geologi telah diselesaikan 1 laporan dari 1 laporan pengaduan yang masuk, EBTKE telah menyelesaikan 1 laporan dari 2 laporan pengaduan yang masuk, Badan Geologi telah menyelesaikan 1 laporan dan 1 laporan pengaduan yang masuk, dan Puskom telah menyelesaikan 1 laporan dari 1 laporan yang masuk, sisanya belum ada jawaban dari sub sektor yang bersangkutan.

#### **d. Kearsipan**

Dalam kegiatan organisasi tidak terlepas dari surat-menyurat dan dokumen sebagai pendukung vital pelaksanaan tugas, baik yang diciptakan maupun yang diterima. Surat dan dokumen yang disebut arsip tersebut merupakan bahan kerja dalam rangka pencapaian tujuan.

Dalam rangka mewujudkan terciptanya *good governance* di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral maka perlu didukung oleh administrasi pemerintahan dan kearsipan yang berkualitas. Adalah tugas Sekretariat Jenderal untuk mengupayakan mutu kearsipan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral agar senantiasa terus ditingkatkan.

Dalam rangka pembinaan dan upaya standarisasi tata persuratan, telah dikeluarkan pedoman dan prosedur kerja yang ditetapkan dengan peraturan menteri antara lain :

- Peraturan Menteri ESDM Nomor 052 tahun 2006 tentang Pedoman Tata persuratan Dinas dan Kearsipan KESDM,
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 03 tahun 2009 tentang Pedoman Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian di lingkungan KESDM,
- Peraturan MESDM Nomor 10 tahun 2009 tentang Jadwal Retensi Arsip Penelitian dan Pengembangan Departemen ESDM.
- Keputusan Kepala Badan Litbang Nomor 1703 K/06/BLB/2006 tentang Petunjuk Teknis Tentang Tata Persuratan Dinas dan Kearsipan di lingkungan Balitbang KESDM

- Keputusan Kepala Badan Geologi Nomor 222 K/04/BGL/2009 tentang Petunjuk Teknis Tentang Tata Persuratan Dinas dan Kearsipan di lingkungan Badan Geologi KESDM.

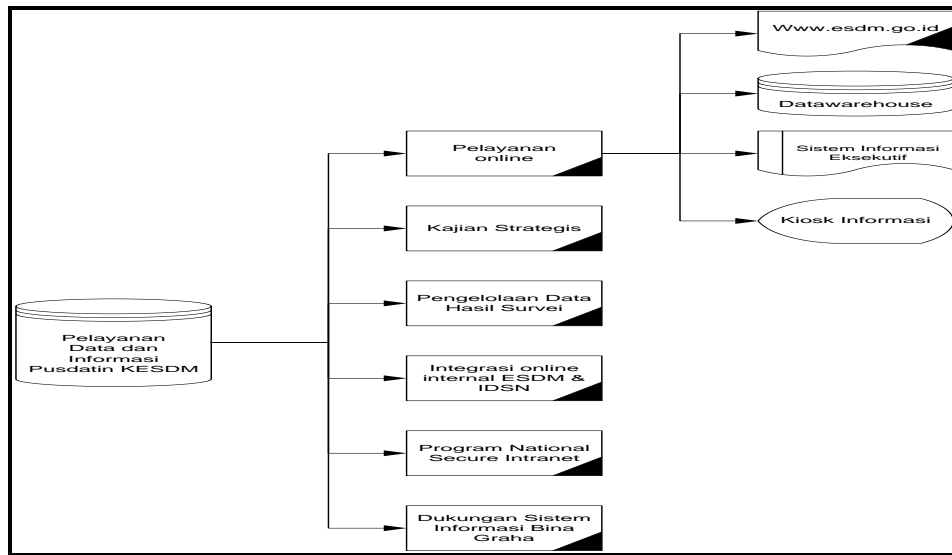
**e. Data dan Informasi**

Data dan informasi menjadi bagian penting dalam kegiatan pemerintahan. Secara umum, Capaian Kinerja Pusdatin KESDM selaku Pusat Pengelola Data dan Informasi selama 2010-2014, sebagai berikut:

- Pelayanan data dan informasi untuk publik secara *on line* pada *website* ataupun publikasi dalam media cetak;
- Kajian strategis untuk mendukung pimpinan dalam menetapkan kebijakan dan pengambilan keputusan;
- Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Hasil Kegiatan Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi;
- Integrasi layanan data dan informasi on-line di lingkungan KESDM dan lintas Kementerian (*National Single Window, JDSN*);
- Pembangunan jaringan komputer dan internet KESDM ke dalam program *National Secure Intranet*.
- Pembangunan jaringan pelayanan informasi publik (tindak lanjut Surat Keputusan MESDM Nomor: 0106 K, tanggal 13 Januari 2012);
- Penyiapan usulan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).

a) Pelayanan data dan informasi sektor ESDM secara *on-line*;

Dalam rangka menyediakan data dan informasi perkembangan sektor energi dan sumber daya mineral, *Pusdatin secara rutin melakukan updating* dan analisis atas data sektor energi dan sumber daya mineral dan mempublikasikannya antara lain melalui informasi *online*, seperti :



**Gambar 1.4. Diagram pelayanan data dan informasi sektor ESDM secara On-line**

i. Website ESDM (*www.esdm.go.id*)

Situs ESDM dibangun dalam rangka meningkatkan pelayanan dengan memberikan akses informasi yang lebih baik kepada masyarakat. Situs *esdm.go.id* memuat informasi tentang kegiatan di lingkungan Kementerian ESDM beserta informasi lainnya seperti publikasi data statistik energi, harga energi, *datawarehouse*, legislasi dan regulasi, analisis dan kajian.

ii. *Datawarehouse*

*Datawarehouse* berisikan data yang berbasis bulanan dan tahunan yang dimulai sejak tahun 2000, meliputi data produksi, ekspor, impor dan konsumsi (penjualan dalam negeri) minyak dan gas bumi, batubara, panas bumi, mineral, geologi, listrik, bahan bakar minyak, investasi dan penerimaan negara sektor ESDM, harga minyak, batubara dan emas serta data makro ekonomi. Data tersebut tersedia dalam bentuk tabel dan grafik.

iii. Sistem Informasi Eksekutif

Sistem Informasi Eksekutif berisi data terbaru energi, mineral dan data lainnya yang berisi data harian sampai dengan H-1 yang disiapkan untuk Menteri ESDM, Staf Ahli dan Staf Khusus serta pimpinan Kementerian lainnya. Data energi mencakup komoditas minyak dan gas bumi, batubara, listrik, panas bumi dan energi terbarukan. Data yang terkandung didalam sistem ini mencakup produksi harian, target produksi, pajak dan *cost recovery* untuk minyak bumi dan lain-lain. Sistem Informasi Eksekutif



dapat diakses para pimpinan KESDM melalui jaringan komputer lokal di Kementerian ESDM.

iv. Kios Informasi

Kios Informasi Pusdatin merupakan sebuah terminal komputer *standalone* yang ditempatkan pada lokasi strategis untuk melayani publik dengan data dan informasi ESDM. Data dan informasi tersebut diambil dan disarikan dari publikasi online dan media Pusdatin ESDM sehingga melalui kios ini publik dapat mendapatkan gambaran selintas tentang data dan informasi KESDM.

b) Kajian strategis untuk mendukung pimpinan dalam pengambilan keputusan;

Bidang Kajian Strategis mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan strategis energi dan mineral dan kerja sama kajian energi dan mineral. Pada tahun 2014, Bidang Kajian Strategis Energi dan Sumber Daya Mineral telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

- Kajian Strategis Energi yang terdiri dari: Evaluasi dan Analisis *Supply-Demand* Energi, Peningkatan Koordinasi Kebijakan Strategis Energi, Kajian Kebijakan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim Sektor Energi, Kajian Insentif untuk Pengembangan Sektor Energi, Kajian Dinamika Bisnis Energi Dunia, Penyusunan *Energy Outlook* 2014, Kajian Internalisasi Biaya Eksternal Pengembangan Energi, Kajian Perencanaan Energi Daerah, Kajian Kebijakan Harga Energi Domestik.
  - Kajian Sumberdaya Mineral yang terdiri dari: Analisis *Supply-Demand* Mineral, Kajian Peranan Sektor Pertambangan dalam Perekonomian Regional.
- c) Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Hasil Kegiatan Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi

Kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan data migas dilaksanakan dalam rangka untuk menunjang penetapan Wilayah Kerja Migas, perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan pemerintah dan pengawasan di bidang migas. Data yang diperoleh dari hasil kegiatan Survei Umum, Eksplorasi, dan Eksploitasi migas sangat bervariasi baik jenis, media dan formatnya. Dalam rangka pengelolaan data, Pusdatin ESDM melakukan pengadministrasian, pengolahan, penataan, penyimpanan, dan pemeliharaan data hasil Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi. Untuk menjaga mutu dan kegunaan serta nilai tambah data, Pusdatin ESDM melakukan peremajaan dan alih media data serta

meningkatkan teknologi dan sistem informasi pengelolaan data.

- d) Integrasi layanan data dan informasi *on-line* di lingkungan KESDM dan lintas kementerian (*National Single Window*, JDSN)

Dengan semakin maju dan berkembangnya teknologi informasi, yang diaplikasikan dalam memudahkan pekerjaan khususnya di bidang Pemerintahan, maka dikembangkanlah sistem yang memberikan kemudahan didalam pengambilan keputusan secara *real time* dan akurat yang akan menunjang sistem pasar bebas yang penuh kompetisi.

Berdasarkan kondisi diatas, maka dikembangkan sistem *Indonesia National Single Window* (INSW) dan Jaringan Data Spasial Nasional (JDSN). Kedua sistem tersebut memungkinkan didalam pengambilan keputusan secara efektif dan efisien.

*Indonesia National Single Window* (INSW) adalah sistem perizinan terpadu yang mengintegrasikan importir dengan penerbit izin (termasuk KESDM), pajak, bea cukai, bank, karantina, pelayaran dan pelabuhan kedalam sebuah sistem transaksi elektronik terpadu.

KESDM terlibat dalam INSW dalam pemberian izin atau rekomendasi untuk impor bahan bakar minyak (BBM), produk olahan BBM, dan peralatan listrik untuk rumah tangga. Izin atau rekomendasi yang dikeluarkan KESDM dimasukkan kedalam database INSW untuk menjadi bahan referensi bagi petugas bea cukai dalam pemroses impor barang.

KESDM tetap menjalankan prosedur pemberian izin/rekomendasi sebagaimana yang sudah ditetapkan dimana importir mengurus izin/rekomendasi ke KESDM, namun dalam proses di Bea Cukai, izin/rekomendasi sudah disediakan dalam database sehingga proses impor barang dapat dilakukan dengan cepat, cermat dan efisien.

Pusdatin ESDM sebagai simpul JDSN pada KESDM bertugas mengumpulkan *metadata* dan data *spasial* yang dihasilkan unit-unit kerja KEDM untuk kemudian menyediakan data tersebut untuk dapat digunakan instansi pemerintah lainnya melalui sistem yang sudah disiapkan.

Melalui JDSN instansi-instansi pemerintah dapat mengetahui ketersediaan data spasial pada setiap instansi pemerintah yang sudah masuk kedalam JDSN sehingga dapat meningkatkan pemanfaatan data spasial secara optimal.

Pudatin ESDM mengumpulkan *metadata* dan data *spasial* dari Badan Geologi, Ditjen Migas, Ditjen Ketenagalistrikan, Ditjen

Mineral dan Batubara, dan Ditjen EBTKE. Selanjutnya tugas Pusdatin sebagai simpul JDSN di KESDM untuk mengirimkan metadata spasial ESDM ke Bakosurtanal sebagai koordinator JDSN untuk digabung kedalam database metadata nasional.

- e) Pembangunan jaringan komputer dan internet KESDM ke dalam program *National Secure Intranet*

Layanan Terpadu KESDM merupakan upaya peningkatan layanan KESDM kepada investor yang akan melakukan kegiatan investasi di sektor ESDM. Layanan mulai dari penyediaan informasi awal, regulasi, prosedur investasi, penyediaan dokumen yang diperlukan untuk investasi, dan data serta informasi yang diperlukan investor untuk investasi. KESDM menyediakan 4 layanan terpadu:

- Minyak bumi dan gas di Ditjen Minyak dan Gas Bumi;
- Kelistrikan di Ditjen Ketenagalistrikan;
- Mineral dan batubara di Ditjen Mineral dan Batubara; serta
- Energi Baru Terbarukan di Ditjen EBTKE.

Saat ini keempat layanan ini masih berdiri sendiri dan melekat pada lokasi perkantoran yang terpisah satu dari yang lainnya. Pusdatin ESDM berupaya menyediakan infrastruktur jaringan bagi keempat layanan ini untuk komunikasi data dan akses internet serta penyediaan data dan informasi untuk keperluan investasi.

- f)Pembangunan jaringan pelayanan informasi publik (tindak lanjut Surat Keputusan MESDM Nomor: 0106 K, tanggal 13 Januari 2012)

- g) Penyiapan usulan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN)

Penyusunan RUEN adalah amanat UU 30 Tahun 2007 tentang Energi utamanya Pasal 17 dan 18 :

- Pasal 17 ayat (1): “Pemerintah menyusun Rencana Umum Energi Nasional berdasarkan Kebijakan Energi Nasional”.
- Pasal 17 ayat (3): “*Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana umum energi nasional ditetapkan dengan Peraturan Presiden*”.
- Pasal 18 ayat (1): “Pemerintah daerah menyusun Rencana Umum Energi Daerah dengan mengacu pada Rencana Umum Energi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)”.
- Pasal 18 ayat (2): “Rencana Umum Energi Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah”.

Inisiasi penyusunan RUEN dilaksanakan oleh Pusat Data dan Informasi ESDM sebagai PIC yaitu pada tahun 2010, dimana Pusdatin KESDM dan Biro Hukum melakukan pembahasan Pedoman Penyusunan RUEN dengan Unit di lingkungan KESDM.

Namun semenjak tahun 2015 penyusunan Rancangan RUEN diambil alih oleh Biro Perencanaan dan Kerja Sama dikarenakan substansi yang terkandung di dalam Rancangan RUEN menjadi Tupoksi dari Biro Perencanaan dan Kerja Sama.

## **I.2. POTENSI**

### **A. PERSONIL**

Potensi dari Sumber Daya Manusia yang dimiliki Kementerian ESDM antara lain:

- a. Memiliki acuan kerja yang jelas, baik dalam aspek pengelolaan kepegawaian melalui Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan dan Keputusan Menteri ESDM maupun prosedur-prosedur kerja yang tersusun untuk bidang-bidang operasional teknis dan konseptual;
- b. Memiliki Program Diklat yang dipersepsikan bermutu tinggi oleh para pegawai KESDM.
- c. Memiliki sistem rekrutmen yang pelaksanaannya sesuai standar baku mengikuti sistem dan peraturan serta undang-undang yang berlaku.
- d. Memiliki Sistem Informasi Pegawai yang berjalan dengan baik sebagai bagian dari sarana pengembangan karir pegawai.
- e. Memiliki database kepegawaian yang dikelola dan memiliki dampak langsung atau tidak langsung terhadap peningkatan karir pegawai.
- f. Kerjasama dengan instansi lain dalam peningkatan kompetensi pegawai, baik dari dalam maupun luar negeri, melalui kerjasama antar instansi maupun beasiswa memberikan peluang peningkatan kompetensi teknis maupun non-teknis secara signifikan.
- g. Kepedulian manajemen terhadap peningkatan kualitas SDM sangat besar yang ditunjukkan dengan perhatian melalui pengiriman tugas belajar ataupun penyertaan dalam program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan secara internal maupun eksternal.
- h. Melakukan penyusunan standar kompetensi jabatan struktural eselon III dan IV di lingkungan Kementerian ESDM. Standar kompetensi tersebut merupakan persyaratan yang harus dimiliki

oleh seseorang yang akan diangkat dalam suatu jabatan dan akan menjadi salah satu pertimbangan dalam pengangkatan dalam jabatan.

- i. Kondisi lingkungan strategis yang diperkirakan akan menciptakan peluang atau mendukung pengelolaan sumber daya manusia dan pengembangan organisasi yaitu kondisi dimana Biro Kepegawaian dan Organisasi yang didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 70 orang, yang terdiri dari 34 orang PNS laki-laki dan 36 orang PNS wanita. Tingkat pendidikan PNS di lingkungan Biro Kepegawaian dan Organisasi sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :
- j.

**Tabel 1.14. Tingkat pendidikan PNS di lingkungan Biro Kepegawaian dan Organisasi**

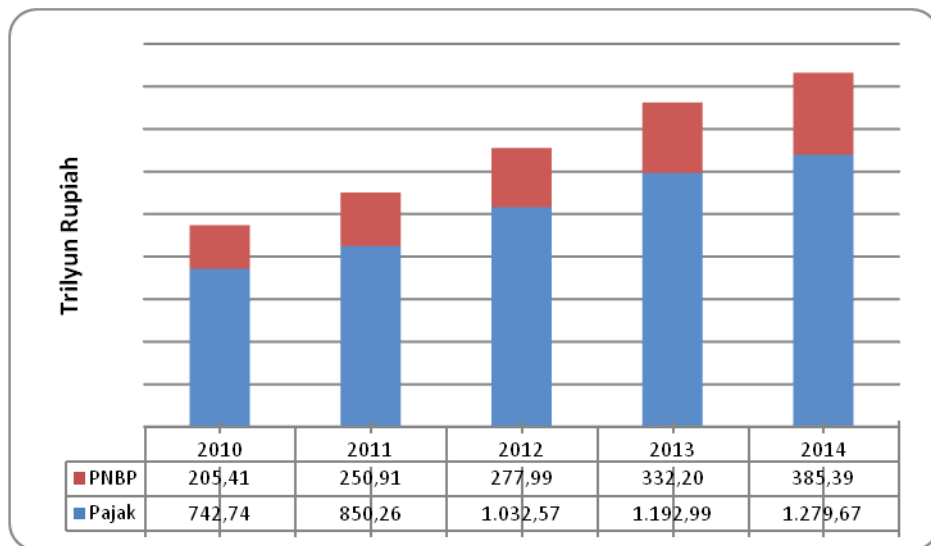
No.	Bagian	Tingkat Pendidikan							Jumlah
		SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	S3	
1	Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai		2	5		7	1		15
2	Bagian Mutasi Pegawai			5	1	10	2		18
3	Bagian Kinerja dan Informasi Pegawai			3	5	9	4		21
4	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	1		2		11	1		15
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>37</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>70</b>

## B. PENDANAAN

Potensi dari aspek pendanaan, antara lain:

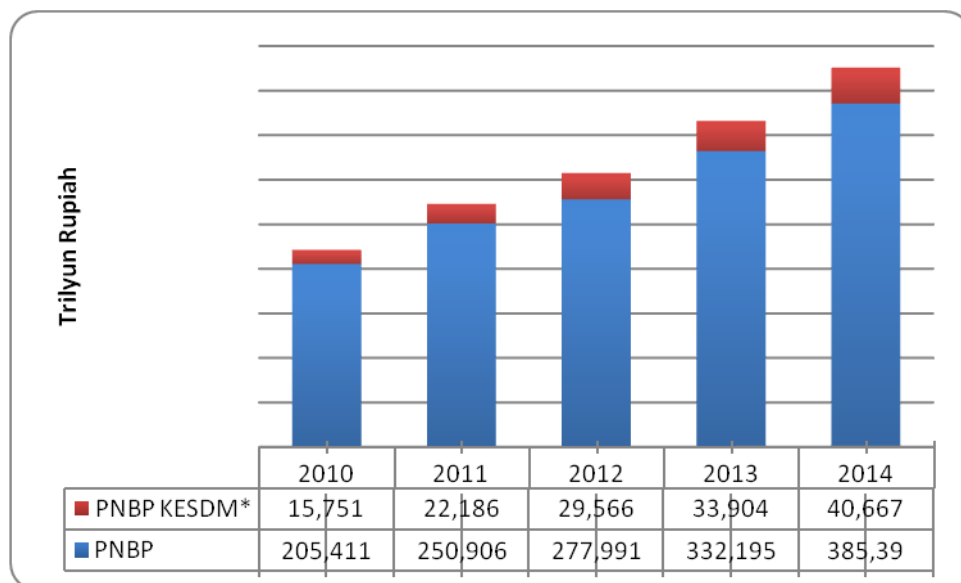
### a. Potensi PNBK KESDM yang Cukup Besar

Pada Tahun 2015 – 2019 seperti termuat dalam Renstra Kementerian ESDM, sektor ESDM memiliki potensi penerimaan negara diluar pajak yang cukup besar dimana hal tersebut tercermin dari meningkatnya target PNBK yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan kepada Kementerian ESDM. Kontribusi PNBK terhadap anggaran pendapatan yang berasal dari pajak dan PNBK dalam APBN selama tahun 2010 – tahun 2014, dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



**Gambar 1.5. Kontribusi PNPB terhadap APBN TA. 2010 – 2014**

Adapun kontribusi PNPB sektor ESDM terhadap PNPB secara Nasional di tahun 2010 - 2014 dapat digambarkan pada diagram sebagai berikut:



**Gambar 1.6. Kontribusi PNPB terhadap PNPB TA. 2010 – 2014**

Kontribusi PNPB KESDM berdampak terhadap peran KESDM sebagai penyumbang dana APBN selain pajak, dan akan berpengaruh terhadap penetapan besaran pagu Kementerian ESDM secara keseluruhan dari dana PNPB.

**b. SDM yang Kompeten**

Selain melakukan pengelolaan PNPB, Biro Keuangan juga bertugas sebagai pembina dalam hal pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku, baik dari sisi pelaksanaan dan pelaporan sehingga sistem pemanfaatan baik kegiatan dan keuangan dapat berjalan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Dengan peran pengelolaan keuangan yang cukup besar Biro Keuangan harus memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dan berkualitas. Saat ini Biro Keuangan memiliki jumlah SDM sebanyak 70 Orang termasuk yang diperbantukan pada BPH Migas dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1.15. Jumlah Sumber Daya Manusia Biro Keuangan**

No	Jabatan	Jumlah	
1	Kepala Biro Keuangan	1	Orang
2	Kepala Bagian	4	Orang
3	Kepala Subbagian	12	Orang
4	Staf	48	Orang
<b>Total</b>		<b>65</b>	<b>Orang</b>
Perbantuan pada BPH Migas		5	Orang
<b>Grand Total</b>		<b>70</b>	<b>Orang</b>

Adapun tingkat pendidikan Sumber Daya Manusia Biro Keuangan sebagai berikut:

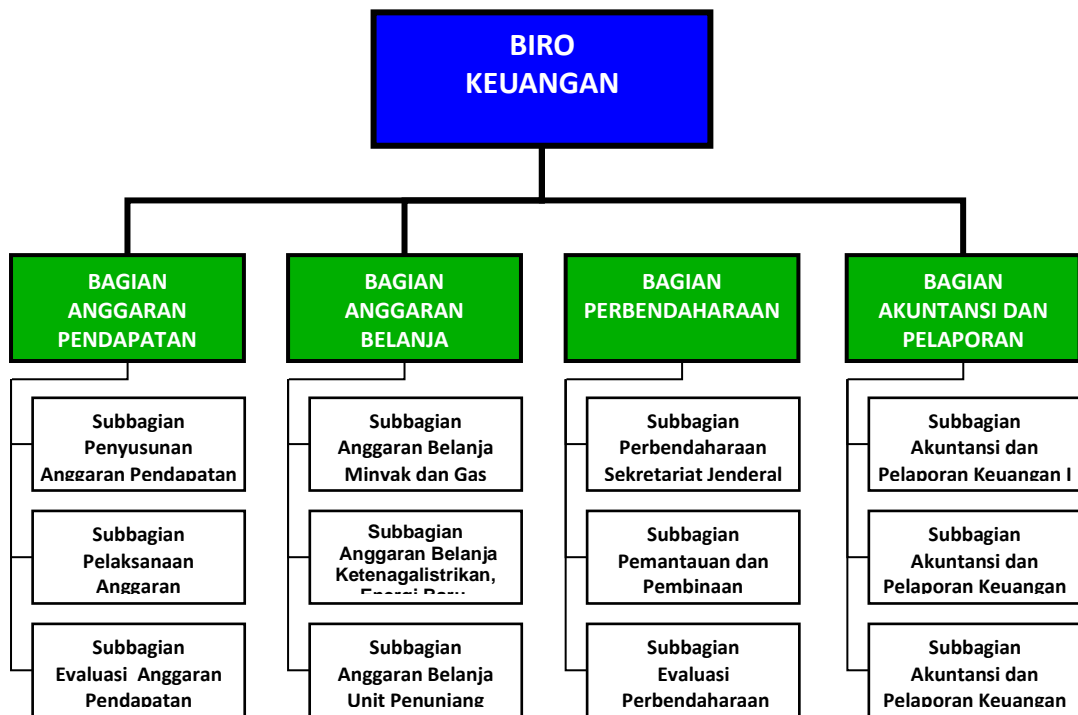
**Tabel 1.16. Tingkat Pendidikan Sumber Daya Manusia Biro Keuangan**

Tingkat Pendidikan	S-3	S-2	S-1	D III	SLTA	SLTP	Jumlah
Jumlah	0	12	41	4	13	0	70

**c. Struktur Organisasi yang mendukung pencapaian kinerja**

Saat ini Biro Keuangan memiliki empat bagian di dalam struktur organisasinya, yang tiap bagian memiliki peran penting dalam rangka pembinaan sektor keuangan baik dalam pembinaan pengelolaan PNBPN sektor ESDM, pelaksanaan anggaran, pelaksanaan perbendaharaan dan akuntansi.

Pada tahun 2015, Biro Keuangan mengalami perubahan dalam struktur organisasi khususnya pada bagian Anggaran Belanja dan Bagian Akuntansi, perubahan tersebut yang semula pembagian pekerjaan pada subbagian didasarkan pada alur proses menjadi didasarkan pada komoditi.



**Gambar 1.7. Struktur Organisasi Biro Keuangan**

### C. PERALATAN

Potensi dari aspek Peralatan, antara lain:

Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki peran penting dalam pembangunan nasional, terutama dalam mendukung perekonomian nasional, baik melalui sisi fiskal, moneter maupun bidang riil. Dalam rangka mendukung peran tersebut, pemerintah dituntut untuk menyelenggarakan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam memanfaatkan potensi energi untuk kepentingan bangsa dan negara sehingga membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yang terkelola dengan baik dan efisien.

PPBMN memiliki tugas melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan sarana dan prasarana terutama yang masuk dalam kategori Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Namun, dinamika Pengelolaan Barang Milik Negara saat ini semakin berkembang dan kompleks sehingga menuntut peningkatan kinerja dalam rangka mendukung pengelolaan BMN yang profesional, akuntabel dan transparan di Bidang ESDM.

Pada tahun 2015-2019, terdapat peluang penyederhanaan rantai birokrasi pengelolaan BMN dikarenakan adanya pendelegasian sebagian kewenangan Pengelola Barang (Kementerian Keuangan) kepada Pengguna Barang (Kementerian/Lembaga) dalam pengelolaan BMN berupa penetapan status penggunaan BMN, pemindahtanganan, dan penghapusan BMN, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang.



Pada tahun 2015-2019, terdapat potensi peningkatan kuantitas BMN bidang ESDM yang harus dikelola, yaitu antara lain kegiatan pengelolaan BMN berupa pemindahtanganan dan/atau penghapusan BMN yang berasal dari kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang telah terminasi, serta pemindahtanganan dan/atau penghapusan aset yang berasal dari Kontrak Operasi Bersama (KOB) panas bumi.

Pada 5 (lima) tahun ke depan terdapat potensi pengelolaan BMN pada subbidang panas bumi yaitu pengelolaan BMN yang berasal dari *joint operation contract* (JOC) atau kontrak operasi bersama (KOB) panas bumi. Berdasarkan 3 (tiga) dari 5 (lima) KOB yang ada, seluruh material dan peralatan yang dibeli kontraktor dalam rangka kegiatan operasi panas bumi menjadi milik PERTAMINA (saat ini telah menjadi PT Pertamina (Persero)). Selanjutnya, penetapan BMN sebagai aset PT Pertamina (Persero) adalah melalui mekanisme Penyertaan Modal Pemerintah (PMP), sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bersama Menteri ESDM, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN Nomor 14 Tahun 2013, 33/PMK.06/2013, dan PER-01/MBU/2013 tentang Status Kepemilikan Aset Panas Bumi yang Berasal Dari Kontrak Operasi Bersama (*Joint Operation Contract*). Pengelolaan terhadap BMN dimaksud sebelum adanya penetapan PMP akan diatur oleh Kementerian Keuangan. Acuan yang akan digunakan Kementerian Keuangan dalam penyusunan pengaturan pengelolaan BMN yang berasal dari perusahaan panas bumi adalah pengaturan eksisting BMN yang berasal dari PKP2B, dengan pertimbangan bahwa prinsip *cost recovery* tidak berlaku untuk usaha panas bumi dan usaha penambangan batubara.

#### **D. DOKUMEN**

Potensi dokumen untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat Jenderal, antara lain :

- a. Di lihat dari aspek perencanaan, dengan telah tersedianya dokumen Rencana Kerja KESDM yang disusun dalam kerangka jangka menengah serta telah berbasis kinerja dengan target *output* dan *outcome* yang jelas sehingga terdapat kejelasan arah serta mempermudah koordinasi rencana kerja tahunan.
- b. Salah satu pilar dalam upaya untuk mewujudkan *good governance* di lingkungan Kementerian ESDM adalah penataan peraturan perundang-undangan. Hal ini menjadi penting, karena apabila tahapan proses pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan secara akuntabel, akan muncul peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, disharmonis atau dapat diinterpretasi berbeda sehingga seringkali tidak dapat diimplementasikan sesuai dengan tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut.

- c. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, perangkat regulasi Biro Hukum mempunyai peranan yang sangat strategis dan potensial dalam mewujudkan *good governance* di lingkungan Kementerian ESDM.
- d. Tersedianya pelayanan data dan informasi sektor ESDM secara *on-line*.
- e. Tersedianya kajian strategis untuk mendukung pimpinan dalam pengambilan keputusan.
- f. Pusdatin ESDM menyediakan hasil kajian strategis yang dibutuhkan oleh Pimpinan ESDM menyangkut isu-isu dan permasalahan di sektor ESDM yang ada, melakukan analisis dan proyeksi pasokan dan kebutuhan energi, serta usulan rekomendasi kebijakan pengelolaan ESDM.
- g. Tersedianya data hasil kegiatan Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi migas untuk menunjang penetapan Wilayah Kerja Migas.
- h. Pelayanan komunikasi publik semakin dapat ditingkatkan dengan adanya sistem pengaduan masyarakat misalkan dalam bentuk LAPOR dan website PPID.

### **I.3. PERMASALAHAN**

#### **A. PERSONIL**

Permasalahan yang dihadapi di bidang SDM, antara lain:

- a. Dengan adanya moratorium CPNS, kegiatan pengadaan pegawai sejak tahun 2011, 2012, dan 2015 ditiadakan. Setiap Kementerian/Lembaga diwajibkan oleh Kementerian PAN-RB untuk melakukan penataan pegawai melalui e-formasi. Terkait dengan hal dimaksud, rasio jumlah pegawai dengan beban kerja pada Kementerian ESDM dirasakan kurang, sehingga diharapkan pada tahun-tahun mendatang formasi pada Kementerian ESDM dapat ditetapkan untuk memenuhi rasio jumlah pegawai dan beban kerja.
- b. Komposisi pejabat fungsional tertentu dengan fungsional umum belum sesuai dengan kebutuhan terutama pada unit Badan Geologi, Badan Litbang ESDM dan Badan Diklat ESDM yang secara struktur seharusnya tugas dan fungsi unit tersebut dilakukan oleh pejabat fungsional.
- c. Jumlah pegawai yang berlatar belakang pendidikan teknik jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai berlatar belakang pendidikan non-teknik.

- d. Meskipun dipandang bermutu tinggi, tetapi Program Diklat yang dilaksanakan belum seluruhnya sesuai dengan kebutuhan KESDM yang sangat beragam, dan satu sama lain memiliki kedalaman yang berbeda-beda.
- e. Program Diklat yang bermutu tinggi belum dilaksanakan secara teratur dan menjangkau seluruh pegawai yang membutuhkan.
- f. Pelaksanaan sistem pengembangan karir dan penempatan pegawai belum optimal karena masih terdapat beberapa aspek yang belum terliput antara lain penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensinya dan pengembangan karir yang belum terkelola secara merata.
- g. Belum seluruh pegawai memiliki kompetensi Profesional (terkait dengan kompetensi *soft skills*) yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan di masa datang yang semakin kompleks.
- h. Globalisasi memerlukan kemampuan berkomunikasi setidaknya berbahasa asing utama yaitu Bahasa Inggris. Jumlah pegawai yang menguasai bahasa asing tersebut masih kurang.
- i. Kurang berjalannya sistem kaderisasi pegawai untuk bidang-bidang teknis tertentu, yang ditunjukkan dengan tidak tersedianya secara langsung pegawai yang otomatis menggantikan pejabat yang pensiun atau dimutasi.
- j. Penerapan sistem penilaian dan pengukuran prestasi yang berlaku (SKP) belum dilaksanakan secara murni dan konsekuen.

## **B. PENDANAAN**

Permasalahan yang dihadapi di bidang pendanaan, antara lain:

- a. Pengelolaan PNBPN dan Piutang pada Ditjen Minerba yang belum didukung oleh sistem yang memadai.
- b. Fluktuasi harga komoditi sektor ESDM mempengaruhi pencapaian realisasi PNBPN KESDM.
- c. Belum ditetapkannya SOP pengelolaan PNBPN di lingkungan KESDM.
- d. Belum tersedianya sistem informasi yang terintegrasi untuk mendukung pengelolaan PNBPN.
- e. Adanya kesulitan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait pengelolaan PNBPN SDA Minerba khususnya yang merupakan konsekuensi terbitnya UU No.23 Tahun 2014 dimana kewenangan pengawasan kegiatan pertambangan yang semula berada di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dialihkan ke Pemerintah Daerah Provinsi.

- f. Masih rendahnya prosentase wajib bayar yang menggunakan Sistem Informasi PNBPN Online (SIMPONI) dan menyampaikan bukti setornya sehingga menyulitkan dalam proses rekonsiliasi PNBPN dengan Kementerian Keuangan.
- g. Perubahan kebijakan terkait pelaksanaan anggaran tahun berjalan yang menyebabkan Unit harus menyesuaikan kembali kebutuhan anggarannya.
- h. Masih belum terintegrasinya sistem aplikasi monitoring anggaran belanja baik untuk kebutuhan pihak eksternal maupun internal kementerian.
- i. Dalam pengajuan revisi anggaran/usulan multiyears masih terdapat data yang tidak lengkap sehingga dibutuhkan SOP dalam proses pengajuannya.
- j. Masih banyak para pengelola keuangan pada Unit Eselon I yang belum paham atas proses serta alur pelaksanaan dan pelaporan anggaran.
- k. Banyaknya piutang macet yang belum dilaporkan dan belum diserahkan ke KPKNL.
- l. Belum stabilnya aplikasi SAIBA yang merupakan transformasi dari SAKPA, sehingga masih menjadi kendala dalam penyusunan laporan keuangan baik tingkat satker maupun tingkat kementerian sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- m. Dalam hal penyelesaian laporan hasil audit (LHA), masih banyak temuan – temuan yang sulit untuk ditindaklanjuti, sehingga saldo pada tiap rekonsiliasi tidak terlalu banyak berubah dan menjadi tantangan bagi pertanggungjawabannya.

### **C. PERALATAN**

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan peralatan, antara lain:

- a. Pada tahun 2015-2019, berdasarkan renstra KESDM, terdapat program peningkatan akses dan infrastruktur energi, yang menggunakan APBN, berupa penyediaan sarana dan/atau prasarana untuk diserahkan langsung kepada masyarakat, tanpa melalui pemerintah daerah, antara lain seperti penyediaan dan pendistribusian LPG 3 kg dan pendistribusian “paket motor kapal dan konverter kit” ke nelayan. Namun demikian, sampai saat ini belum terdapat peraturan pengelolaan BMN yang mengatur penyerahan langsung BMN kepada masyarakat, sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor eksternal yang menjadi kendala (ancaman) dalam pengelolaan BMN KESDM dalam rangka menjalankan program pemerintah tersebut.

- b. Terdapat aset di Kementerian ESDM yang diperoleh bukan dari belanja modal akan tetapi dari belanja barang (MAK 52), hal ini menunjukkan kurangnya ketepatan dalam hal perencanaan belanja anggaran.
- c. Kurangnya sinergitas antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Panitia Penerima Barang dan Jasa sehingga berdampak pada penyusunan Laporan Barang.
- d. Kurangnya pemahaman terkait akuntansi barang dan sistem pencatatannya.
- e. Kodefikasi BMN belum mencakup seluruh aset terutama aset KKKS.
- f. Aset pada PT PLN yang bersumber dari DIPA KESDM yang akan diusulkan menjadi Penyertaan Modal Pemerintah masih dalam pembahasan di tingkat DPR.
- g. Pemanfaatan aset belum dimanfaatkan secara optimal.
- h. Terhambatnya perizinan untuk pemanfaatan lahan, rumah dinas dan gedung perkantoran

#### **D. DOKUMEN**

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan dan penyiapan dokumen, antara lain:

##### **Perencanaan**

- a. Tuntutan keakuratan data/informasi dan kecepatan penyusunan dokumen pimpinan semakin tinggi.
- b. Meningkatnya tuntutan kerja sama bidang ESDM.
- c. Tuntutan Implementasi hasil kerja sama yang sudah ada (MoU) semakin tinggi.
- d. Pelaksanaan Sistem monitoring implementasi rencana kerja perlu ditingkatkan, adanya pengawasan oleh UKP4 maupun Kantor Staf Kepresidenan.

##### **Hukum**

- a. Perubahan aspek kegiatan usaha di sektor energi dan sumber daya mineral yang cepat dan dinamis, sehingga membutuhkan pengaturan sebagai payung hukumnya. Terkait dengan hal tersebut, dibutuhkan support dari unit teknis sebagai pemrakarsa, namun seringkali konsep yang diajukan masih belum matang dari sisi materi muatannya/substansi.
- b. Banyaknya peraturan yang bersifat insidentil di luar dari Program Legislasi dan Regulasi yang telah ditetapkan.

- c. Masih adanya peraturan perundang-undangan sektor ESDM yang tumpang tindih, tidak harmonis, dan dapat diinterpretasi berbeda.
- d. Koordinasi antar instansi dalam proses penyusunan peraturan teknis sering terhambat.
- e. Masih terbatasnya jumlah aparatur yang menangani penyusunan peraturan perundang-undangan sedangkan sektor ESDM mempunyai cakupan yang luas.
- f. Belum harmonisnya beberapa peraturan perundang-undangan sektor ESDM dengan peraturan perundang-undangan sektor lain.
- g. Masih adanya sifat ego sektoral dari instansi terkait dalam proses pembahasan penyusunan peraturan perundang-undangan sektor ESDM.
- h. Masih adanya peraturan daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sektor ESDM.
- i. Semakin maraknya permasalahan hukum yang diajukan oleh lembaga swadaya masyarakat atau pihak lain terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di sektor energi dan sumber daya mineral.
- j. Pelaksanaan proses litigasi sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal dalam penyelesaiannya antara lain jadwal pelaksanaan beracara, lamanya proses suatu perkara hingga putusan yang ditetapkan.
- k. Terbitnya peraturan lintas sektoral yang berkaitan dengan sektor ESDM yang kadang menimbulkan permasalahan baru khususnya bagi pelaku usaha pemegang kontrak/izin sektor ESDM. Terkait dengan hal tersebut, perlu dilakukan koordinasi yang lebih intensif antar kementerian/lembaga terkait agar regulasi sektor lain yang berkaitan dengan sektor ESDM tidak saling berbenturan antar kepentingan.
- l. Peralihan kewenangan pasca terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebabkan permasalahan baru terkait dengan adanya pembagian kewenangan pada masing-masing bidang, khususnya pengalihan yang sebelumnya merupakan kewenangan bupati/walikota menjadi kewenangan gubernur. Hal ini menyebabkan tidak berjalan dengan efektifnya pembinaan dan pengawasan pada sektor ESDM di daerah. Disamping hal tersebut diatas, juga meliputi pengalihan P3D dari kabupaten/kota kepada provinsi ataupun Pemerintah Pusat serta penyesuaian terhadap NSPK sektor ESDM.
- m. Adanya perkembangan ekonomi global yang sangat berpengaruh dalam kegiatan bisnis para pelaku usaha di sektor ESDM sering menimbulkan berbagai tuntutan dari para pelaku tersebut kepada

pemerintah untuk memberikan kebijakan-kebijakan tertentu yang sering tidak sejalan dengan peraturan maupun ketentuan yang ada dalam Kontrak Kerja Sama yang telah disepakati, sehingga diperlukan adanya penyesuaian terhadap Kontrak yang ada ataupun perubahan terhadap peraturan yang terkait sehingga iklim usaha yang dilaksanakan tetap kondusif.

- n. Kontrak/izin yang telah diterbitkan oleh Pemerintah yang membidangi ESDM atau oleh Instansi Pemerintah yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk menerbitkan izin atau melakukan perikatan dengan pihak lain dalam bentuk kontrak, dalam praktek pelaksanaan kontrak/izin sering ditemukan cadangan pada wilayah yang sama dengan komoditas yang berbeda, sehingga Kementerian ESDM sebagai penanggung jawab sektor ESDM perlu mengakomodir kebutuhan dunia usaha guna keberlangsungan *business process* yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam bentuk fasilitasi dalam pembentukan perjanjian pemanfaatan lahan secara bersama.

### **Pengelolaan Data dan Informasi**

Meskipun telah dilakukan beberapa langkah maju ke depan, namun dampak yang dihasilkan tidak semaksimal usaha yang dilakukan. Hal ini disebabkan oleh:

- a. Belum seluruh pegawai memiliki kompetensi Profesional (terkait dengan kompetensi *soft skills*) yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan di masa depan yang semakin kompleks.
- b. Meningkatnya tuntutan kerja sama bidang ESDM.
- c. Tuntutan Implementasi hasil kerja sama yang sudah ada (MoU) semakin tinggi.
- d. Pelaksanaan Sistem monitoring implementasi rencana kerja perlu ditingkatkan, adanya pengawasan Kantor Staf Kepresidenan KSP.
- e. Meskipun telah dilakukan beberapa langkah maju ke depan, namun dampak yang dihasilkan tidak semaksimal usaha yang dilakukan. Hal ini disebabkan oleh:
  - Data dan informasi sektor ESDM yang seluruhnya belum bisa diakses *online*.
  - Ketersediaan data sektor ESDM di daerah, masih relatif rendah.

## **II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

### **II.1 VISI**

“Menjadi pengelola Personalia, Pendanaan, Perlengkapan dan Dokumentasi (P3D) yang efisien, efektif, transparan, dan tepat waktu”.

### **II.2 MISI**

1. Mendorong pengembangan sistem manajemen SDM Aparatur yang profesional.
2. Meningkatkan fungsi dan peran kelembagaan dan ketatalaksanaan untuk pemberian pelayanan publik sesuai prinsip reformasi birokrasi.
3. Mengoptimalkan perencanaan dan penganggaran.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan peralatan.
5. Menyelenggarakan pengelolaan BMN melalui kebijakan dan informasi di bidang ESDM.
6. Mengembangkan, menyusun dan menyempurnakan perangkat legislasi dan regulasi sektor energi dan sumber daya mineral yang diselaraskan dengan reformasi hukum, kebijakan otonomi daerah dan tuntutan globalisasi.
7. Memberikan pelayanan prima dalam manajemen keuangan negara di lingkungan KESDM.
8. Mewujudkan pengelolaan data dan informasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral secara terintegrasi (*single window*).
9. Meningkatkan kepastian hukum dan memberikan bantuan hukum sektor ESDM.
10. Memfokuskan kerjasama dalam negeri dan luar negeri dalam rangka peningkatan jejaring kerja untuk mendukung pembangunan sektor ESDM.

### **II.3 TUJUAN STRATEGIS**

Tujuan Sekretariat Jenderal KESDM dalam kurun waktu 5 tahun sampai dengan tahun 2019 adalah :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan kerja sama sektor ESDM yang efektif dan efisien.



2. Meningkatkan tertib administrasi ketatausahaan, perlengkapan serta pelayanan kerumahtangaan dan keprotokolan di lingkungan Kementerian ESDM.
3. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian ESDM yang sesuai dengan kebutuhan.
4. Meningkatnya kualitas data dan informasi sektor ESDM yang lengkap, akurat dan tepat waktu.
5. Terwujudnya kepastian hukum sektor ESDM dalam rangka mendorong peningkatan.
6. Terwujudnya pelayanan prima perbendaharaan, administrasi pengelolaan dan informasi keuangan yang cepat, tepat, transparan serta akuntabel di lingkungan KESDM.
7. Meningkatnya kualitas pengelolaan SDM Aparatur dalam rangka peningkatan kompetensi SDM dan penataan organisasi.
8. Terlaksananya penetapan status penggunaan BMN bidang ESDM.
9. Meningkatnya pelayanan publik sektor ESDM.

#### **II.4 SASARAN STRATEGIS**

Sasaran merupakan hal-hal yang ingin dicapai oleh Setjen setiap tahun sejak tahun 2015 sampai tahun 2019. Sasaran ini berupa keluaran (*output*) maupun hasil (*outcome*) dari setiap kegiatan yang dilaksanakan unit-unit di lingkungan Sekretariat Jenderal KESDM.

1. Sasaran strategis yang terkait dengan tujuan **Meningkatnya kualitas pengelolaan SDM Aparatur dalam rangka peningkatan kompetensi SDM dan penataan organisasi, antara lain:**
  - Terlaksananya perencanaan dan pengembangan SDM Aparatur;
  - Terlaksananya pembinaan SDM Aparatur;
  - Terlaksananya pengembangan organisasi dan tata laksana;
  - Terwujudnya tertib administrasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang tepat waktu, akurat, transparan dan akuntabel di lingkungan KESDM.
2. Sasaran strategis yang terkait dengan tujuan **meningkatkan kualitas perencanaan dan kerja sama sektor ESDM yang efektif dan efisien**

Dalam rangka mencapai tujuan mewujudkan kualitas perencanaan dan kerja sama sektor ESDM yang efektif dan efisien pada akhir tahun 2019, Sekretariat Jenderal KESDM menetapkan beberapa **sasaran yang akan dicapai secara tahunan, pertama** tersedianya dokumen perencanaan yang sinergis. Sinergis dalam konteks ini dimaknai sebagai sebuah kondisi

yang sinkron dan harmonis. Sinkron berarti tidak ada tumpang tindih maupun pengulangan kegiatan dan harmonis berarti semua kegiatan berharmoni, saling mendukung dalam rangka mencapai satu tujuan bersama. **Kedua** terwujudnya perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. Sebagai pengejawantahan kebijakan nasional untuk menciptakan sistem perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efisien, seluruh instansi pemerintahan termasuk KESDM diharuskan untuk mengikuti prinsip-prinsip implementasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang mengharuskan adanya target kinerja, standar biaya untuk keluaran serta dilakukannya evaluasi terhadap kinerja. **Ketiga**, terkendalinya pelaksanaan kegiatan yang ada dalam rencana strategis dan dokumen perencanaan lainnya, hal ini sangat vital untuk menjaga siklus perencanaan yang berkesinambungan karena evaluasi secara berkala berfungsi untuk mengantisipasi penyimpangan arah kegiatan serta sebagai *feedback* bagi perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan selanjutnya sehingga akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan. **Keempat**, terlaksananya kesepakatan kerja sama yang mendukung prioritas rencana strategis. Di tengah keterbatasan baik dari segi pendanaan, kapasitas, maupun kemampuan keteknikan yang dimiliki oleh sektor ESDM, diperlukan dukungan dari dalam maupun luar negeri melalui kerja sama yang mengutamakan keuntungan dan manfaat bagi semua pihak dalam rangka meningkatkan pendanaan bagi pembangunan sektor ESDM, peningkatan *capacity building* serta peningkatan kemampuan keteknikan pengelolaan sektor. Namun, seluruh kerja sama yang dilaksanakan perlu difokuskan untuk mendukung prioritas pembangunan sektor ESDM yang tertuang dalam rencana strategis dan prioritas nasional jangka pendek maupun jangka menengah.

3. Sasaran strategis yang terkait dengan tujuan **Terwujudnya pelayanan prima perbendaharaan, administrasi pengelolaan dan informasi keuangan yang cepat, tepat, transparan serta akuntabel di lingkungan KESDM, antara lain:** Terwujudnya pembinaan pengelolaan PNBPN yang optimal di Lingkungan KESDM;
  - Terwujudnya pengelolaan anggaran belanja yang efektif dan efisien di lingkungan KESDM;
  - Terwujudnya pelayanan prima perbendaharaan yang cepat, tepat dan akurat;
4. Sasaran strategis yang terkait dengan tujuan **Terwujudnya kepastian hukum sektor ESDM dalam rangka mendorong peningkatan investasi sektor ESDM**

**Tabel 2.1. Sasaran Strategis Biro Hukum 2015 – 2019**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
Terwujudnya kepastian	Menyusun rancangan peraturan perundang-undangan sektor ESDM	Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan sektor ESDM

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
hukum sektor ESDM dalam rangka mendorong peningkatan investasi Sektor ESDM	yang menunjang prioritas nasional	yang menunjang prioritas nasional
	Menyusun dan Melaksanakan Pertimbangan Hukum	Jumlah Pertimbangan Hukum
	Melaksanakan proses penyelesaian permasalahan hukum Kementerian ESDM di dalam dan di luar Lembaga Peradilan yang bersifat nasional yang diselesaikan atau dalam proses penyelesaian	Jumlah permasalahan hukum Kementerian ESDM di dalam dan di luar Lembaga Peradilan yang bersifat nasional yang diselesaikan atau dalam proses penyelesaian

5. Sasaran strategis yang terkait dengan tujuan **Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian ESDM yang sesuai dengan kebutuhan**

Dalam rangka dukungan operasional perkantoran yang optimal serta kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan KESDM maka perlu ketersediaan sarana dan prasarana kerja, Sehubungan dengan kebijakan nasional dalam efektivitas dan efisiensi anggaran, maka penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja aparatur diupayakan memenuhi persyaratan standarisasi sarana dan prasarana kerja aparatur negara.

Selain itu terdapat pula Sasaran strategis yang terkait dengan tujuan **Meningkatkan tertib administrasi ketatausahaan, perlengkapan serta pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan di lingkungan Kementerian ESDM**

Dalam upaya meningkatkan tertib administrasi ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan KESDM hingga akhir tahun 2019, maka ditetapkan beberapa sasaran yang akan dicapai secara tahunan. **Pertama, terwujudnya kelancaran pelaksanaan persuratan dinas dan penyelamatan arsip KESDM yang bernilai guna, vital dan permanen.** Sebagai sarana komunikasi kedinasan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan maka sudah seharusnya pengelolaan surat dinas dilakukan dari tahap penciptaan, berlanjut dengan tahap penggunaan dan berakhir pada tahap pelestarian fisik dan informasinya. Terciptanya kelancaran pelaksanaan persuratan dinas akan mendorong pencapaian tujuan organisasi secara **efektif dan efisien.**

Tata persuratan dinas merupakan sub sistem dari tata kearsipan, arsip tercipta sebagai konsekuensi logis dari pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Kementerian ESDM. Melalui arsip akan terekam perencanaan, pelaksanaan sekaligus pelaporan kegiatan yang menjadi bahan bukti

pertanggungjawaban institusi. Informasi yang terkandung dalam arsip yang tercipta di lingkungan KESDM bernilai vital dan strategis, untuk itu perlu upaya penyelamatan terhadap arsip KESDM yang bernilai vital dan permanen. **Kedua, terciptanya kelancaran administrasi dan pelayanan perlengkapan.** Administrasi perlengkapan meliputi analisis kebutuhan, pengadaan dan inventarisasi barang. Ketiga hal tersebut saling terkait satu sama lain, kelancaran administrasi analisis kebutuhan dan inventarisasi barang merupakan langkah awal bagi optimalisasi sarana dan prasarana kerja aparatur Setjen KESDM. Sedangkan kelancaran administrasi pengadaan barang dan jasa berkontribusi terhadap **efisiensi anggaran** pembangunan sektor ESDM dan mendukung kebijakan nasional dalam meningkatkan indeks persepsi korupsi. **Ketiga, terciptanya kelancaran administrasi dan pelayanan kerumahtanggaan** Dalam rangka dukungan operasional perkantoran yang optimal bagi kenyamanan kerja serta peningkatan citra pelayanan publik maka diperlukan pelayanan kerumahtanggaan yang meliputi urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan lingkungan dan keperluan rumah tangga kantor lainnya serta pemeliharaan sarana dan prasarana kerja. **Keempat, terlaksananya administrasi penjadwalan pimpinan dan pelayanan keprotokolan.** Untuk menjamin kelancaran tugas pimpinan KESDM maka perlu pengadministrasian jadwal pimpinan yang tepat. Selain itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pengaturan protokol diperlukan bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, dan Tokoh Masyarakat. Keprotokolan merupakan serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.

6. Sasaran strategis yang terkait dengan tujuan **Meningkatnya kualitas data dan informasi sektor ESDM yang lengkap, akurat dan tepat waktu**

Dalam rangka mencapai tujuan meningkatnya kualitas data dan informasi sektor ESDM yang lengkap, akurat, dan tepat waktu pada akhir tahun 2019, Sekretariat Jenderal KESDM menetapkan beberapa sasaran yang akan dicapai secara tahunan.

**Pertama** meningkatnya daya dukung pengelolaan data dan informasi sektor ESDM. Untuk meningkatkan daya dukung pengelolaan data dan informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu diperlukan sistem pengelolaan data terpadu secara nasional dengan menggunakan teknologi dan sistem informasi mutakhir serta mempunyai SDM yang handal dan format standar yang baku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Kedua** meningkatnya penyajian data dan informasi yang update mengandung arti bahwa pusdatin akan terus memperbaharui data yang dipublikasi setiap bulan dengan target pemutakhiran M-1(data terbaru satu bulan sebelumnya).

**Ketiga** meningkatnya kualitas kajian data dan informasi ESDM melalui *update* data secara kontinue melalui *offline* (data bulanan) dari unit terkait dan *online* yang bersumber dari unit di lingkungan KESDM, instansi terkait baik dalam maupun luar negeri.

**Keempat** meningkatnya ketersediaan (*continuity of service*) infrastruktur teknologi informasi dalam mendukung penyediaan, penyajian, dan kajian data dan informasi ESDM. Ketersediaan data yang dimaksud adalah tersedianya data dan informasi sektor ESDM yang akurat sehingga data-data yang dipublikasi dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Indikator dan target yang ingin dicapai tahun 2010 – 2014 disajikan pada tabel di bawah ini.

7. Sasaran strategis yang terkait dengan tujuan **Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Profesional, Akuntabel dan Transparan di Bidang Energi Sumber Daya Mineral Dalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, antara lain:**

- Meningkatkan Realisasi Anggaran Satker PPBMN.
- Mewujudkan Laporan Bagian Tata Usaha untuk urusan perencanaan, Kepegawaian, administrasi keuangan KPA.
- Mewujudkan Laporan penatausahaan BMN di Bidang ESDM.
- Meningkatkan Penetapan Status Penggunaan BMN.
- Terlaksananya pemindahtanganan, penghapusan dan pemanfaatan BMN bidang ESDM.
- Menyusun Kebijakan teknis dan Melaksanakan pembinaan pengamanan, pembinaan pengawasan dan pengendalian BMN.
- Menyusun kebijakan teknis pemeliharaan BMN.
- Menyusun perencanaan dan realisasi pemeliharaan Barang Milik Negara.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemeliharaan Barang Milik Negara.

8. Sasaran strategis yang terkait dengan tujuan **Meningkatkannya pelayanan publik sektor ESDM**

Sasaran strategis yang ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan Puskomblin menjadi garda terdepan Kementerian ESDM adalah indeks kepuasan publik yang di atas rata-rata.

### **III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

#### **III.1 KEBIJAKAN**

Kebijakan yang diterapkan untuk mencapai tujuan Sekretariat Jenderal adalah :

1. Penataan sumber daya manusia aparatur disesuaikan dengan kebutuhan terhadap jumlah, kompetensi dan distribusi pegawai secara proporsional.
2. Peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara di KESDM.
3. Peningkatan fasilitas kerja dan kesejahteraan pegawai.
4. Pemanfaatan hasil evaluasi kinerja dalam perencanaan dan penganggaran.
5. Perencanaan dan pelaksanaan kerjasama dilaksanakan dengan mendahulukan azas manfaat bagi peningkatan kinerja sektor.
6. Peningkatan koordinasi dalam penyelesaian dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait sektor ESDM.
7. Peningkatan pelayanan data dan informasi ESDM untuk mendukung pengambilan keputusan.
8. Mendukung peningkatan manajemen terutama urusan pengelolaan Barang Milik Negara dan juga mewujudkan kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara di Bidang ESDM yang akurat dan akuntabel.
9. Mewujudkan kepercayaan dan partisipasi publik melalui layanan informasi yang dilakukan oleh Puskomblin yaitu melalui website [esdm.go.id](http://esdm.go.id), Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dan media sosial.

#### **III.2 STRATEGI**

##### **1. Bidang Kepegawaian dan Organisasi**

Pengembangan organisasi dan tata laksana dilakukan sejalan dengan program Reformasi Birokrasi di Kementerian ESDM. Hal ini mengingat aspek kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (*business process*) merupakan dua dari tiga aspek dalam reformasi birokrasi. Secara umum, pengembangan organisasi dan tata laksana dilakukan melalui upaya restrukturisasi organisasi (kelembagaan) pemerintahan dan menyederhanakan sistem kerja, prosedur dan mekanisme kerja. Selain itu, dilakukan pula pengembangan jabatan melalui analisis dan evaluasi jabatan. Peran Sekretariat Jenderal sebagai pembina kepegawaian unit-unit di lingkungan Kementerian ESDM cukup strategis mengingat reformasi birokrasi menekankan pada penguatan unit kerja/organisasi kepegawaian. Untuk mencapai target dan sasaran dalam bidang kepegawaian dan organisasi, beberapa strategi akan

dilaksanakan, untuk sasaran tersedianya pegawai negeri sipil yang profesional, netral, sejahtera dan akuntabel, akan dicapai dengan cara melaksanakan perencanaan dan pengadaan pegawai yang sesuai dengan kompetensi jabatan yang didasarkan pada analisis beban kerja. Oleh karena itu, Kementerian ESDM sedang dan akan terus melaksanakan kegiatan Analisis Beban Kerja yang melibatkan seluruh unit utama.

Pada tahun 2016 ini, Biro Kepegawaian dan Organisasi memiliki sejumlah isu strategis yang menjadi acuan terselenggaranya pembinaan kepegawaian Kementerian ESDM sebagaimana Tabel 3.1 berikut :

**Tabel 3.1. Isu Strategis Biro Kepegawaian dan Organisasi**

No.	Isu Strategis	Kegiatan
1	Pengembangan Karier Pegawai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seleksi Tugas Belajar bekerja sama dengan Biro Pelayanan dan Informasi Psikologi, Universitas Padjadjaran.</li> <li>2. Pemetaan kebutuhan peningkatan kompetensi pegawai dalam bidang teknis ESDM.</li> </ol>
2	Internalisasi Nilai-Nilai KESDM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Leaders Camp 6 angkatan untuk Eselon III dan IV, Change Leadership dari Rumah Perubahan untuk Eselon II KESDM.</li> <li>2. Pelatihan bidang keuangan untuk pengelola keuangan unit kerja sama dengan STAN.</li> </ol>
3	Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyertaan diklat <i>Executive Training on Extractive Industries and Sustainable Development</i></li> <li>2. Mengikuti sertakan dalam <i>Pertamina Leadership Development Program</i> bagi Pejabat Eselon III ke bawah.</li> <li>3. Penyertaan program <i>Pertamina Global Executive Development Program</i> bagi Pejabat Eselon II.</li> <li>4. Pelatihan tentang teknik diplomasi, negosiasi dan mengikuti perjamuan resmi kerjasama dengan Badan Diklat Kemenlu.</li> </ol>
4	Penyusunan Sistem Pengembangan SDM Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan HR Blue Print.</li> <li>2. Penyusunan Pola Rotasi dan Mutasi PNS.</li> </ol>
5	Rotasi dan Mutasi Pegawai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Assesment bagi Pejabat Struktural Eselon III dan IV KESDM.</li> <li>2. Seleksi terbuka bagi Jabatan Pimpinan Tinggi (Eselon I dan II).</li> </ol>

No.	Isu Strategis	Kegiatan
		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Rotasi, mutasi dan promosi untuk jabatan Eselon III dan Eselon IV dalam unit atau antar unit di lingkungan KESDM.</li> <li>4. Rotasi dan Mutasi Pejabat Fungsional Umum dalam unit atau antar unit di lingkungan KESDM.</li> <li>5. Pengalihan Personil yang menduduki jabatan fungsional Inspektur Tambang dan Inspektur Migas dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota kepada KESDM.</li> </ol>
6	Seleksi Anggota Komite BPH Migas dan Kepala BPMA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seleksi Ketua dan Anggota komite BPH Migas.</li> <li>2. Seleksi Kepala BPMA sesuai surat Gubernur Aceh Nomor 540/2521 tanggal 11 Februari 2016.</li> </ol>
7	Kinerja Pegawai dan Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbaiki tunjangan kinerja pegawai dari Tukin saat ini 70 (tujuh puluh) persen.</li> <li>2. Melalui penyusunan insentif capaian kinerja organisasi.</li> <li>3. Pengembangan Rencana Kerja Individu (RKI) dan Rencana Kerja Organisasi (RKO).</li> <li>4. Sinergitas dan <i>alignment</i> kinerja individu dan kinerja organisasi.</li> <li>5. Komitmen pelaksanaan zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Bersih Melayani (WBBM).</li> <li>6. Penyelenggaraan kompetisi laporan kinerja antar unit eselon I di lingkungan Kementerian ESDM.</li> </ol>
8	Pengembangan sistem informasi dan <i>e-government</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan sistem <i>alfresco</i>, sebagai aplikasi <i>web based</i> : <i>document management, record management, work flow</i> dan <i>content management</i>.</li> <li>2. Pengembangan aplikasi <i>online survey</i>.</li> <li>3. Pengembangan aplikasi untuk internalisasi / sosialisasi program-program reformasi birokrasi.</li> <li>4. Implementasi otomasi hukuman disiplin.</li> </ol>



No.	Isu Strategis	Kegiatan
		5. Pengembangan database pegawai. 6. Pembentukan Komite Pengarah Informasi dan <i>E-Government</i> di tingkat kementerian.
9	Penataan Organisasi Kementerian ESDM	1. Rencana pembentukan Direktorat Jenderal Konservasi Energi. 2. Pembentukan kantor Perwakilan ESDM Indonesia Timur, untuk mendukung program Indonesia Terang. 3. Pembentukan unit kerja sama luar negeri, untuk melaksanakan operasionalisasi keanggotaan Indonesia dalam forum internasional bidang energi. 4. Pembentukan BPMA sebagai implementasi UU No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan PP No. 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh. 5. Penataan museum di lingkungan KESDM.
10	Tata Laksana dan Manajemen Perubahan	1. Kompetisi laporan kinerja unit eselon I KESDM. 2. Lomba Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Nasional. 3. Audit kelembagaan untuk seluruh unit eselon I Kementerian ESDM. 4. Penyusunan bisnis proses. 5. Penanganan benturan kepentingan dalam proyek infrastruktur sektor ESDM dalam bentuk MOU dengan K / L / D dan atau lembaga terkait.

## 2. Bidang Perencanaan dan Kerja Sama

Dalam bidang perencanaan dan kerja sama, beberapa strategi akan diterapkan untuk mencapai sasaran yang telah dibahas sebelumnya. Sasaran tersedianya dokumen perencanaan yang sinergis akan dicapai dengan cara melaksanakan sinkronisasi dan harmonisasi internal KESDM yaitu dengan unit-unit di lingkungan KESDM. Kemudian, juga akan dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi eksternal dengan pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya. Proses sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan ini

merupakan sebuah proses yang tidak mudah, oleh karena itu kegiatan ini perlu dilaksanakan dengan serius dan memerlukan koordinasi yang intensif dengan seluruh *stakeholders* sektor ESDM.

Sasaran terwujudnya perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja akan dicapai dengan cara menetapkan target kinerja, menetapkan standar biaya serta melaksanakan evaluasi kinerja. Ketiga proses tersebut merupakan satu kesatuan yang bertujuan menciptakan sebuah siklus perencanaan yang berkelanjutan, efektif dan efisien. Khususnya pada proses evaluasi kinerja, akan dilaksanakan secara berkala dan melibatkan para *stakeholders*.

Untuk sasaran terkendalinya pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam rencana strategis dan dokumen perencanaan lainnya akan dicapai dengan cara melaksanakan monitoring dan review kegiatan rencana strategis dan dokumen perencanaan lainnya secara berkala. Aspek-aspek yang akan dipantau meliputi kesesuaian antara target kinerja dengan standar biaya yang telah ditetapkan dan hasil yang dicapai sehingga dapat diketahui kelemahan dan kekurangan ketika merencanakan suatu kegiatan.

Kemudian untuk sasaran terlaksananya kesepakatan kerja sama yang mendukung prioritas rencana strategis akan dicapai dengan cara menetapkan roadmap kerja sama sektor ESDM yang mengacu pada prioritas dan permasalahan sektor ESDM yang tertuang dalam rencana strategis sehingga ada panduan yang jelas tentang arah dan kebijakan ketika merencanakan kerja sama di sektor ESDM. Kemudian dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama yang telah disepakati maupun yang sedang diimplementasikan agar sektor ESDM dapat memperoleh manfaat optimal dari setiap kesepakatan kerja sama yang dihasilkan.

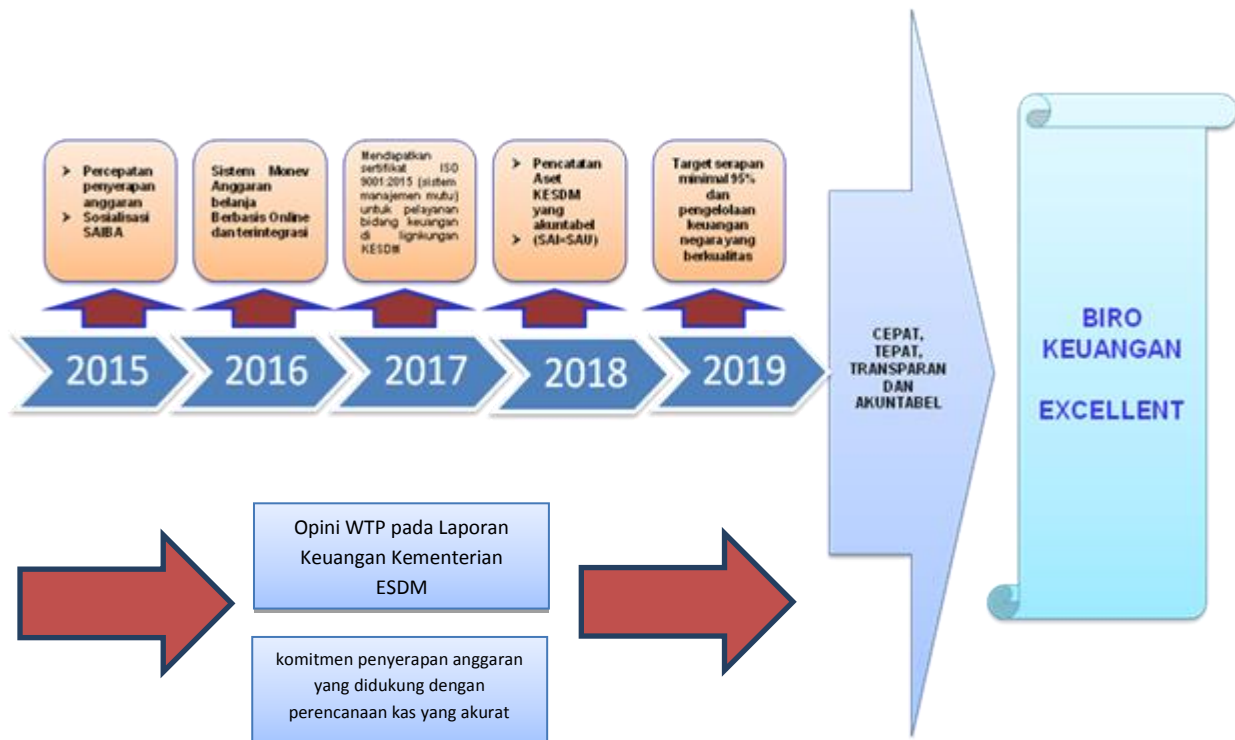
### **3. Bidang Keuangan**

Arah kebijakan Biro Keuangan ditetapkan dalam upaya peningkatan pelayanan Biro Keuangan yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel menuju Biro Keuangan yang unggul (*excellent*).

Arah kebijakan tersebut berupa:

- Optimalisasi PNBK;
- Penyerapan anggaran yang optimal dan berkualitas;
- Optimalisasi pelayanan perbendaharaan;
- Peningkatan akuntabilitas pelaporan keuangan.

Dalam rangka upaya peningkatan pelayanan Biro Keuangan yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel menuju Biro Keuangan yang unggul (*excellent*), Sekretariat Jenderal KESDM menerapkan langkah-langkah seperti pada bagan berikut:



**Gambar 3.1. Rencana Aksi Biro Keuangan 2015-2019**

Rencana aksi pada gambar di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Tahun 2015 – 2019

1) Kembali meraih opini WTP pada laporan keuangan Kementerian ESDM, dengan melaksanakan:

- Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan berbasis akrual;
- Pembenahan pengelolaan penerimaan PNBPNP antara lain dengan pembentukan Tim peningkatan akuntabilitas PNBPNP subsektor mineral dan batubara, kerjasama dengan Ditjen. Perbendaharaan - Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia terkait keakuratan data PNBPNP;
- Percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan BPK-RI.

2) Setiap awal tahun masing-masing Eselon I menandatangani komitmen penyerapan anggaran yang didukung dengan perencanaan kas yang akurat.

b. Tahun 2015

1) Melakukan percepatan penyerapan anggaran dengan pembentukan Unit Percepatan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur (UP3I) yang secara khusus memonitor pelaksanaan anggaran, khususnya terkait proyek strategis;

2) Melakukan sosialisasi dan bimtek Sistem Akuntansi Berbasis Akrual (SAIBA) yang mulai diterapkan pada Laporan Keuangan TA.2015.

c. Tahun 2016

Membangun sistem Monev online pelaksanaan anggaran belanja bersama Pusdatin untuk internal KESDM dengan mengintegrasikan data SiRUP, data RKAKL, format kendali hulu – hilir dan realisasi anggaran.

d. Tahun 2017

Mendapatkan sertifikat ISO 9001:2015 (sistem manajemen mutu) untuk pelayanan bidang keuangan di lingkungan KESDM. Untuk memperoleh sertifikasi tersebut, Biro keuangan akan menginventarisir dan memperbaharui beberapa SOP bidang keuangan antara lain SOP pengelolaan Penerimaan PPNBP sektor ESDM, SOP terkait perbendaharaan, SOP terkait pelaksanaan anggaran belanja, dan SOP lainnya dibidang keuangan dengan sedapat mungkin memotong rantai birokrasi tanpa melanggar aturan sehingga dihasilkan standar operasi yang efisien dan efektif.

e. Tahun 2018

- 1) Mewujudkan pencatatan asset KESDM yang akuntabel, khususnya pembinaan dalam hal penyajian laporan asset pada laporan keuangan KESDM;
- 2) Membangun sistem *monev online* pengelolaan PPNBP yang terintegrasi dengan Kas Negara sehingga terdapat kesamaan data PPNBP antara Sistem Akuntansi Instansi (SAI) KESDM dengan Sistem Akuntansi Umum (SAU) Kementerian Keuangan.

f. Tahun 2019

- 1) Mendorong realisasi penyerapan anggaran agar semakin meningkat sehingga mencapai minimal 95% dari total pagu pada tahun 2019;
- 2) Mendorong peningkatan kualitas belanja negara yang efektif dan efisien;
- 3) Menerapkan pengelolaan keuangan negara yang berkualitas sejak perencanaan sampai pelaporan.

#### **4. Bidang Hukum**

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian ESDM Tahun 2015-2019, Salah satu pilar dalam upaya untuk mewujudkan *good governance* di lingkungan Kementerian ESDM adalah penataan peraturan perundang-undangan. Hal ini menjadi penting, karena apabila tahapan proses pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan secara akuntabel, akan muncul peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, disharmonis atau dapat diinterpretasi berbeda sehingga seringkali tidak dapat diimplementasikan sesuai dengan tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Program kegiatan dalam area penguatan penataan peraturan perundang-undangan mempunyai sasaran terwujudnya

kepastian hukum bidang ESDM dalam rangka mendorong peningkatan investasi. Ukuran keberhasilan program penataan perundang-undangan adalah dengan meningkatnya efektifitas penerapan peraturan perundang-undangan. penguatan koordinasi dengan Unit Utama KESDM terutama bagian yang memiliki tugas dan fungsi bidang perundang-undangan maupun dengan Kementerian/ Lembaga terkait guna menyusun peraturan perundang-undangan bidang ESDM yang lebih implementatif.

Arah kebijakan dan Strategi Biro Hukum yang dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Tersedianya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders) strategi yang dilakukan dengan perumusan peraturan yang sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.
- b. Semakin berkurangnya jumlah peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis, tumpang tindih dan tidak sinkron. Strategi yang dilakukan dengan melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak sinkron atau tidak harmonis dengan instansi lain.
- c. Meningkatnya peran serta dukungan publik dalam perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Strategi yang dilakukan dengan mengadakan konsultasi publik yang menghadirkan pemangku kepentingan (stakeholder), praktisi dan akademisi.
- d. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Strategi yang dilakukan dengan melakukan penyebarluasan peraturan perundang-undangan (regulasi) bidang ESDM melalui website *jdih.esdm.go.id* sehingga pencarian informasi hukum berupa peraturan perundang-undangan bidang ESDM dapat dilakukan secara cepat, tepat dan akurat.
- e. Meningkatnya sinergi antar instansi pemerintah dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang ESDM. Strategi yang dilakukan dengan memaksimalkan koordinasi antar instansi dalam proses penyusunan peraturan teknis.
- f. Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang mampu melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim usaha yang kondusif. Strategi yang dilakukan dengan melakukan identifikasi peraturan perundang-undangan yang diterbitkan, pemetaan peraturan perundang-undangan yang harus dibentuk sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
- g. Proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang cepat, efektif, dan efisien strategi strategi yang dilakukan dengan melakukan perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan tahunan maupun jangka panjang melalui program legislasi dan regulasi bidang ESDM untuk Tahun 2015-2019.
- h. Terciptanya iklim investasi di sektor ESDM dengan mengedepankan kepastian berusaha dan kepastian hukum (sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku).

Strategi dan Rencana Aksi yang akan dilakukan Biro Hukum guna menunjang tujuan dengan cara sebagai berikut :

- a. Pemberian masukan atau telaahan terhadap konsep peraturan perundang-undangan di sektor ESDM sebelum ketentuan tersebut diundangkan.
- b. Pemberian masukan atau telaahan terhadap konsep peraturan perundang-undangan sektor lain yang berkaitan dengan perusahaan di sektor ESDM.
- c. Inventarisasi permasalahan yang terjadi di lapangan dan melakukan koordinasi dengan unit teknis terkait atau dengan stakeholder terhadap permasalahan hukum yang terjadi.
- d. Melakukan analisa dan kajian dari sisi peraturan perundang-undangan terhadap langkah-langkah yang akan di ambil oleh pimpinan.
- e. Memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi stakeholder yang belum menempuh jalur hukum maupun penanganan perkara di sektor ESDM pada lembaga peradilan.

## **5. Bidang Umum**

Dalam bidang administrasi katatausahaan, perlengkapan serta pelayanan kerumahtangan dan keprotokolan beberapa strategi akan diterapkan untuk mencapai sasaran yang telah dibahas sebelumnya. Sasaran terwujudnya kelancaran pelaksanaan persuratan dinas dan penyelamatan arsip KESDM yang bernilai guna vital dan permanen bisa tercapai dengan menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar kerja bidang persuratan dinas dan kearsipan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan persuratan dinas dan kearsipan di lingkungan KESDM, melakukan pembinaan dan koordinasi terhadap unit kerja katatausahaan di lingkungan KESDM secara terpadu dan berkesinambungan serta optimalisasi Gedung Pusat Arsip KESDM sebagai *record center* dalam rangka perlindungan dan penyelamatan khasanah arsip KESDM yang bernilai guna vital dan permanen.

Untuk sasaran terciptanya kelancaran administrasi dan pengelolaan perlengkapan dapat dicapai dengan cara penyusunan dan penyempurnaan pedoman/ standar kerja dan pembinaan di bidang pengadaan barang dan jasa di lingkungan KESDM. Di samping itu pemetaan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kerja Pimpinan KESDM dan aparatur Setjen KESDM dan distribusi dan inventerisasi BMN di lingkungan Setjen KESDM.

Dalam hal pencapaian sasaran Terciptanya kelancaran administrasi dan pelayanan kerumahtanggaan, cara yang dapat dilakukan adalah dengan penyusunan prosedur/ standar kerja dan pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja pimpinan KESDM serta aparatur di lingkungan Setjen KESDM, melaksanakan pelayanan Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan (K3) dan dukungan operasional perkantoran di lingkungan Setjen KESDM.

Sasaran terciptanya kelancaran administrasi penjadwalan pimpinan dan pelayanan prima keprotokolan dapat dicapai melalui pelaksanaan penyusunan administrasi penjadwalan pimpinan, melakukan penyusunan/ penyempurnaan/ penelaahan prosedur dan standar kerja keprotokolan serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait guna kelancaran tugas pimpinan.

Sasaran terwujudnya sarana dan prasarana kerja pimpinan KESDM dan aparatur Setjen KESDM sesuai dengan standarisasi dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja.

## **6. Bidang Data dan Informasi ESDM**

Dalam bidang data dan informasi ESDM, beberapa strategi akan diterapkan untuk mencapai sasaran yang telah dibahas sebelumnya. Sasaran meningkatnya daya dukung pengelolaan data dan informasi sektor ESDM akan dicapai dengan cara melaksanakan koordinasi dan konsolidasi yang lebih intensif dengan unit-unit terkait, mitra kerja dan *stakeholder* lainnya, mengembangkan sistem pengelolaan data terpadu dan menyusun regulasi dan pedoman/*Standard Operating Procedure (SOP)* serta menjaga mutu dan kegunaan serta nilai tambah data dengan melakukan peremajaan, alih media data dan *prospectivity evaluation* serta meningkatkan kapasitas SDM dan infrastruktur.

Sasaran meningkatnya penyajian data dan informasi yang *up to date* akan dicapai melalui pembuatan format data dan informasi yang disesuaikan dengan kebutuhan para pemangku kepentingan. Selain itu, mengembangkan sistem manajemen database ESDM serta membangun sistem pengelolaan data spasial KESDM yang integratif (yang memuat *link* ke seluruh database spasial yang dikelola unit-unit kerja KESDM) sehingga proses pengiriman dan penerimaan data dilakukan secara *online*. Dalam upaya menyediakan data dan informasi yang akurat adalah membuat regulasi dan pedoman penyelenggaraan *data clearing house* serta melakukan sinkronisasi dan konsolidasi data dan informasi ESDM secara periodik.

Sasaran meningkatnya kualitas kajian data dan informasi ESDM akan dicapai melalui berbagai pendidikan dan pelatihan; meningkatkan fasilitas dan infrastruktur yang bisa mendukung kegiatan kajian seperti buku-buku literatur, jaringan internet dan lain-lain; serta meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait mengenai data dan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kajian.

Sasaran meningkatnya ketersediaan (*continuity of service*) infrastruktur teknologi informasi dalam mendukung penyediaan, penyajian, dan kajian data dan informasi ESDM dapat dicapai melalui infrastruktur TI sebagai penopang utama integrasi layanan data dan informasi *on-line* di lingkungan KESDM dan lintas kementerian (*National Single Window, JDSN*). Layanan infrastruktur TI yang handal, menjamin pertukaran data berjalan lancar dan berdampak pada sistem pengambilan keputusan yang didukung dengan data-data yang *up to date*.

Selain itu, saat ini Pusdatin menjadi penanggung jawab dalam hal penyusunan kebijakan satu peta (*one map policy*) bidang ESDM. *One Map Policy* adalah kebijakan satu peta skala 1:50.000 di seluruh Indonesia. Saat ini program *one map policy* yang sudah berjalan di Kementerian ESDM yakni **Minerba One Map Indonesia (MOMI)**. MOMI merupakan Sistem Informasi Geografis Wilayah Pertambangan berbasis web sebagai bagian dari semangat transparansi, akuntabilitas dan kolaboratif, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sistem ini merupakan basis data seluruh wilayah pertambangan yang ada di Indonesia, dimana saat ini MOMI telah terinput 10.338 IUP, 74 PKP2B dan 34 KK.
2. MOMI telah mengintegrasikan data dari sub sektor/sektor lain seperti: peta PLTU, peta kawasan hutan, peta batas administrasi, peta tersus, peta blok migas dan peta tematik lainnya.
3. MOMI mampu mengintegrasikan data spasial Kementerian/Lembaga dalam satu interface secara bersamaan.
4. MOMI dapat diakses dari manapun dan kapanpun di seluruh dunia.
5. MOMI merupakan salah satu yang aplikasi yang mendukung kebijakan “*one map policy*” Indonesia.

## **7. Bidang Hubungan Masyarakat**

Dalam upaya mewujudkan kepercayaan dan partisipasi publik, layanan informasi yang dilakukan oleh Puskombluk yaitu melalui website [esdm.go.id](http://esdm.go.id), Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dan media sosial. Adapun strategi/rencana aksi yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

- Memperbarui tampilan website [esdm.go.id](http://esdm.go.id) agar lebih menarik. Pembaruan website [esdm.go.id](http://esdm.go.id) dimulai pada 2015 dengan menggunakan jasa pihak ketiga. Pekerjaan yang dilakukan adalah memperbarui *back-end website* dari yang tadinya Joomla menjadi CMS, memperbarui tampilan *front-end* dengan menitikberatkan pada berita dan galeri, dan penambahan tautan ke Twitter resmi Kementerian ESDM.
- Mengumpulkan semua aplikasi layanan KESDM di halaman utama website [esdm.go.id](http://esdm.go.id) untuk memudahkan publik dalam mencari alamat situs maupun info pelayanan. Tujuannya agar pintu pelayanan menjadi satu, sehingga publik tidak perlu menghafal berbagai macam alamat situs pelayanan.
- Selalu memperbarui berita baik versi Indonesia maupun Inggris. Hal ini dikarenakan pengunjung website [esdm.go.id](http://esdm.go.id) tidak hanya publik Indonesia, tapi juga masyarakat luar. Bahkan hit berita versi Inggris lebih banyak daripada versi Indonesia.



- Menyeragamkan tampilan website di bawah domain esdm.go.id agar publik merasa familiar jika mengakses website unit manapun. Keseragaman lebih ditekankan pada *header*, *body layout*, *footer*, dan konten yang terkandung di dalamnya.
- Saling berkoordinasi dengan unit dalam menyusun berita, terutama yang menyentuh publik secara langsung atau membutuhkan klarifikasi jika keluar, misalnya Blok Masela atau program listrik 35.000 MW.
- Mempercepat proses LAPOR dan PPID. Perlu ditunjuk PIC LAPOR dan PPID masing-masing unit sehingga mempercepat proses pelayanan informasi.
- Membangun aplikasi PPID Online untuk mempermudah publik dalam memantau status permohonan informasi. Aplikasi ini dikerjakan dengan bantuan pihak ketiga.
- Mengelola konten media sosial ESDM (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) dengan lebih interaktif, termasuk di dalamnya mengunggah infografis, videografis, kuis, dan live tweet dalam setiap kegiatan KESDM. Oleh karena itu dibutuhkan pembelian alat peliputan dan dokumentasi agar dapat mendukung kegiatan tersebut.
- Pengembangan perpustakaan sebagai front *office* pengetahuan masyarakat di Gedung Heritage Setjen KESDM.
- Pengembangan ESDM TV.

Pada tahun 2017, Puskomblin akan menjadi koordinator pameran KESDM di Kazakhstan, juga menguatkan penggunaan PPID Online. Secara berkelanjutan, Puskomblin berencana:

- Memfasilitasi temu media. Puskomblin akan menjadi fasilitator masing-masing unit dalam menyampaikan isu strategis dan program kerja mereka.
- Mengadakan sarasehan wartawan rutin satu kali tiap satu tahun dengan mengundang perwakilan wartawan dari media cetak dan elektronik. Diharapkan unit-unit KESDM di bawah koordinasi Puskomblin dapat melakukan temu media seperti sarasehan ini.
- Mengadakan bincang santai antara media dengan Menteri ESDM tiap hari Jumat. Jika Menteri ESDM berhalangan hadir, KaPuskomblin dan perwakilan unit (minimal Pejabat Eselon II) yang akan menjadi narasumber sesuai arahan. Isu strategis disampaikan ke Puskomblin pada hari Kamis setiap minggunya.

## **8. Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara**

Dalam tataran normatif, arah kebijakan merupakan tindakan yang terstruktur untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara KESDM. Kebijakan Kepala Pusat Pengelolaan BMN Energi dan Sumber Daya Mineral ditetapkan dalam rangka memberikan arahan, batasan, petunjuk dan kebijakan bagi seluruh jajaran Pusat Pengelolaan BMN KESDM serta memberikan acuan prioritas optimalisasi sumber daya yang harus dimanfaatkan dan pelaksanaannya secara terstruktur dan sistematis.

Arah kebijakan dan Strategi PPBMN yang dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Realisasi Anggaran, strategi yang dilakukan meliputi : (i) mendorong peningkatan kapasitas pejabat pengelola anggaran, (ii) mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan swakelola dan pengadaan barang/jasa, (iii) mendorong penerapan monitoring anggaran.
- b. Meningkatkan kualitas laporan keuangan satuan kerja, pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai, laporan bmn kpb serta kualitas pelayanan umum dan ketatausahaan. Strategi yang dilakukan meliputi : (i) Peningkatan kapasitas unit akuntansi anggaran dan barang, (ii) Mendorong peningkatan kualitas proses administrasi keuangan dan barang (iii) Penyertaan pegawai pada diklat/seminar dan usul tugas belajar dalam maupun luar negeri.
- c. Mewujudkan laporan BMN Kementerian ESDM dan laporan BMN Transaksi Khusus yang lebih akurat dan akuntabel. Strategi yang dilakukan melalui : (i) peningkatan kualitas kegiatan rekonsiliasi berkala, (ii) peningkatan kapasitas unit akuntansi pengguna barang dan unit akuntansi kuasa pengelola barang, (iii) mendorong peningkatan kualitas penatausahaan BMN di bidang ESDM, (iv) peningkatan koordinasi dengan unit kuasa pengguna barang dan stakeholder terkait.
- d. Meningkatkan nilai BMN di Kementerian ESDM yang ditetapkan statusnya. Strategi yang dilakukan diantaranya adalah : (i) Melakukan rekonsiliasi data secara berkala, (ii) Mendorong penggunaan monitoring PSP berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), (iii) peningkatan koordinasi dengan unit kuasa pengguna barang.
- e. Mewujudkan tertib administrasi pemindahtanganan, penghapusan dan pemanfaatan BMN. Strategi yang dilakukan diantaranya adalah (i) melakukan verifikasi usulan pemindahtanganan, penghapusan dan pemanfaatan BMN sesuai dengan peraturan yang berlaku (ii) melaksanakan sosialisasi peraturan pengelolaan BMN kepada stakeholder.
- f. Meningkatkan efektifitas proses usulan pemindahtanganan, penghapusan dan pemanfaatan BMN. Strategi yang dilakukan diantaranya adalah : (i) melaksanakan koordinasi dengan stakeholder melalui focus group discussion (FGD) (ii) melaksanakan monitoring proses pemindahtanganan, penghapusan dan pemanfaatan BMN secara periodik.

- g. Meningkatkan efisiensi proses penghapusan BMN di bidang ESDM. Strategi yang dilakukan diantaranya adalah : (i) menyusun SOP dan *time frame* proses pemindahtanganan, penghapusan dan pemanfaatan BMN; (ii) menerapkan SOP dan time frame yang disepakati.
- h. Meningkatkan kualitas pengamanan BMN di lingkungan Kementerian di bidang ESDM. Strategi yang dilakukan adalah (i) meningkatkan kualitas koordinasi dengan stakeholder terkait (ii) Meningkatkan monitoring dan evaluasi pengamanan administrasi, fisik dan hukum terhadap BMN, (iii) mendorong penyelesaian kasus sengketa pengelolaan BMN, (iv) Menyusun standar minimum pengamanan.
- i. Penyiapan penetapan dan pelaksanaan pemantauan evaluasi obyek vital nasional bidang energi dan sumber daya mineral.
- j. Meningkatkan kualitas pemeliharaan BMN di lingkungan Kementerian ESDM. Strategi yang dilakukan adalah (i) Meningkatkan Koordinasi dengan Stakeholder terkait (ii) menyusun perencanaan pemeliharaan BMN, (iii) menyusun kebijakan teknis pemeliharaan BMN, (iv) monitoring implementasi kebijakan teknis pemeliharaan BMN (v) melaksanakan pembinaan berkelanjutan, monitoring, dan evaluasi pemeliharaan BMN.
- k. Barang milik negara yang berasal dari perolehan lainnya yang sah atau hasil perjanjian kontrak, akan diupayakan pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian ESDM yang secara fungsional dilaksanakan oleh Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

## IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### IV.1. TARGET KINERJA

Target kinerja merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dicapai oleh Kementerian yang terdiri dari IKU Menteri ESDM dan IKU unit Eselon I. Khusus untuk IKU Menteri ESDM telah dijabarkan pada bab tujuan dan sasaran. Pada dokumen Renstra Sekretariat Jenderal ini, target kinerja telah ditetapkan berdasarkan perencanaan dan perkiraan yang dibuat pada tahun 2014/2015, sehingga tidak menutup kemungkinan pada tahun berjalan perencanaannya dapat berubah seiring dengan penetapan APBN, APBN-P, Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), dan dokumen perencanaan lainnya.

#### 1. Sekretariat Jenderal

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
Sasaran strategis: Meningkatkan kualitas pengelolaan SDM Aparatur dalam rangka peningkatan kompetensi SDM dan pengembangan organisasi							
1.	Persentase pembinaan pengeolaan pegawai	%	95	95	96	96	97
Sasaran strategis: Meningkatnya kualitas perencanaan dan kerjasama sektor ESDM yang efektif dan efisien							
2.	Indeks Pencapaian Renstra	Indeks	70	75	80	85	90
3	Hasil (nilai) evaluasi AKIP KESDM	Predikat	B	B	B	A	A
Sasaran strategis: Terwujudnya pelayanan administrasi pengelolaan dan informasi keuangan yang cepat, tepat, transparan serta akuntabel dilingkungan KESDM							
4.	Opini BPK atas Laporan Keuangan KESDM	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5.	Persentase realisasi PNBPN terhadap target yang ditetapkan pada tahun berjalan	%	90	90	90	90	90
Sasaran strategis: Terwujudnya kepastian hukum sektor ESDM dalam rangka mendorong peningkatan investasi							

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
6.	Jumlah rancangan peraturan peraturan perundang-undangan sektor ESDM yang menunjang prioritas nasional	Peraturan	25	25	25	25	25
7.	Jumlah permasalahan hukum Kementerian ESDM di dalam dan di luar Lembaga Peradilan yang bersifat prioritas nasional yang diselesaikan atau dalam proses penyelesaian	Buah	4	6	6	6	6
Sasaran strategis: Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur yang efektif dan efisien							
8.	Persentase sarana dan prasarana kerja yang sesuai standardisasi sarana dan prasarana kerja	%	90	90	90	90	90
Sasaran strategis: Meningkatkan kualitas data dan teknologi informasi sektor ESDM yang lengkap, akurat dan tepat waktu							
9.	Peningkatan nilai data ESDM sesuai target	%	95	95	95	95	95
Sasaran strategis: Terwujudnya kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang akurat dan akuntabel							
10	Persentase usulan penghapusan barang milik negara yang diproses sampai terbitnya SK Menteri ESDM	%	100	100	100	100	100
Sasaran strategis: Meningkatkan pelayanan komunikasi publik sektor ESDM							
11	Indeks kepuasan terhadap pelayanan informasi publik	Indeks	70	75	80	85	90

## 2. Biro Kepegawaian dan Organisasi

Target Kinerja Biro Kepegawaian dan Organisasi dengan sasaran **Meningkatnya kualitas pengelolaan SDM Aparatur dalam rangka peningkatan kompetensi SDM dan pengembangan organisasi**

No.	Program/Sasaran/Kegiatan	Volume/Target			
		2016	2017	2018	2019
1	Perencanaan Pengadaan dan Pengembangan SDM Aparatur	1.606	1.606	1.606	1.606
2	Pembinaan Kepegawaian	3.984	3.984	3.984	3.984
3	Pengelolaan Kinerja dan Informasi Pegawai	12.304	12.304	12.304	12.304
4	Penataan Organisasi	3	6	6	6
5	Pengembangan Tata Laksana	3	3	3	3
6	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	4	10	10	10
7	Layanan Perkantoran	12	12	12	12

## 3. Biro Perencanaan dan Kerja Sama

Target Kinerja Biro Perencanaan dan Kerja sama dengan sasaran **Meningkatnya kualitas perencanaan dan kerjasama sektor ESDM yang efektif dan efisien**

No.	Sasaran		Satuan	Tahun				
	Uraian	Indikator		2015	2016	2017	2018	2019
1	Tersedianya bahan untuk pimpinan dan kebijakan umum lainnya yang tepat waktu dan berkualitas	Tingkat kepuasan pimpinan KESDM atas penyiapan bahan rapat	%	80	80	80	80	80
		Jumlah dokumen kebijakan umum	dokumen	5	5	5	5	5
2	Tersedianya rencana anggaran yang	Persentase anggaran KESDM yang menunjang prioritas nasional	%	65	65	65	65	65

No.	Sasaran		Satuan	Tahun				
	Uraian	Indikator		2015	2016	2017	2018	2019
	berbasis kinerja	Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran	dokumen	5	5	5	5	5
		Jumlah dokumen penunjang perencanaan program dan anggaran	3 dokumen	3	3	3	3	3
3	Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi yang akuntabel	Indeks pencapaian Renstra (Skala 100)	Skala	75	75	75	75	75
		Hasil (nilai) evaluasi AKIP KESDM tahun 2014	Predikat	B	B	B	B	B
		Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi program dan kegiatan	dokumen	7	7	7	7	7
4	Tersedianya potensi dan monitoring hasil kerjasama yang mendukung tujuan sektor ESDM	Persentase perjanjian kerja sama yang diimplementasikan	%	85	85	85	85	85
		Jumlah dokumen kerjasama bilateral, multilateral dan dalam negeri	dokumen	5	5	5	5	5

#### 4. Biro Keuangan

Target Kinerja Biro Kepegawaian dan Organisasi dengan sasaran **Terwujudnya pelayanan administrasi pengelolaan dan informasi keuangan yang cepat, tepat, transparan serta akuntabel dilingkungan KESDM**

Indikator Kinerja / Keluaran		Satuan	Volume Target			
			2016	2017	2018	2019
1.	Persentase realisasi PNPB KESDM terhadap target yang ditetapkan tahun berjalan	%	90	90	90	90
	Output:					

Indikator Kinerja / Keluaran		Satuan	Volume Target			
			2016	2017	2018	2019
	Dokumen Pengelolaan PNPB di Lingkungan KESDM	Laporan	4	4	4	4
2.	Persentase realisasi anggaran belanja KESDM terhadap target yang ditetapkan pada tahun berjalan	%	87	89	90	92
	Output:					
	Dokumen Pengelolaan Anggaran Belanja	Laporan	5	5	5	5
3.	Tingkat kepuasan pelayanan dan pembinaan perbendaharaan	%	83	85	88	90
	Output:					
	Layanan Perbendaharaan	Laporan	8	9	9	9
4.	Tersusunnya Laporan Keuangan Setjen	Laporan		1	1	1
	Output:					
	Laporan Keuangan SETJEN	Laporan		1	1	1
5.	Opini BPK atas laporan keuangan KESDM	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP
	Output:					
	Laporan Keuangan KESDM	Laporan	9	8	8	8
6.	Jumlah Laporan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Biro Keuangan	Laporan	2	2	2	2
	Output:					
	Laporan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Biro Keuangan	Laporan	2	2	2	2

## 5. Biro Hukum

Target Kinerja Biro Hukum dengan sasaran **Terwujudnya kepastian hukum sektor ESDM dalam rangka mendorong peningkatan investasi Sektor ESDM**

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Terwujudnya kepastian hukum	Jumlah rancangan peraturan perundang-	Peraturan	25	25	25	25	25



Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
sektor ESDM dalam rangka mendorong peningkatan investasi Sektor ESDM	undangan sektor ESDM yang menunjang prioritas nasional						
	Jumlah Pertimbangan Hukum	Buah	100	100		100	100
	Jumlah permasalahan hukum Kementerian ESDM di dalam dan di luar Lembaga Peradilan yang bersifat nasional yang diselesaikan atau dalam proses penyelesaian	Kasus	6	6		6	6

## 6. Biro Umum

Target Kinerja Biro Umum dengan sasaran **Terciptanya tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan keprotokolan serta Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur yang efektif dan efisien**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Terciptanya tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan ketatausahaan, rumahtangga dan perlengkapan	Jumlah Arsip vital dan permanen hasil Pelaksanaan Penyelamatan Arsip KESDM (Berkas)	1500	1650	1815	1997	1310
	Jumlah Rancangan NSPK Bidang Ketatausahaan, Kearsipan, Keprotokolan, Perlengkapan dan Kerumahtangaan KESDM (Dokumen)	3	2	3	3	2
	Jumlah Laporan	25	23	24	24	24

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
	Pembinaan, Koordinasi dan Pengadministrasian Bidang Ketatausahaan, Kearsipan, Keprotokolan, Perlengkapan dan Kerumahtangaan KESDM (Laporan)					
	Indeks Kepuasan Pelayanan Umum (Indeks)	73	73,5	74	74,5	75
	Jumlah Bulan Layanan Perkantoran (Bulan)	12	12	12	12	12
	Jumlah Laporan Dukungan Manajemen dan Tugas Lainnya Biro Umum Setjen KESDM (Laporan)	5	5	5	5	5
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang efektif dan efisien	Jumlah Peralatan elektrik dan elektronik (Unit)	385	385	385	385	385
	Jumlah Peralatan non-elektrik dan non-elektronik (Unit)	380	380	380	380	380

## 7. Pusat Data dan Informasi

Target Kinerja Pusat Data dan Informasi ESDM dengan sasaran **Meningkatnya kualitas data dan teknologi informasi sektor ESDM yang lengkap, akurat dan tepat waktu**

Kinerja		Tahun			
		2016	2017	2018	2019
<b>Output 1</b>	<b>Layanan Pengelolaan dan Pemanfaatan Data</b>				
Indikator	1. Persentase peningkatan jumlah data yang dikelola	20%	20%	20%	20%
	2. Persentase peningkatan jumlah data yang dimanfaatkan	20%	20%	20%	20%
<b>Output 2</b>	<b>Rekomendasi Strategis Sektor ESDM</b>				

Kinerja		Tahun			
		2016	2017	2018	2019
Indikator	Jumlah Rekomendasi Strategis Sektor ESDM	6	6	6	6
<b>Output 3</b>	<b>Layanan Teknologi Informasi</b>				
Indikator	1. Tingkat Keandalan Akses Jaringan KESDM (24 jam/hari)	99%	99%	99%	99%
	2. Tingkat Ketersediaan Aplikasi Sistem Internet ESDM	95%	95%	95%	95%
<b>Output 4</b>	<b>Layanan Dukungan Manajemen</b>				
Indikator	Tingkat Layanan Dukungan Manajemen	99%	99%	99%	99%
<b>Output 5</b>	<b>Layanan Perkantoran</b>				
Indikator	Tingkat Layanan Perkantoran	99%	99%	99%	99%
<b>Output 6</b>	<b>Kendaraan Bermotor</b>				
Indikator	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana Transportasi Darat	99%	99%	99%	99%
<b>Output 7</b>	<b>Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi</b>				
Indikator	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Media Pemroses/ Penyimpan/ Penyaji Data dan/ atau Media Komunikasi	99%	99%	99%	99%
<b>Output 8</b>	<b>Peralatan Fasilitas Perkantoran</b>				
Indikator	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana Kelengkapan Kantor	99%	99%	99%	99%

## 8. Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara

Target Kinerja Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara dengan sasaran **Terwujudnya kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang akurat dan akuntabel**

No	Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
				2015	2016	2017	2018	2019
1	Perencanaan, Keuangan, Ketatausahaan, Layanan Umum, Kepegawaian, Hukum dan Pengelolaan Data Informasi Pengelolaan BMN	Jumlah Laporan Dukungan Perencanaan, Keuangan, Ketatausahaan, Layanan Umum, Kepegawaian, Hukum dan Pengelolaan Data Informasi Pengelolaan BMN	laporan	10	10	10	10	10
2	Penatausahaan Barang Milik Negara	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Negara	laporan	7	7	7	7	7
3	Barang Milik Negara Yang Sudah Ditetapkan Status Penggunaannya	Laporan Barang Milik Negara Yang Sudah Ditetapkan Status Penggunaannya	laporan	1	1	1	1	1

No	Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
				2015	2016	2017	2018	2019
5	Pengamanan Barang Milik Negara Kementerian ESDM	Jumlah Laporan Pengamanan Barang Milik Negara Kementerian ESDM	Laporan	3	3	3	3	3
6	Pemeliharaan Barang Milik Negara Bidang ESDM	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Negara Kementerian ESDM	Laporan	3	3	3	3	3
7	Output Cadangan	-						

## 9. Pusat Komunikasi Publik

Target Kinerja Pusat Komunikasi Publik dengan sasaran **Meningkatnya pelayanan komunikasi publik sektor ESDM**

Pengelolaan Informasi Publik Kementerian ESDM	Sasaran	Indikator	Volume Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
Layanan Kehumasan dan Hubungan Kelembagaan	Meningkatnya pelayanan informasi publik Sektor ESDM	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan informasi publik	70%	75%	75%	80%	80%
Layanan Dukungan Manajemen Pusat Komunikasi Publik	Meningkatnya pelayanan informasi publik Sektor ESDM	Laporan layanan dukungan Manajemen Pusat Komunikasi Publik	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan

## IV.2. KERANGKA PENDANAAN

### 1. INVESTASI DAN PENDANAAN

Sumber pendaan pembangunan sektor ESDM utamanya dari investasi swasta dan selebihnya dari APBN. Dalam melaksanakan pembangunan 5 tahun kedepan, arah pembangunan lebih kepada infrastruktur ketenagalistrikan, energi terbarukan dan hilir migas serta pengolahan dan pemurnian mineral. Investasi swasta dan pendanaan APBN tersebut akan berdampak pada pencapaian kedaulatan energi dan penerimaan negara yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Perkiraan investasi sektor ESDM tahun

2015-2019 dari swasta dan APBN sekitar Rp. 273 miliar dan Rp. 104 triliun.



**Gambar 4.1. Indikasi Kerangka Pendanaan Sektor ESDM Tahun 2015-2019**

- a. **Investasi sektor ESDM**, untuk 5 tahun kedepan diperkirakan sebesar US\$ 273 miliar, yang utamanya merupakan investasi dari sektor swasta. Mayoritas investasi berasal dari sub sektor migas yaitu sebesar 52%, selebihnya yaitu sub sektor ketenagalistrikan sekitar 28%, mineral dan batubara sekitar 14%, dan EBTKE sekitar 6%.

**Tabel 4.1. Investasi Sektor ESDM Tahun 2015-2019**

Investasi	Satuan	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
<b>1. Minyak dan Gas Bumi</b>	miliar US\$	<b>23,67</b>	<b>25,23</b>	<b>26,80</b>	<b>28,36</b>	<b>29,93</b>
<b>2. Ketenagalistrikan</b>	miliar US\$	<b>11,20</b>	<b>16,37</b>	<b>20,35</b>	<b>19,55</b>	<b>15,87</b>
- pembangkit	miliar US\$	5,91	10,99	15,24	14,64	12,17
- transmisi	miliar US\$	3,82	3,97	3,63	3,42	2,23
- distribusi	miliar US\$	1,47	1,41	1,48	1,49	1,47
<b>3. Mineral dan Batubara</b>	miliar US\$	<b>6,14</b>	<b>6,51</b>	<b>6,90</b>	<b>7,31</b>	<b>7,75</b>
- KK	miliar US\$	1,63	1,72	1,83	1,94	2,05
- PKP2B	miliar US\$	1,15	1,22	1,29	1,37	1,45
- IUP	miliar US\$	0,26	0,28	0,29	0,31	0,33
- Usaha Jasa Pertambangan	miliar US\$	1,17	1,24	1,31	1,39	1,47
- Smelter	miliar US\$	1,94	2,05	2,18	2,31	2,44
<b>4. EBTKE</b>	miliar US\$	<b>4,48</b>	<b>3,34</b>	<b>3,88</b>	<b>5,79</b>	<b>3,71</b>
- Panas bumi	miliar US\$	0,94	1,14	1,61	1,91	1,28
- Bioenergi	miliar US\$	0,28	0,31	0,35	0,38	0,42
- Aneka EBT	miliar US\$	3,26	1,89	1,92	3,50	2,00
- Konservasi energi	miliar US\$	-	0,002	0,003	0,005	0,007
<b>TOTAL</b>		<b>45,49</b>	<b>51,45</b>	<b>57,93</b>	<b>61,02</b>	<b>57,26</b>

**b. APBN KESDM untuk 5 tahun kedepan diindikasikan sekitar Rp. 71,55 triliun,** termasuk anggaran tambahan pada APBN-P 2015 sekitar Rp. 5 triliun. Total anggaran tersebut, terdiri dari:

- Belanja Prioritas sebesar Rp. 61,81 triliun
- Belanja Aparatur sebesar Rp. 9,74 triliun

Anggaran KESDM tersebut dapat mengalami perubahan tiap tahunnya sesuai dengan kebijakan tahunan dan *reserve envelope* Pemerintah.

**Tabel 4.2. Indikasi APBN KESDM Tahun 2015-2019**

NO	UNIT	PROGRAM	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
1	SETJEN	1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	525,0	466,3	470,6	489,4	508,6	2.459,8
		2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	40,9	36,6	38,4	40,3	42,3	198,4
		- Belanja prioritas	15,6	16,3	17,1	18,0	18,9	85,9
		- Belanja aparatur	25,3	20,2	21,2	22,3	23,4	112,5
2	ITJEN	3 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara KESDM	107,5	145,4	150,4	162,2	175,0	740,5
		- Belanja prioritas	57,9	85,8	88,2	97,1	106,8	435,8
		- Belanja aparatur	49,6	59,6	62,2	65,1	68,2	304,7
3	DITJEN MIGAS	4 Pengelolaan dan Penyediaan Migas	4.249,6	2.088,3	2.823,8	2.509,0	3.498,3	15.168,9
		a. Baseline	830,6	2.088,3	2.823,8	2.509,0	3.498,3	11.749,9
		- Belanja prioritas	747,4	1.994,1	2.730,0	2.411,2	3.396,1	11.278,8
		- Belanja aparatur	83,1	94,2	93,8	97,8	102,2	471,1
		b. RAPBN-P 2015	3.419,0	-	-	-	-	3.419,0
4	DITJEN LISTRIK	5 Pengelolaan Ketenagalistrikan	4.481,3	5.321,8	5.191,6	5.280,3	5.583,8	25.858,7
		a. Baseline	3.937,1	5.321,8	5.191,6	5.280,3	5.583,8	25.315
		- Belanja prioritas	3.842,1	5.233,8	5.092,0	5.172,2	5.460,2	24.800,3
		- Belanja aparatur	95,0	88,0	99,7	108,1	123,5	514,2
		b. RAPBN-P 2015	544,2	-	-	-	-	544,2
5	DITJEN MINERBA	6 Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	324,9	265,6	275,4	292,3	311,1	1.469,2
		- Belanja prioritas	282,5	248,1	257,9	274,8	293,6	1.356,9
		- Belanja aparatur	42,3	17,5	17,5	17,5	17,5	112,3
6	DITJEN EBTKE	7 Pengelolaan Energi baru Terbarukan dan Konsevasi Energi	2.059,9	1.047,7	1.249,3	1.497,4	1.766,1	7.620,4
		a. Baseline	1.019,6	1.047,7	1.249,3	1.497,4	1.766,1	6.580,2
		- Belanja prioritas	873,0	998,8	1.198,8	1.444,3	1.710,3	6.225,2
		- Belanja aparatur	146,7	49,0	50,5	53,1	55,8	355,0
		b. RAPBN-P 2015	1.040,3	-	-	-	-	1.040,3
7	BADAN GEOLOGI	8 Penelitian , Mitigasi, dan Pelayanan Geologi	1.074,4	1.123,2	1.154,2	1.205,4	1.253,4	5.810,6
		- Belanja prioritas	709,4	722,4	760,7	798,2	826,5	3.817,2
		- Belanja aparatur	364,9	400,8	393,4	407,2	427,0	1.993,3
8	BALITBANG	9 Penelitian dan Pengembangan ESDM	893,5	1.018,7	1.157,97	1.152,7	1.043,1	5.266,0
		- Belanja prioritas	443,5	565,2	589,7	605,5	647,5	2.851,4
		- Belanja aparatur	450,0	453,5	568,3	547,2	395,6	2.414,7
9	BADIKLAT	10 Pendidikan dan Pelatihan ESDM	796,4	903,6	908,9	958,5	1.023,2	4.590,6
		- Belanja prioritas	348,5	394,4	426,5	462,5	497,2	2.129,1
		- Belanja aparatur	447,9	509,1	482,5	496,0	526,1	2.461,5
10	BPH MIGAS	11 Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas melalui Pipa	371,8	428,6	273,6	283,9	298,8	1.656,7
		- Belanja prioritas	181,8	189,1	182,1	190,3	203,2	946,6
		- Belanja aparatur	190,0	239,5	91,5	93,5	95,5	710,1
11	DEN	12 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dewan Energi Nasional	101,9	132,2	143,2	158,0	174,1	709,3
		- Belanja prioritas	62,7	76,5	84,5	90,8	100,2	414,8
		- Belanja aparatur	39,2	55,6	58,6	67,2	73,9	294,5
<b>A. TOTAL BASELINE</b>			<b>10.023,5</b>	<b>12.977,9</b>	<b>13.837,4</b>	<b>14.029,3</b>	<b>15.677,8</b>	<b>66.545,8</b>
		- Belanja prioritas	8.089,5	10.990,8	11.898,1	12.054,3	13.769,1	56.801,8
		- Belanja aparatur	1.934,1	1.987,1	1.939,3	1.974,9	1.908,7	9.744,0
<b>B. APBN-P 2015</b>			<b>5.003</b>					<b>5.003,4</b>
<b>C. TOTAL DENGAN RAPBN-P 2015</b>			<b>15.026,9</b>	<b>12.977,9</b>	<b>13.837,4</b>	<b>14.029,3</b>	<b>15.677,8</b>	<b>71.549,2</b>
		- Belanja prioritas	13.092,9	10.990,8	11.898,1	12.054,3	13.769,1	61.805,2
		- Belanja aparatur	1.934,1	1.987,1	1.939,3	1.974,9	1.908,7	9.744,0

## 2. PROGRAM DAN KEGIATAN POKOK SEKRETARIAT JENDERAL

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Kementerian, di dukung dengan pendanaan melalui investasi swasta dan APBN. Khusus untuk yang melalui pendanaan APBN, diakomodir melalui program dan kegiatan pokok yang ada di unit kerja di Kementerian ESDM. Program dan kegiatan pokok ini merupakan terminologi pada dokumen penganggaran Kementerian, dimana Program mewakili unit eselon 1 dan kegiatan pokok mewakili unit eselon 2.

KESDM memiliki 12 Program, dimana masing-masing unit setingkat eselon 1 memiliki 1 program, kecuali Sekretariat Jenderal yang memiliki 2 program. Masing-masing program (Eselon-1) memiliki sasaran program dan Indikator Kinerja Utama (*outcome*), sedangkan masing-masing kegiatan pokok (Eselon-2) juga memiliki sasaran kegiatan dan indikator kinerja (*output*).

Setiap program dan kegiatan pokok terdapat anggarannya, dimana total Indikasi APBN KESDM untuk 5 tahun direncanakan sekitar Rp. 71,5 Triliun, yang terdiri dari Belanja Prioritas sekitar Rp. 61,8 triliun dan Belanja Aparatur sekitar Rp. 9,7 triliun yang dipergunakan untuk mencapai target kinerja sebagaimana terdapat pada sub bab 4.1.

Belanja Prioritas akan lebih diutamakan alokasi anggaran pada tiap tahunnya dibandingkan dengan Belanja Aparatur yang lebih fluid. Adapun Rencana Belanja Prioritas KESDM 2015-2019 dengan rincian program dan kegiatan pokok untuk unit Sekretariat Jenderal, sebagai berikut:

**Tabel 4.3. Rencana Belanja Prioritas Setjen KESDM 2015-2019**

No.	Program/Kegiatan Pokok	Penanggung Jawab	Target (Rp. Miliar)					Total
			2015	2016	2017	2018	2019	
	<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya</b>	<b>Sekretariat Jenderal</b>	<b>525,0</b>	<b>466,3</b>	<b>470,6</b>	<b>489,4</b>	<b>508,6</b>	<b>2.459,8</b>
1	Kegiatan Pembinaan Administrasi Hukum KESDM	Biro Hukum	17,6	15,2	15,9	16,7	17,6	83,0
2	Kegiatan Pengelolaan SDM Aparatur dan Pengembangan Organisasi KESDM	Biro Kepegawaian	136,1	132,9	138,3	143,9	151,1	702,3
3	Kegiatan Pengelolaan Administrasi Keuangan Kementerian ESDM	Biro Keuangan	39,8	27,9	29,4	30,8	32,4	160,3
4	Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan dan Kerja Sama KESDM	Biro Perencanaan & Kerja Sama	86,4	71,3	71,8	72,8	73,9	376,3



No.	Program/Kegiatan Pokok	Penanggung Jawab	Target (Rp. Miliar)					Total
			2015	2016	2017	2018	2019	
5	Kegiatan Pengelolaan Administrasi Ketatausahaan, Kearsipan, Keprotokolan, Perlengkapan, dan Kerumahtanggan KESDM	Biro Umum	117,5	107,8	114,9	120,3	123,7	584,1
6	Kegiatan Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Kementerian ESDM	Pusat Data dan Teknologi Informasi	57,3	51,0	37,3	39,1	40,9	225,7
7	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian ESDM	Pusat Barang Milik Negara	37,1	25,7	26,9	27,9	29,3	146,9
8	Kegiatan Pengelolaan Komunikasi Publik Kementerian ESDM	Pusat Komunikasi Publik	33,1	34,4	36,1	37,8	39,7	181,1
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>Sekretariat Jenderal</b>	<b>15,6</b>	<b>16,3</b>	<b>17,1</b>	<b>18,0</b>	<b>18,9</b>	<b>85,9</b>
1	Kegiatan: Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur KESDM	Biro Umum	15,6	16,3	17,1	18,0	18,9	85,9

### 3. KERANGKA PENDANAAN ESELON II SETJEN KESDM 2015-2019

Untuk mendukung program dan kegiatan pokok Sekretariat Jenderal KESDM 2015-2019, tentunya memerlukan dukungan kegiatan unit-unit Eselon II di bawahnya, antara lain:

**a. Kegiatan Pembinaan Administrasi Hukum KESDM**

No.	Kegiatan Output	Target (Rp Milyar)				
	Pembinaan Administrasi Hukum KESDM	2015	2016	2017	2018	2019
		15.823.049	13.594.304	16.000.000	20.408.636	20.445.736
1	Program Legislasi dan Regulasi Sektor ESDM	269.259	435.600	490.896	500.714	525.749
2	Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Sektor ESDM	2.489.402	3.640.667	8.018.575	9.170.465	8.645.657
3	Laporan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Sektor ESDM	239.764	220.405	244.000	301.223	316.284
4	Laporan Pertimbangan Hukum atas peraturan yang tidak sinkron dan harmonis	900.801	435.106	450.000	634.268	665.981
5	Laporan Penyelesaian Permasalahan Hukum Bidang Perdata, Tata Usaha Negara	2.393.230	2.325.201	1.198.600	2.275.938	2.389.735
6	Laporan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	675.502	932.003	518.792	810.149	850.656
7	Laporan Pertimbangan Hukum terhadap Permasalahan Sektor ESDM	1.409.298	1.658.084	1.460.942	2.095.193	2.199.954
8	Laporan Evaluasi Hukum	7.445.793	3.947.238	3.618.195	4.620.686	4.851.720

**b. Kegiatan Pengelolaan SDM Aparatur dan Pengembangan Organisasi KESDM**

No.	Program/Sasaran/Kegiatan	Anggaran (Juta)			
		2016	2017	2018	2019
1	Perencanaan Pengadaan dan Pengembangan SDM Aparatur	29.932	32.850	34.431	36.149
2	Pembinaan Kepegawaian	4.812	5.281	5.536	5.812
3	Pengelolaan Kinerja dan Informasi Pegawai	7.471	8.198	8.592	9.020
4	Penataan Organisasi	3.168	4.752	5.465	6.285
5	Pengembangan Tata Laksana	2.956	4.434	5.099	5.864
6	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	3.127	4.691	5.394	6.203
7	Layanan Perkantoran	85.900	88.906	92.018	95.238
<b>Jumlah Total</b>		<b>137.366</b>	<b>149.112</b>	<b>156.535</b>	<b>164.571</b>

**c. Kegiatan Pengelolaan Administrasi Keuangan Kementerian ESDM**

No.	Indikator Kinerja/Keluaran	Anggaran (Juta Rp.)				Total alokasi anggaran 2016-2019 (Juta Rp.)
		2016	2017	2018	2019	
1	Persentase realisasi PNBK KESDM terhadap target yang ditetapkan pada tahun berjalan					
	<i>Output</i>					
	Dokumen Pengelolaan PNBK di lingkungan KESDM	5.655	6.155	5.850	6.025	23.685
2	Persentase realisasi anggaran belanja KESDM terhadap target yang ditetapkan pada tahun berjalan					
	<i>Output</i>					
	Dokumen pengelolaan Anggaran Belanja	11.273	11.273	11.273	11.273	45.092

No.	Indikator Kinerja/Keluaran	Anggaran (Juta Rp.)				
		2016	2017	2018	2019	Total alokasi anggaran 2016-2019 (Juta Rp.)
3	Tingkat kepuasan pelayanan dan pembinaan perbendaharaan					
	Output					
	Layanan Perbendaharaan	6.931	7.932	7.932	7.932	30.727
4	Tersusunnya Laporan Keuangan Setjen					
	Output					
	Laporan Keuangan Setjen		802	802	802	2.406
5	Opini BPK atas Laporan Keuangan KESDM					
	Output					
	Laporan Keuangan KESDM	5.553	4.593	4.823	5.064	20.033
6	Jumlah Laporan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis lainnya Biro keuangan					
	Output					
	Laporan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis lainnya Biro keuangan	1.592	2.092	2.155	2.220	8.059
<b>Grand Total</b>		<b>31.006</b>	<b>32.045</b>	<b>32.033</b>	<b>32.514</b>	<b>127.598</b>

**d. Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan dan Kerja Sama KESDM**

Sasaran	Indikator	Alokasi Anggaran (Milyar Rp.)				
		2015	2016	2017	2018	2019
<b>Meningkatnya kualitas perencanaan dan kerja sama sektor ESDM yang efektif dan efisien</b>	Perencanaan/Program dan Penganggaran	4,9	3,9	4,1	4,3	4,5
	Penyiapan bahan pimpinan	2,2	1,9	1,9	2,0	2,1
	Pemantauan analisis dan evaluasi	3,3	3,3	3,3	3,5	3,7
	Kebijakan, koordinasi kerjasama dan kemitraan	4,4	2,9	3,0	3,1	3,3
	Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Biro Perencanaan dan Kerja Sama	8,3	8,3	8,5	8,9	9,3
	Dekonsentrasi Pembinaan, Pengawasan, dan Monev Sektor ESDM	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0

**e. Kegiatan Pengelolaan Administrasi Ketatausahaan, Kearsipan, Keprotokolan, Perlengkapan, dan Kerumahtanggaan serta Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KESDM**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun Anggaran (Milyar Rp.)				
		2015	2016	2017	2018	2019
<b>Terciptanya tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan ketatausahaan, rumah tangga dan</b>	Arsip vital dan permanen hasil Pelaksanaan Penyelamatan Arsip KESDM	0,8	0,9	1,1	1,2	0,8
	Rancangan NSPK Bidang Ketatausahaan, Kearsipan,	2,6	1,8	2,9	3,0	1,9

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun Anggaran (Milyar Rp.)				
		2015	2016	2017	2018	2019
<b>perlengkapan</b>	Keprotokolan, Perlengkapan dan Kerumahtangaan KESDM					
	Pembinaan, Koordinasi dan Pengadministrasian Bidang Ketatausahaan, Kearsipan, Keprotokolan, Perlengkapan dan Kerumahtangaan KESDM	15,9	15,2	16,7	17,4	17,5
	Layanan Umum (Indeks)	8,0	8,3	8,6	8,9	9,3
	Layanan Perkantoran	73,5	77,2	81,0	85,1	89,4
	Dukungan Manajemen dan Tugas Lainnya Biro Umum Setjen KESDM	4,3	4,4	4,5	4,6	4,8
<b>Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang efektif dan efisien</b>	Peralatan elektrik dan eletronik	10,9	11,5	12,0	12,6	13,2
	Jumlah Peralatan non-elektrik dan non-elektronik	4,6	4,9	5,1	5,4	5,6

**f. Kegiatan Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Kementerian ESDM**

Kinerja		Tahun			
		2016	2017	2018	2019
<b>Output 1</b>	<b>Layanan Pengelolaan dan Pemanfaatan Data (Rp.)</b>	<b>5,380,487,000</b>	<b>8,530,132,000</b>	<b>8,956,638,600</b>	<b>9,404,470,530</b>
Indikator	Persentase peningkatan jumlah data yang dikelola	20%	20%	20%	20%
	Persentase peningkatan jumlah data yang dimanfaatkan	20%	20%	20%	20%
Aktivitas \ Sub Output	Penyusunan Database Ekonomi dan Mineral	3,379,747,000	5,245,886,000	3,379,747,000	3,379,747,000

Kinerja		Tahun			
		2016	2017	2018	2019
	(Rp.)				
Aktivitas \ Sub Output	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Data ESDM (Rp.)	844,590,000	1,728,096,000	844,590,000	844,590,000
Aktivitas \ Sub Output	Pelayanan dan Pemanfaatan Data ESDM (Rp.)	1,156,150,000	1,556,150,000	1,156,150,000	1,156,150,000
<b>Output 2</b>	<b>Rekomendasi Strategis Sektor ESDM (Rp.)</b>	<b>5,392,961,000</b>	<b>6,052,000,000</b>	<b>6,354,600,000</b>	<b>6,672,330,000</b>
Indikator	Jumlah Rekomendasi Strategis	6	6	6	6
Aktivitas \ Sub Output	Rekomendasi Startegis Sektor ESDM (Rp.)	5,392,961,000	6,052,000,000	6,354,600,000	6,672,330,000
<b>Output 3</b>	<b>Layanan Teknologi Informasi (Rp.)</b>	<b>5.213.767.000</b>	<b>16.500.000.000</b>	<b>16.150.000.000</b>	<b>16.000.000.000</b>
Indikator	Tingkat Keandalan Akses Jaringan KESDM (24 jam/hari)	99%	99%	99%	99%
	Tingkat Ketersediaan Aplikasi Sistem Internet ESDM	95%	95%	95%	95%
Aktivitas \ Sub Output	Pengelolaan Server dan Jaringan (Rp.)	9.010.194.000	4.050.000.000	3.847.500.000	3.700.000.000
Aktivitas \ Sub Output	Pengelolaan Penyediaan Aplikasi SI (Rp.)	1.600.187.000	800.000.000	760.000.000	760.000.000
Aktivitas \ Sub Output	Relokasi Pengembangan Data Center (Rp.)	5.403.386.000	1.750.000.000	1.642.500.000	1.640.000.000
Komponen (011)	Layanan Pengembangan Data Center (Rp.)	5.403.386.000	1.750.000.000	1.642.500.000	1.640.000.000
Aktivitas \ Sub Output	Pengelolaan Infrastruktur dan Bandwidth Internet KESDM (Rp.)	9.200.000.000	9.900.000.000	9.900.000.000	9.900.000.000
Komponen (011)	Pengelolaan Infrastruktur dan Bandwidth Internet KESDM (Rp.)	9.200.000.000	9.900.000.000	9.900.000.000	9.900.000.000
<b>Output 4</b>	<b>Layanan Dukungan Manajemen (Rp.)</b>	<b>9.490.974.000</b>	<b>9.744.868.000</b>	<b>9.109.374.600</b>	<b>8.649.588.000</b>
<b>Output 4</b>	<b>Layanan Dukungan Manajemen (Rp.)</b>	<b>3.745.212.000</b>	<b>4.102.705.050</b>	<b>3.750.000.000</b>	<b>3.560.000.000</b>
Indikator	Tingkat Layanan Dukungan Manajemen	99%	99%	99%	99%
Aktivitas \ Sub Output	Layanan Manajemen Keuangan Pusdatin (Rp.)	1.571.439.000	2.265.344.050	2.000.000.000	1.900.000.000
Aktivitas \ Sub Output	Pelaksanaan Administrasi Umum (Rp.)	2.173.773.000	1.837.361.000	1.750.000.000	1.660.000.000
<b>Output 5</b>	<b>Layanan perkantoran (Rp.)</b>	<b>4.936.197.000</b>	<b>5.039.030.700</b>	<b>4.787.000.000</b>	<b>4.548.000.000</b>
Indikator	Tingkat Layanan Perkantor	99%	99%	99%	99%
Aktivitas \ Sub Output	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Rp.)	4.936.197.000	5.039.030.700	4.787.000.000	4.548.000.000
<b>Output 6</b>	<b>Kendaraan Bermotor (Rp.)</b>	<b>38.420.000</b>		-	-
Indikator	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana Transportasi Darat	99%	99%	99%	99%

Kinerja		Tahun			
		2016	2017	2018	2019
<b>Output 7</b>	<b>Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (Rp.)</b>	<b>583.400.000</b>	<b>406.000.000</b>	<b>385.700.000</b>	<b>366.415.000</b>
Indikator	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Media Pemroses/ Penyimpan/ Penyaji Data dan/ atau Media Komunikasi	99%	99%	99%	99%
<b>Output 8</b>	<b>Peralatan Fasilitas Perkantoran (Rp.)</b>	<b>187.745.000</b>	<b>197.132.250</b>	<b>186.674.600</b>	<b>175.173.000</b>
Indikator	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana Kelengkapan Kantor	99%	99%	99%	99%
<b>Total (Rp.)</b>		<b>45.478.189.000</b>	<b>40.827.000.000</b>	<b>39.315.000.000</b>	<b>38.000.000.000</b>

**g. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Negara KESDM**

No.	Program/Kegiatan/Output	Penanggung Jawab	Target (Rp Milyar)				
			2015	2016	2017	2018	2019
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya							
Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian ESDM			37,1	25,7	26,9	27,9	29,3
1	Perencanaan, Keuangan, Ketatausahaan, Layanan Umum, Kepegawaian, Hukum dan Pengelolaan Data Informasi Pengelolaan BMN	Bagian Tata Usaha	4,9	5,1	5,3	5,6	5,9
2	Penatausahaan Barang Milik Negara	Bidang Penatausahaan BMN	4,7	4,9	5,1	5,3	5,6
3	Barang Milik Negara Yang Sudah Ditetapkan Status Penggunaannya	Bidang Penatausahaan BMN	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9
4	Pemindahtanganan, Penghapusan dan Pemanfaatan BMN di Lingkungan Kementerian ESDM	Bidang Pemindahtanganan, Penghapusan dan Pemanfaatan BMN	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9
5	Pengamanan Barang Milik Negara Kementerian ESDM	Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan	2,8	2,9	3,0	3,1	3,3
6	Pemeliharaan Barang Milik Negara Bidang ESDM	Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan	2,1	2,2	2,3	2,2	2,3
7	Output Cadangan	-	12,5	-	-	-	-



**h. Kegiatan Pengelolaan Komunikasi Publik**

<b>Pengelolaan Informasi Publik Kementerian ESDM</b>	<b>Target Anggaran (Milyar Rp.)</b>				
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Layanan Kehumasan dan Hubungan Kelembagaan	22,67	22,95	31,96	33,87	35,91
Layanan Dukungan Manajemen Pusat Komunikasi Publik	3,16	3,04	4,08	4,33	4,58
<b>Total</b>	<b>25,83</b>	<b>25,97</b>	<b>36,04</b>	<b>38,20</b>	<b>40,49</b>

**LAMPIRAN:**

• **LAMPIRAN-1:**

Matriks Kelembagaan Setjen KESDM Tahun 2015-2019

• **LAMPIRAN-2:**

Matriks Kerangka Regulasi KESDM Tahun 2015-2019

**LAMPIRAN-1:**

Matriks Kelembagaan Setjen KESDM Tahun 2015-2019

**LAMPIRAN-2:**

Matriks Kerangka Regulasi KESDM Tahun 2015-2019